



PENELITIAN

**IDENTIFIKASI MASALAH
YANG DIHADAPI DAERAH TINGKAT II
DALAM MENGHADAPI ERA
LIBERALISASI, PERDAGANGAN
DAN INVESTASI**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PERWAKILAN JAWA BARAT
1997/1998**



PENELITIAN

**IDENTIFIKASI MASALAH
YANG DIHADAPI DAERAH TINGKAT II
DALAM MENGHADAPI ERA
LIBERALISASI, PERDAGANGAN DAN
INVESTASI**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA .
PERWAKILAN JAWA BARAT**

1997/1998 .

NO. INDUK : _____

TGL. DIC. TAT : _____

D A R I : _____

K O D E : _____

EXECUTIVE SUMMARY

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi Daerah Tingkat II dalam aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dalam menyongsong datangnya era liberalisasi perdagangan dan investasi tahun 2003. Dengan mengetahui masalah tersebut, diharapkan akan dapat diketahui pula kesiapan Daerah Tingkat II dalam menghadapi persaingan global dengan negara-negara lain yang lebih maju.

Populasi penelitian ini adalah seluruh Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II se Indonesia, yang kemudian ditentukan sampel sebanyak 9 Daerah Tingkat I dan masing-masing Daerah Tingkat I dipilih 2 Daerah Tingkat II. Dengan demikian, penentuan sampelnya menggunakan teknik *stratified random sampling*. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode *eksploratif*, yang ingin menggali sebanyak mungkin data dan informasi (khususnya yang bersifat kualitatif) yang kemudian akan diinterpretasi dan dianalisis secara kualitatif juga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses globalisasi yang sedang berlangsung menimbulkan beberapa dampak dalam aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun

sumber daya manusia, dimana dampak-dampak ini telah dirasakan pula oleh Daerah Tingkat II. Dengan kata lain, globalisasi akan mempengaruhi struktur, kultur dan sistem kehidupan suatu negara, dalam hal ini adalah yang berhubungan dengan sektor industri, perdagangan, investasi dan pembiayaan di daerah.

Beberapa masalah yang berkaitan dengan kelembagaan pemerintah Daerah Tingkat II antara lain adalah belum adanya lembaga khusus yang menangani masalah investasi, belum berjalannya kemitraan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil dan koperasi secara optimal, masih terjadinya tumpang tindih antar kepentingan diberbagai sektor, lemahnya permodalan industri kecil dan rumah tangga disertai pula dengan belum berfungsinya pembinaan dari pemerintah secara baik, dan sebagainya.

Dari aspek ketatalaksanaan, permasalahan yang dihadapi antara lain berupa lemahnya manajemen usaha khususnya bagi usaha kecil dan koperasi, prosedur ekspor yang belum sepenuhnya mendukung kelancaran ekspor, prosedur perijinan dalam rangka investasi yang terlalu lama dan relatif birokratis (berbelit-belit) serta bersifat sentralistis, perumusan Peraturan Daerah yang belum dapat berjalan sesuai dengan semangat deregulasi karena adanya berbagai keterbatasan, dan sebagainya.

Sementara itu permasalahan pokok dalam aspek SDM yang dihadapi oleh Daerah Tingkat II dalam era globalisasi perdagangan dan investasi adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kurang mendukung – terutama dari aspek pendidikan, daya saing dan kualitas hidupnya.

Seluruh permasalahan tersebut masih ditambah dengan maslaah pada aspek sarana, yakni ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai, misalnya fasilitas infrastruktur atau sistem data base yang belum berjalan maksimal.

Terhadap permasalahan yang dihadapi, Daerah Tingkat II telah dan terus melaksanakan usaha-usaha baik melalui perumusan kebijakan maupun secara langsung untuk mengatasinya, sekaligus untuk meningkatkan kesiapan dan daya saing daerah yang bersangkutan untuk masuk dalam sistem liberalisasi perdagangan dan investasi tersebut.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, bimbingan, anugerah dan petunjuk-Nya, sehingga penulisan laporan akhir penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Disadari bersama bahwa bangsa dan masyarakat Indonesia dalam waktu dekat akan menjadi bagian yang integral dari sistem perdagangan dan investasi bebas, baik pada lingkup ASEAN, Asia Pasifik maupun dunia pada umumnya. Kondisi ini tentu perlu disambut dengan optimisme, namun tetap dengan upaya persiapan yang optimal.

Atas dasar pemikiran ini, maka tim peneliti menganggap perlu adanya suatu pengkajian mengenai "Permasalahan yang Dihadapi Daerah Tingkat II dalam Menghadapi Era Liberalisasi Perdagangan dan Investasi", sehingga dilakukanlah proyek penelitian ini.

Kami berharap bahwa dengan penyelenggaraan penelitian ini serta penyusunan laporan penelitian ini, akan

dapat dijadikan sebagai gambaran awal mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Daerah Tingkat II, sehingga pada gilirannya akan dapat ditentukan kebijakan yang tepat dalam rangka mengantisipasi berbagai dampak yang timbul dari proses globalisasi tersebut.

Atas terselesaikannya laporan ini, kami ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengarah dari Lembaga Administrasi Negara, dalam hal ini Bapak Ketua LAN dan Kepala LAN Perwakilan Jawa Barat. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan pula kepada para nara sumber pada saat berlangsungnya Lokakarya Hasil Penelitian sehingga lebih memberikan bobot kepada laporan ini.

Terima kasih yang tak terhingga dan tidak mungkin terlupakan kami sampaikan kepada para nara sumber lapangan yang terdiri dari Kepala Dinas pendapatan Daerah Tingkat I, Kepala Kanwil Perdagangan dan Industri, Kepala BKPMD Propinsi, dan Ketua Bappeda Tingkat I seluruh daerah penelitian, dengan segenap peserta fungsional yang terkait. Sumbangan pemikiran dan informasi dari mereka sungguh sangat bermanfaat dalam penulisan laporan ini. Dan juga kepada seluruh anggota tim peneliti, kami ucapkan terima kasih atas kekompakan dan semangat kerja yang tiada pernah padam hingga tersusunnya laporan ini.

Akhir kata kami sadari bahwa laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Temuan-temuan dalam laporan ini lebih banyak bersifat relatif, sehingga diperlukan pengkajian dan pendalaman lebih lanjut agar ditemukan suatu kebenaran dan keobyektifan yang lebih dapat dipercaya.

Oleh karena itu, kepada semua pihak yang berkenan memberikan saran, kritik, masukan, tanggapan dan usulan perbaikan, kami terima dengan lapang dada disertai ucapan terima kasih.

Pemimpin Proyek,

Wawan Dharma Setiawan, SH
NIP 270000690

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
EXECUTIVE SUMMARY	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Pikir	9
F. Definisi Operasional Variabel.....	18
G. Metodologi Penelitian	19
H. Populasi dan Sampel Penelitian	19
I. Teknik Pengumpulan Data	21
J. Teknik Analisis dan Interpretasi Data	21
K. Target (Sasaran) Penelitian	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Globalisasi dan Implikasinya	23
B. Perdagangan Bebas Antar Bangsa Sebagai Ciri Globalisasi	31
C. Peran dan Pergeseran Peran Pemerintah (Daerah) Dalam Era Perdagangan Bebas ..	36
D. Masalah-Masalah Pembangunan	48
1. Kemiskinan dan Kesenjangan.....	49
2. Urbanisasi dan Pengangguran.....	56
3. Hutang Luar Negeri.....	60
E. Kebijakan Makro Ekonomi Negara Berkembang (c.q. Indonesia) dan Tingkat Kinerjanya ...	67
1. Manajemen makro Ekonomi	73
2. Kerangka Kerja Regulasi dan Promosi.....	74
3. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia	78
4. Perlindungan Masyarakat Miskin dan Pengentasan Kemiskinan	81

BAB III PROFIL PEREKONOMIAN DAERAH MENGHADAPI ERA LIBERALISASI PERDAGANGAN DAN INVESTASI

A. Profil Daerah Berdasarkan Indikator Sosial Kependudukan	85
--	----

B. Profil Daerah Berdasarkan Indikator	
Ekonomis	88
1. Struktur Ekonomi Daerah.....	88
2. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB	92
3. Pendapatan Asli Daerah	99
4. Industri, Perdagangan dan Investasi...	103

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tantangan dan Peluang	121
1. Tantangan	122
2. Peluang	124
B. Permasalahan yang Dihadapi Daerah Tingkat II Dalam Menghadapi Era Globalisasi	126
1. Aspek Kelembagaan	130
2. Aspek Ketatalaksanaan	131
3. Aspek Sumber Daya Manusia	135
4. Aspek Sarana dan Prasarana	137
C. Dampak Liberalisasi Perdagangan dan Investasi terhadap Kinerja Daerah Tingkat II	139
D. Prospek Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Umum di Daerah Tingkat II pada Era Globalisasi	145

E. Kebijakan Daerah Tingkat II dalam Menghadapi Liberalisasi Perdagangan dan Investasi	148
--	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	161
B. Saran-Saran (Rekomendasi)	163

DAFTAR KEPUSTAKAAN	168
LAMPIRAN	174

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sampel Penelitian.....	20
Tabel 2.2	Persentase Kemiskinan Menurut BPS, Sajogyo dan Esmara.....	54
Tabel 2.2	Jumlah Perusahaan Milik Negara Berdasar Sektor.....	78
Tabel 3.1	Persebaran Angkatan Kerja Berdasar Sektor di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.....	87
Tabel 3.2	Struktur Ekonomi Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor (Tahun 1994 s/d Tahun 1995).....	91
Tabel 3.3	Proyeksi PDRB Kotamadya Dati II Bogor Tahun 1995 – 2000 (dalam juta)	95
Tabel 3.4	PDRB Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan 1993 Pada Periode 1992 – 1996 (Dalam Persen).....	96
Tabel 3.5	Realisasi PAD Seluruh Daerah Tingkat II di Bali.....	100

Tabel 3.6	Perkembangan Industri Daerah (Sulawesi Selatan) Tahun 1992/1993 - 1995/1996.....	106
Tabel 3.7	10 Komoditi Andalan Ekspor Propinsi Sumatera Selatan.....	108
Tabel 3.8	Pertumbuhan Ekspor dan Impor Sumatera Selatan (Periode 1989 – 1996).....	109
Tabel 3.9	Ekspor Hasil Industri Jawa Timur.....	110
Tabel 3.10	Perkembangan Nilai Ekspor Sulawesi Selatan 1992-1996	111
Tabel 3.11	Perkembangan Ekspor Menurut Komoditas Di Sulsel Tahun 1992 – 1996 (000 US\$)....	112
Tabel 3.12	Jumlah Investasi di Propinsi Daerah Tingkat I Bali	116
Tabel 3.13	Perkembangan Komposisi Antara Investasi Pemerintah Dengan Swasta/Swadaya Masyarakat Periode 1992/1993 – 1996/1997 (Dalam Juta Rupiah)	117
Tabel 3.14	Rekapitulasi Distribusi Investasi di Sulawesi Selatan	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	16
Gambar 2.1	80
Gambar 2.2	83

DAFTAR GAMBAR

10	Gambar 1.1
20	Gambar 2.1
30	Gambar 2.2

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Deklarasi Bogor yang disepakati oleh para pemimpin negara-negara APEC pada tanggal 15 November 1994 telah melahirkan komitmen untuk mewujudkan liberalisasi perdagangan dan investasi pada tahun 2010 bagi negara-negara maju dan tahun 2020 bagi negara-negara berkembang, khususnya di kawasan Asia - Pasifik. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan dan investasi dipandang sebagai sarana utama bagi kerjasama internasional dan usaha untuk mendorong akselerasi pembangunan ekonomi di masing-masing negara.

Deklarasi Bogor tersebut diyakini sebagai tonggak sejarah perekonomian dunia yang mendukung liberalisasi perdagangan global, sebagaimana diungkapkan oleh mantan Perdana Menteri Australia **Paul Keating** (Kompas, 16 November 1994). Dengan itu pula Indonesia menjadi bagian dari proses globalisasi ekonomi, suatu proses yang memungkinkan kegiatan perekonomian (produksi dan konsumsi) dapat dilakukan dimanapun tanpa memandang batas negara.

Dengan globalisasi industri dan perdagangan ini kegiatan perekonomian tidak lagi dibatasi oleh wilayah kedaulatan suatu negara, tetapi ditentukan oleh keberadaan faktor-faktor produksi yang memungkinkan terjadinya efisiensi produksi dan distribusi. Sasaran inilah yang kemudian mendorong terbentuknya regionalisasi kerjasama perekonomian dalam bentuk kawasan perdagangan bebas di berbagai belahan dunia seperti Kawasan Amerika Utara (NAFTA), Amerika Latin (LAFTA), ASEAN (AFTA), Eropa (EU), maupun di kawasan Asia Pasifik (APEC). Kondisi ini juga diikuti dengan berdirinya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang mengatur berbagai kegiatan dan kerjasama internasional dalam bidang perdagangan sebagai wujud pelaksanaan dari berbagai kesempatan internasional yang tertuang dalam GATT yang dihasilkan oleh Putaran Uruguay.

Dampak dari liberalisasi perdagangan internasional yang penting bagi Indonesia adalah terjadinya persaingan bebas dan langsung antara berbagai produk lokal dengan produk asing, baik di pasaran domestik maupun internasional. Dalam hal ini efisiensi investasi produksi dan distribusi produk-produk industri menjadi semakin penting. Produk-produk yang berkualitas dan berharga murah atau wajar akan berhasil memenangkan persaingan baik di pasar domestik maupun internasional. Dan dalam hal ini tidak akan lagi dapat ditolerir adanya proteksi pemerintah atas produk industri lokal, melainkan dengan pengaturan tarif yang wajar.

Sehubungan dengan itu sebagaimana diungkapkan oleh **Umar Juoro** (*Deklarasi Bogor dan Agenda Nasional*, Kompas, 24 November 1994), bahwa manfaat yang dapat diterima Indonesia dengan adanya Deklarasi Bogor tersebut di atas, justru terletak pada perkembangan APEC dalam kerja sama (*Cooperation*) atau kemitraan (*Partnership*) dalam pengembangan SDM, IPTEK, infrastruktur ekonomi, pengembangan usaha kecil dan menengah, lingkungan hidup, dan kerja sama swasta.

Hal ini didasarkan kepada argumentasi bahwa liberalisasi akan mengakibatkan perkembangan yang tidak seimbang antara negara maju dengan negara berkembang. Negara-negara maju dan industri baru (NIC's) akan lebih banyak mendapatkan keuntungan, sementara negara-negara berkembang hanya menjadi penerima re-alokasi industri yang tidak lagi kompetitif, atau justru menjadi pasar sasaran yang gemuk bagi produk-produk negara maju, dan lebih jauh lagi dikhawatirkan banyak industri domestik (khususnya yang memperoleh berbagai fasilitas atau proteksi dari pemerintah) di negara berkembang yang akan berguguran (gulung tikar) karena tidak mampu bersaing dengan industri dan investor dari negara-negara maju.

Bertumpu pada argumentasi tersebut, maka perekonomian Indonesia, sebagaimana juga negara-negara berkembang lainnya, dihadapkan kepada tuntutan yang semakin mendesak untuk merumuskan kembali strategi nasional guna menentukan langkah yang perlu dilakukan

dalam menghadapi era liberalisasi investasi dan perdagangan yang akan datang. Menurut **Sayidiman Suryohadiprojo** (Republika, 7 November 1994 : hal. 6), Indonesia harus mengusahakan perkembangan dan kemajuan ekonomi yang lebih kuat dan luas ketimbang sekarang, terutama pada sektor usaha menengah dan kecil serta dalam upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Hal ini didasarkan pada penilaian bahwa ekonomi Indonesia masih mengandung banyak kesenjangan antara lain: Kesenjangan antara kondisi ekonomi di sekitar Jakarta dengan di daerah, terutama di luar Jawa dan lebih khusus lagi di Indonesia bagian Timur (KTI). Kesenjangan dalam kekuatan keuangan dan permodalan antara segolongan kecil pengusaha besar dan pejabat negara dengan mayoritas rakyat. Kesenjangan dalam mutu pendidikan yang diperoleh sebagian minoritas rakyat karena tinggal di kota-kota besar dan cukup kuat keuangannya dengan sebagian besar rakyat kecil yang tinggal di luar kota besar.

Kesenjangan yang nyata dan cukup besar skalanya tersebut jika tidak berhasil dikurangi maka akan sulit bagi Indonesia untuk memiliki kekuatan ekonomi nasional yang betul-betul tangguh untuk menghadapi persaingan dalam era liberalisasi investasi dan perdagangan dunia..

Di samping itu, berbagai tantangan masih dihadapi sektor Industri di Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh **Tunky Ariwibowo**, Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Kabinet Pembangunan VI beberapa waktu lalu, antara lain adalah permasalahan birokrasi dan peraturan-peraturan yang belum menunjang usaha efisiensi dan pengurangan beban ekonomi biaya tinggi. Untuk itu menurutnya, rantai birokrasi dalam pengaturan sektor industri dan perdagangan perlu dipangkas, antara lain melalui kebijaksanaan untuk mempermudah prosedur perijinan.

Terkait dengan kondisi sektor aparatur negara dewasa ini, disadari betul, bahwa ekonomi biaya tinggi yang menjadi momok investasi modal asing maupun modal domestik masih dirasakan, terutama dikarenakan masih berbelitnya prosedur penyelesaian perijinan, birokrasi yang panjang, serta masih adanya kolusi dan korupsi oleh sementara oknum aparatur negara baik di Pusat maupun di Daerah.

Dengan demikian, pemberlakuan Deklarasi Bogor pada tahun 2020 mendatang, menuntut adanya perubahan-perubahan struktural dalam berbagai hal, termasuk dalam sektor aparatur negara. Pengembangan kualitas SDM, khususnya Aparatur Negara harus terus ditingkatkan melalui kebijaksanaan Pendayagunaan Aparatur Negara, dengan orientasi untuk dapat menghasilkan aparatur yang berkualitas, profesional, kreatif, inovatif, berjiwa entrepreneur, serta tanggap terhadap berbagai tuntutan perubahan kualitas dan variasi pelayanan kepada masyarakat maupun para pelaku ekonomi. Aparatur Negara yang berkualitas ini diharapkan juga untuk mampu memainkan peran sebagai 'soko guru ekonomi' yang dapat meningkatkan efisiensi keuangan negara

serta memberikan kontribusi pada peningkatan anggaran penerimaan negara.

Bahwasannya, variabel 'citra aparaturnya' yang merupakan refleksi dari kemampuannya, loyalitas, dan tanggung jawabnya, mempunyai pengaruh besar terhadap aktivitas ekonomi suatu negara. Sebagai ilustrasi, kejadian larinya modal asing ke negara tetangga disebabkan sulitnya perizinan dan tetekek bengkek lainnya di negeri ini, merupakan contoh kongkrit. Pada era LPI nanti semua *barrier* non tarif seperti itu harus dihapuskan, bahkan hambatan-hambatan berupa tarif pun akan diturunkan berangsur-angsur. Meskipun berbagai upaya ke arah itu telah dilakukan pemerintah, namun masih belum menyentuh semua aspek dan masih terjadi distorsi di sana-sini.

Bertolak dari semua itu, pembenahan aparaturnya merupakan tuntutan utama. Pembenahan ini perlu diarahkan kepada aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun personilnya, baik di Pusat maupun di Daerah. Jika tidak, kesenjangan (*gap*) antara tuntutan masyarakat dan para pelaku ekonomi, termasuk tuntutan yang berasal dari luar dengan kesiapan aparaturnya akan semakin melebar.

Memperhatikan tuntutan yang akan dihadapi itu, maka sangatlah penting memberdayakan daerah untuk masuk dan siap menghadapi era tersebut. Pemerintah Daerah Tingkat II harus lebih mampu meningkatkan sumber daya manusia, intensifikasi penggalian sumber-sumber daya alam,

masyarakat secara terintegrasi sehingga menjalin suatu sistem kerja yang sinergi, saling menunjang dan mendukung.

Daerah Tingkat II sebagai ujung tombak pemberi pelayanan terhadap masyarakat, dalam era liberalisasi nanti akan menghadapi berbagai tuntutan dan tantanagn baru sebagai akibat dari tuntutan dan tantangan yang bersifat umum. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai langkah awal perlu dilakukan identifikasi berbagai masalah yang dihadapi Daerah Tingkat II dalam menghadapi era liberalisasi tersebut.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: ***“Masalah-masalah apa yang dihadapi Daerah Tingkat II dalam menghadapi era liberalisasi perdagangan dan investasi mendatang?”***

C. Ruang Lingkup Penelitian

Karena luasnya jangkauan penelitian, baik dilihat dari aspek geografis, keterkaitan institusional, maupun dari aspek substansi penelitian, sementara sumber daya, waktu, tenaga, biaya, dan ketersediaan data yang bisa diperoleh relatif

terbatas, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Dari aspek geografis, studi akan dibatasi pada 18 Daerah Tingkat II yang tersebar di 9 Propinsi DT. I di Indonesia.
2. Dari aspek instansional, studi akan dibatasi pada instansi Dinas Daerah Tingkat II.
3. Dari aspek substansi, studi melingkupi aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia Aparatur di Daerah Tingkat II.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Mengidentifikasi masalah-masalah kelembagaan, ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia Aparatur yang dihadapi Dinas Daerah Tingkat II dalam menghadapi era liberalisasi perdagangan dan investasi.

2. Kegunaan

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bagi pengkajian lebih lanjut terhadap masalah-masalah yang dihadapi Dinas Daerah Tingkat II, sebagai antisipasi dalam menghadapi era liberalisasi perdagangan dan investasi mendatang.

- b. Sebagai bahan masukan bagi perumusan kebijaksanaan dalam mengatasi masalah-masalah praktis yang telah teridentifikasi, dan bisa diatasi langsung tanpa melalui pengkajian lebih lanjut.

E. Kerangka Pikir

Era liberalisasi perdagangan dan investasi merupakan suatu masa yang mengabsahkan terjadinya pertukaran barang, jasa, informasi, dan komoditas lainnya antar negara secara bebas, tanpa ada suatu rintangan baik berupa tarif, kuota, atau rintangan (*barrier*) lainnya.

Dengan demikian, situasi dan kondisi yang ada sekarang ini akan mengalami perubahan yang sangat mendasar. Perubahan yang akan terjadi tersebut, merupakan tantangan bagi Indonesia dan negara lainnya, yang secara logis akan berimplikasi kepada keharusan terjadinya perubahan dalam infrastruktur dan suprastruktur pemerintahan.

Ginanjari Kartasasmita (Seminar Nasional "Pembangunan Administrasi dalam PELITA VII", PERSADI, Maret 1997), mengemukakan beberapa tantangan yang akan dihadapi di masa depan tersebut, antara lain: Terciptanya ekonomi pasar dan integrasi ekonomi regional dan global, yang berarti pemerintah harus mampu mengendalikan ekonomi kita dalam lingkungan yang sangat kompetitif;

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Meningkatnya tuntutan akan penyempurnaan metode dan mekanisme kerja pemerintah, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi.

Tantangan lain menurut Ginanjar adalah meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat baik kualitas maupun kuantitasnya; Meningkatnya tuntutan akan partisipasi, bukan saja dalam pelaksanaan pembangunan tetapi juga dalam pengambilan keputusan; Meningkatnya tuntutan keterbukaan (*tranparancy*) dan kebertanggungjawaban (*accountability*) atas setiap kebijaksanaan pemerintah; Meningkatnya tuntutan akan kualitas kinerja dari lembaga maupun individu dari pemerintah; Serta meningkatnya tuntutan dan kebutuhan desentralisasi, dalam tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan.

Emil Salim (1997; 2) mengemukakan lima tantangan global yang perlu diantisipasi, yaitu : tantangan sekuriti, globalisasi ekonomi yang didasarkan pada mekanisme pasar dan dirangsang oleh perkembangan teknologi, tantangan politik, tantangan masalah sosial terutama faktor kependudukan, dan pengembangan sistem nilai.

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut **Sri Edi Swasono** (1997; 36) mengemukakan minimal harus memperhatikan 3 hal sebagai berikut : (1) dalam melibatkan diri secara aktif dalam proses globalisasi kita menolak terjadinya proses dominasi dari negara ekonomi kuat terhadap

negara ekonomi lemah; (2) Kita harus mampu mentransformasi proses globalisasi menjadi proses interdependensi, menangkis dependensi yang menjadi sumber neo-eksploitasi; (3) Dalam menghadapi keterbukaan internasional baik liberalisasi perdagangan maupun investasi kita harus tetap tangguh dan sadar kedaulatan (*sovereignty*). Dengan kata lain, dalam menghadapi keterbukaan ekonomi global adalah dengan menciptakan keunggulan komparatif baru, menghindari dependensi terhadap asing dan dominasi oleh kekuatan asing, membentuk interdependensi internasional, serta mengembangkan alternatif dan kesempatan ekonomi.

Menguatnya berbagai tantangan sebagaimana dikemukakan Ginanjar di atas, membawa kepada situasi yang mengharuskan kesiapan aparatur dalam menghadapinya. Aparatur harus mampu terbuka serta siap siaga dengan konsep pengembangan diri, untuk mengantisipasi partisipasi masyarakat yang muncul, dan mampu mengarahkan aspirasi yang beraneka ragam itu menjadi suatu *sinergi* yang mendukung pelaksanaan pembangunan.

Penghambatan dan pengekan terhadap aspirasi masyarakat, penyeragaman dan penggiringan (*regimentasi*), pemaksaan kehendak pemerintah terhadap masyarakat, merupakan konsep yang tidak akan laku lagi pada era keterbukaan dan liberalisasi. Semua itu hanya akan mematikan kreativitas dan daya inovatif masyarakat.

Berkenaan dengan peran dan fungsi Administrasi Publik yang secara operasional dilaksanakan oleh aparatur, serta berbagai kecenderungan perubahan yang akan terjadi, **Bintoro Tjokroamidjojo** (Seminar Nasional “Pembangunan Administrasi dalam PELITA VII”, PERSADI, Maret 1997), menyatakan bahwa dalam menghadapi perubahan lingkungan global, perlu perubahan fungsi Administrasi Publik dari semula bersifat *implementing* menjadi *monitoring, regulating, dan facilitating*. Peran utama dalam kehidupan dan pembangunan bangsa berada di tangan dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah lebih berperan *Tut Wuri Handayani*.

Wujud kongkrit dari peran pemerintah sebagai *Tut Wuri Handayani*, lanjut Bintoro, harus merupakan agenda dari reformasi administrasi (*Administrative Reform*), yang meliputi 5 (lima) aspek, yaitu: Deregulasi dan debirokratisasi ekonomi serta dekonsentrasi dan desentralisasi Pemerintah; Meningkatkan efisiensi birokrasi (termasuk mengurangi dan menghilangkan pungutan-pungutan tidak resmi); Orientasi kepada mutu, pelayanan dan pemberdayaan birokrasi dan masyarakat, termasuk pengembangan kode etik birokrasi; Pengembangan sistem karier yang efektif dan pengembangan efektivitas birokrasi; Serta peningkatan kesejahteraan pegawai dan pelayanan administrasi kepegawaian.

Perubahan peran Administrasi Publik sebagaimana dikemukakan Bintoro tersebut, tidak mungkin dapat berjalan tanpa dibarengi penyempurnaan dalam kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kualitas sumber daya manusia

aparaturnya. Alhasil, pembenahan ketiga aspek tersebut merupakan syarat utama dan pertama dalam menghadapi tuntutan liberalisasi masa yang akan datang.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat **J.B. Kristiadi** (Seminar Nasional “Pembangunan Administrasi Pada Pelita VII”, Maret 1997), yang menyatakan bahwa deregulasi dan debirokratisasi harus meliputi 3 aspek yaitu : struktur kelembagaan, prosedur ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Strategi untuk melakukan hal tersebut menurut JB. Kristiadi adalah (1) Restrukturisasi kelembagaan; (2) Revitalisasi aparatur, melalui diklat yang berkelanjutan, penyempurnaan sistem gaji, reward, dan punishment; (3) Penyempurnaan sistem dan prosedur melalui aplikasi teknologi dalam sektor aparatur; (4) Pembudayaan Etika dan Norma Birokrasi, melalui pembangunan hukum dan perundangan, serta peningkatan Taat Azas Birokrasi.

Masih berkenaan dengan reformasi birokrasi, **Miftah Thoha** (Seminar Nasional “Pembangunan Administrasi Pada Pelita VII”, Maret 1997) menyarankan bahwa reformasi birokrasi harus meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu: Kepemimpinan, kelembagaan, dan sistem dalam Administrasi Publik. Dalam aspek kepemimpinan yang perlu diperhatikan adalah rekrutment pemimpin, dan kemampuan pemimpin dalam menentukan visi organisasinya. Artinya, setiap pemimpin pada berbagai tingkatan di lingkungan aparatur harus mampu menentukan visi tentang unit organisasi yang dipimpinnya.

Dalam aspek kelembagaan perlu dilakukan penataan jumlah institusi yang ada, serta penataan jumlah pegawai yang ada. Untuk itu perlu dipikirkan bahwa pegawai golongan III ke bawah merupakan tenaga yang bersifat *outsourcing*.

Reformasi birokrasi dalam aspek sistem dan prosedur pelayanan Administrasi Publik harus mendukung sosok organisasi yang akan terbentuk pada abad 21, dengan karakteristik: (a) Tenaga kerjanya terdiri dari *primarily highly skilled knowledge workers*, (b) Pelayanan dan produknya terdiri dari *primarily of packages of knowledge*, (c) Organisasinya cenderung berskala global, peka teknologi, cepat berubah dan kompleks, (d) Aktivitas kerjanya terdistribusi melampaui batas waktu dan ruang, dan mereka menjadi *multipurpose* dan berkehendak melayani kebutuhan banyak pihak.

Dalam kaitan globalisasi ini, **Marzuki Usman** menyatakan, bahwa “manajemen dalam era global tidak hanya membutuhkan 3S (strategi, struktur dan sistem), tetapi ditambah 4S pelengkap, yaitu *style, staff, skills, dan share goals*. Selain itu, proses manajemen tidak lagi hanya terdiri dari *planning, organizing, communicating, coordinating, dan controlling*, tetapi telah berubah menjadi *consultation, communication, coordination, collaboration, dan mediation*.

Sementara itu **Wahjudi Prakarsa** (1997) menyatakan “Perubahan lingkungan usaha yang sedang berlangsung belakangan ini cukup drastis sehingga telah mendorong

pergeseran dalam paradigma (*paradigm shift*) organisasi dan manajemen yang selama ini dirujuk dan telah melembaga dalam hirarki administrasi. Dalam Era Revolusi Industri paradigma yang cenderung ke arah *system of governance* “hirarkis, mekanistik, otokratik dan konfrontatif” sedang mengalami transformasi menuju paradigma baru yang lebih sesuai dengan Era Revolusi Informasi dan Globalisasi dengan *system of governance* “jejaring, organismik, partisipatif, dan koeksistensi”.

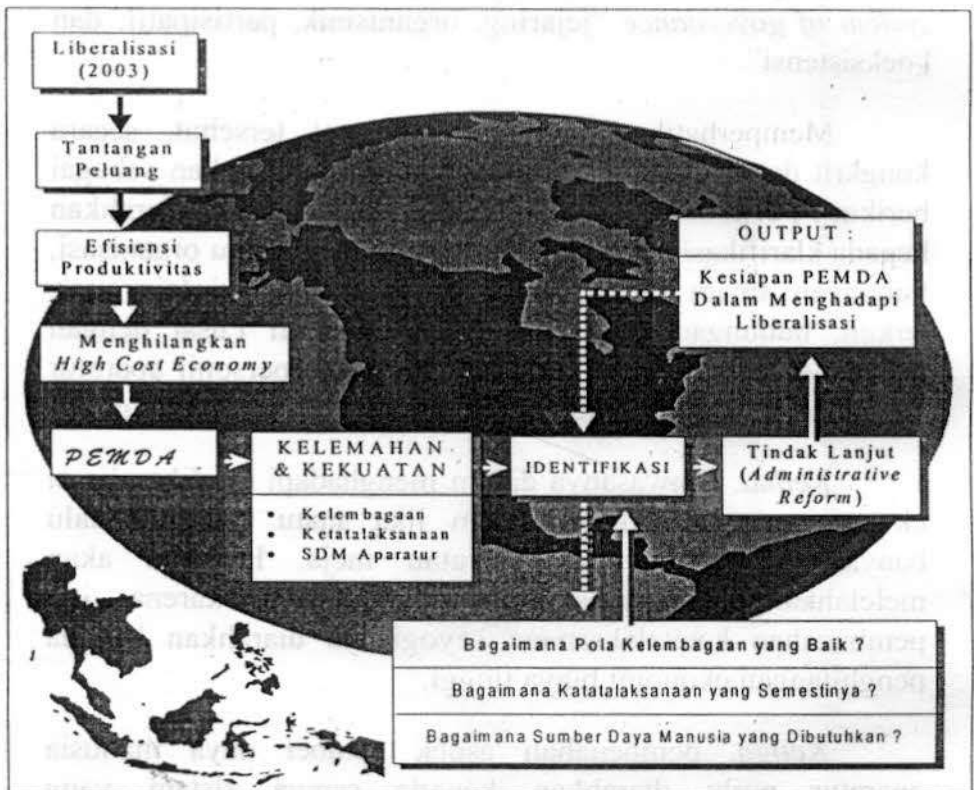
Memperhatikan berbagai pendapat tersebut, secara kongkrit dapat diwujudkan dalam beberapa tindakan sebagai berikut : *Pertama*, pembenahan kelembagaan perlu diarahkan kepada klarifikasi hubungan antar unit dalam suatu organisasi, hubungan antara suatu institusi dengan institusi lain yang terkait, hubungan antara instansi-instansi di Pusat dengan instansi-instansi di daerah, serta kualifikasi personil aparatur yang diperlukan dalam setiap unit atau kelembagaan yang ada.

Kedua, bahwasanya dalam menghadapi era liberalisasi ekonomi nanti, tidaklah efisien jika suatu urusan terlalu banyak melibatkan instansi atau meja. Hal itu akan melelahkan para pelaku ekonomi. Oleh karena itu, pembenahan ketatalaksanaan seyogianya diarahkan kepada penghilangan ekonomi biaya tinggi.

Ketiga, pembenahan aspek sumber daya manusia aparatur perlu diarahkan kepada semua sistem yang menyangkut kepegawaian yang ada, yang meliputi Sistem

Rekrutment Pegawai, Sistem Pembinaan Pegawai, Sistem Pengembangan Pegawai, Sistem Karier Pegawai, dan sebagainya, perlu dilakukan peninjauan kembali.

Dalam gambar, kerangka pemikiran yang dipaparkan di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar pola pikir di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Liberalisasi perdagangan dan investasi akan menimbulkan berbagai tantangan dan peluang ekonomi yang berimplikasi kepada keharusan pelaku ekonomi bertindak dengan efisiensi dan produktivitas yang tinggi.
2. Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, perlu penghapusan segala hal (terutama dalam aspek birokrasi) yang bisa mengakibatkan biaya tinggi.
3. Adanya *high cost economy* di lingkungan aparatur Pemerintah Daerah Tingkat II, terutama karena kelemahan struktural dalam kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparturnya. Oleh karena itu, untuk menghilangkan *high cost economy* pada sektor aparatur tersebut, perlu dilakukan *administrative reform*;
4. Jika dilakukan *administrative reform* (reformasi administrasi) yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur, maka akan dihasilkan sosok aparatur Pemerintah Daerah Tingkat II yang siap menghadapi era liberalisasi perdagangan dan investasi.

F. Definisi Operasional Variabel

Untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi Daerah Tingkat II dalam menghadapi Era Liberalisasi Perdagangan dan Investasi mendatang, khususnya permasalahan yang terkait langsung dengan peran dan fungsi aparatur di Daerah, maka analisis penelitian difokuskan kepada 3 variabel penentu kesiapan aparatur Daerah Tingkat II, yaitu variabel kualitas kelembagaan, kualitas ketatalaksanaan, dan kualitas Sumber daya Manusia Aparatur.

1. *Kualitas Kelembagaan*, adalah efisiensi kelembagaan Dinas Daerah Tingkat II yang mendukung sistem dan prosedur perdagangan dan investasi di Daerah, yang meliputi hubungan kelembagaan antara instansi-instansi yang terkait dengan perdagangan dan investasi, baik hubungan antara instansi di Daerah Tingkat II, maupun antara instansi di daerah Tingkat II dengan instansi yang ada di atasnya.
2. *Kualitas Ketatalaksanaan*, adalah tingkat efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur yang mendukung perdagangan dan investasi di Daerah Tingkat II, yang meliputi perizinan, serta pengawasan dan pengendalian.
3. *Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur*, Tingkat pendidikan formal yang ditempuh oleh aparatur dinas Daerah Tingkat II dan kemampuan aparat dinas Daerah Tingkat II dalam berbahasa Inggris.

G. Metodologi Penelitian

Sesuai dengan substansi penelitian yang ingin mengungkap, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai masalah dan fakta-fakta yang diselidiki, maka metode yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah *Metode Eksploratif*.

Hal ini mengandung pengertian upaya menggali informasi dan data-data (terutama yang bersifat kualitatif) tentang aspek-aspek ekonomi, industri perdagangan dan investasi di Daerah Tingkat II. Terhadap data-data eksplorasi ini selanjutnya akan dianalisis dan atau diinterpretasikan secara kualitatif pula.

H. Populasi dan Sampel Penelitian

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa karena luasnya cakupan penelitian dilihat dari sisi objek penelitiannya, maka penelitian akan dibatasi pada beberapa dinas Daerah Tingkat II yang ada di salah satu Kabupaten Daerah Tingkat II di 9 Propinsi Daerah Tingkat I.

Tabel 1
Sampel Penelitian

No	Daerah Tingkat I	Daerah Tingkat II	Dinas
1.	Sumatera Utara	a. Kodya DT II Medan b. Kodya DT II Binjai	Masing-masing DT II diwakili oleh :
2.	Sumatera Selatan	c. Kodya DT II Palembang d. Kab. DT II OKU	1. Dinas PU 2. Dinas Pariwisata 3. Dinas
3.	Jawa Barat	e. Kodya DT II Bogor f. Kab. DT II Cianjur	Perindustrian 4. Dinas Tenaga Kerja
4.	D.I. Yogyakarta	g. Kodya DT II Yogyakarta h. Kab. DT II Sleman	5. Bappeda Tk. II 6. Dinas Pasar
5.	Jawa Timur	i. Kodya DT II Surabaya j. Kab. DT II Sidoarjo	
6.	Bali	k. Kodya DT II Denpasar l. Kab. DT II Badung	
7.	Sulawesi Selatan	m. Kodya DT II Uj. Pandang n. Kab. DT II Gowa	
8.	Sulawesi Utara	o. Kodya DT II Manado p. Kab. DT II Gorontalo	
9.	Kalimantan Selatan	q. Kodya DT II Banjarmasin r. Kab. DT II Banjar	

I. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan wawancara langsung atau diskusi panel, dan studi dokumentasi.

1. *Pengumpulan Data Primer.* Untuk keperluan pengumpulan data melalui wawancara, akan disediakan panduan wawancara (*interview guide*).
2. *Pengumpulan Data Sekunder.* Data sekunder yang diperlukan terutama data mengenai:
 - (1) Hubungan fungsional antara instansi-instansi yang terkait dengan perdagangan dan investasi di Daerah Tingkat II dan antara Dinas daerah Tingkat II tersebut dengan Instansi yang ada di atasnya ;
 - (2) Sistem dan prosedur perizinan, monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan perdagangan dan investasi di daerah Tingkat II;
 - (3) Tingkat pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh aparatur dinas Daerah Tingkat II.

J. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *pendekatan deskriptif analitis* terhadap data

sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen intern dinas daerah tingkat II, dan data-data kualitatif mengenai kepegawaian.

K. Target (Sasaran) Penelitian

Setelah dilakukannya penelitian ini, ditargetkan dapat terumuskan permasalahan-permasalahan pokok mengenai kelembagaan, ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia Aparatur yang dihadapi Dinas Daerah Tingkat II yang dihadapi, sehingga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah khususnya dalam upaya meningkatkan peranan Dinas Daerah terhadap pembangunan Daerah, terutama dalam menghadapi era liberalisasi mendatang.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Globalisasi dan Implikasinya

Menurut **George C. Lodge** dalam bukunya *Managing Globalization In The Age Of Interdependence* (1995 : 1), globalisasi adalah suatu proses dimana masyarakat dunia menjadi semakin terhubung (*interconnected*) satu sama lainnya dalam berbagai aspek kehidupan mereka baik dalam hal budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan. Akibatnya, dunia saat ini telah menjadi sebuah *pasar global*, bukan hanya untuk barang dan jasa, tetapi juga untuk penyediaan modal dan teknologi. Atau dengan kata lain, negara-negara di dunia, secara berangsur telah beralih kepada mekanisme pasar (*market-driven*) daripada campur tangan pemerintah dalam memecahkan berbagai persoalan perekonomian nasional.

Dengan keterkaitan antara satu negara dengan negara lainnya ini, salah satu implikasi yang muncul adalah ketatnya persaingan antar bangsa, baik dalam hal produk barang dan jasa, kapasitas sumber daya manusia, maupun dalam hal penyediaan fasilitas dan prosedur yang memadai untuk kegiatan investasi dari negara tertentu. Jika suatu negara tidak memiliki basis keunggulan berbanding (*comparative advantage*) apalagi keunggulan bersaing (*competitive*

advantage), maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut akan tergilas oleh negara lain, sehingga pada gilirannya, secara internasional akan menempatkan negara tersebut pada posisi terbelakang.

Dalam kaitan ini, sangat menarik untuk menyimak pendapat **Kristiadi** (1997 : 75-76) mengenai pergeseran basis perekonomian dari komparatif menjadi kompetitif suatu negara sebagai berikut :

“Dalam menghadapi era liberalisasi ekonomi Asia Pasifik (APEC) dan dunia (WTO) yang tidak mungkin dihindari, pergeseran basis kompetitif dari sumber daya alam kepada sumber daya manusia, sudah menjadi tuntutan mutlak. Sebab, hanya negara-negara yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sajalah yang akan mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya dengan cepat. Negara-negara yang hanya mengandalkan kekayaan SDA tetapi mengabaikan kualitas SDM, tidak akan mampu bersaing dalam dunia internasional dibandingkan dengan negara yang mempunyai SDA terbatas namun memiliki SDM yang unggul”.

Untuk menghindari kekalahan dalam persaingan global ini, maka suatu negara harus melakukan upaya-upaya reformasi dalam kebijakan publiknya. Bahkan **Tanri Abeng** (1997 : 91) menegaskan bahwa proses globalisasi selalu menghendaki dilakukannya transformasi manajemen bagi

setiap organisasi, baik privat maupun organisasi publik. Tuntutan akan perlunya transformasi manajemen atau penerapan paradigma baru manajemen ini ditekankan juga oleh **Emil Salim** (1997 : 18-19) yang mengatakan sebagai berikut:

“..... proses globalisasi yang sedang melanda dunia sekarang ini melahirkan kebutuhan mengkaji ulang pola-pola manajemen yang dilaksanakan sekarang untuk diubah dan disesuaikan agar mampu menanggapi tantangan jaman. pola manajemen modern ini tidak hanya perlu dikembangkan dalam lingkungan bisnis, tetapi lembaga pemerintah dan organisasi kemasyarakatan umumnya juga perlu mengembangkan pola manajemen modern, sungguhpun tidak serupa dengan keperluan bisnis – tetapi paling tidak – sesuai dengan keperluan untuk menanggapi tantangan global”.

Perlunya transformasi manajemen sektor publik ini dilatar belakangi oleh suatu masalah yang sangat krusial, yaitu bagaimana menciptakan efisiensi kerja serta mendorong kinerja sektor publik. Sebab, kondisi aktual maupun faktual selama ini menunjukkan bahwa organisasi pemerintah masih cenderung bersifat organik dengan mekanisme kerja yang tidak efisien serta kurang memiliki daya saing yang memadai dibanding sektor privat atau swasta, apalagi dibandingkan dengan pihak luar negeri.

Hal ini menunjukkan adanya ironi, bahwa ditengah penilaian positif dari dunia internasional kepada Indonesia dalam bidang ekonomi – seperti yang akan dipaparkan dibawah – ternyata kondisi riil lebih banyak bersifat negatif. Dalam kasus ini muncul permasalahan, apakah penilaian dunia internasional tersebut benar-benar obyektif. Sebab, hanya dalam beberapa tahun setelah predikat “ajaib” tersebut, justru Indonesia kembali terlempar ke jurang krisis kegelapan, kelaparan dan keterbelakangan.

Bahkan secara terbuka, **Presiden Soeharto** (dalam Kompas, 1 April 1998 : 1) mengakui bahwa sebagai akibat krisis moneter dan krisis ekonomi, pendapatan rata-rata per kapita rakyat telah menurun, yang berarti makin banyak jumlah penduduk miskin di Indonesia dalam sembilan bulan ini. Dalam keterangan lebih rinci, Menko Ekuin / Ketua Bappenas mengatakan bahwa pendapatan per kapita Indonesia tahun 1998 diperkirakan sebesar US \$ 610, atau menurun dibandingkan tahun 1996 sebesar US \$ 1.155 dan tahun 1997 sebesar US \$ 1.088.

Oleh karena itu, salah satu hantu yang membayangi dari krisis moneter dan perekonomian ini adalah mandegnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada umumnya, serta penurunan kualitas pelayanan umum (*public service*) pada khususnya. Inilah tantangan utama bangsa Indonesia dalam memasuki abad 21 yang penuh persaingan, terutama bagaimana memelihara konsistensi suatu kebijakan serta

menjaga keberhasilan pembangunan pada tingkat yang diharapkan.

Meskipun demikian, reformasi sektor publik sesungguhnya tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan untuk menciptakan efisiensi kerja serta mendorong kinerja sektor publik, melainkan juga sebagai strategi dalam mengantisipasi terjadinya perubahan bentuk dan sifat organisasi (baik privat maupun publik) yang disebabkan oleh proses globalisasi itu sendiri. Dengan kata lain, paradigma administrasi pemerintahan – baik kelembagaan maupun pola kepemimpinannya – tidak dapat disamakan pada suatu komunitas tradisional yang relatif bersifat *placid randomized*, dengan masyarakat informasi yang *turbulent*.

Dalam hubungan mengenai perubahan bentuk dan sifat organisasi ini, **Steven A. Rosell** (1992 : 26-27) menyebutkan adanya empat lingkungan organisasi.

Pertama, adalah organisasi dengan lingkungan yang bersifat *placid randomized environment* (tenang dan acak). Ini merujuk kepada suatu komunitas kecil yang masing-masing anggotanya hampir tidak memiliki hubungan sama sekali (*separate units very loosely connected*). Disamping itu, tahap ini dicirikan oleh adanya persaingan sempurna. Namun, organisasi tipe demikian sesungguhnya tidak pernah ada, sebab membutuhkan adanya prasyarat bahwa setiap orang harus *well informed* dan semua organisasi berskala atomistik. Oleh karena itu, pada tahap ini tidak terdapat perbedaan antara

strategi dan taktik dalam pola kepemimpinan yang dibutuhkan.

Kedua, tipe lingkungan yang disebut *placid clustered* yang dicirikan oleh adanya organisasi-organisasi yang lebih besar dan mengelompok, serta menjalin hubungan secara lebih kuat melalui mekanisme persaingan tidak sempurna. Dalam keadaan ini, kehidupan organisasional lebih banyak diatur oleh mekanisme pasar (*the invincible hand*), sehingga tidak terjadi banyak distorsi. Dengan kata lain, lingkungan semakin terpola dan kelangsungan hidup organisasi akan sangat tergantung pada sejauhmana organisasi tersebut memahami pola-pola lingkungan disekitarnya. Akibatnya, pimpinan organisasi akan memandang strategi jauh berbeda dibanding sekedar taktik.

Selanjutnya pada tahap ketiga terdapat lingkungan yang *disturbed-reactive* sebagaimana halnya pada pasar oligopolistik. Disini terdapat beberapa unit organisasi yang besar dan bertipe sama, saling berinteraksi dan mengambil keuntungan dari interaksi yang dilaksanakan tersebut. Untuk itu, organisasi dalam lingkungan ketiga ini perlu menambahkan fungsi baru antara strategi dan taktik, yang disebut operasi.

Adapun tipe lingkungan organisasi terakhir adalah *turbulent field*. Organisasi pada tahap ini akan sangat saling berhubungan dan saling memberikan efek yang sangat kuat dari hubungan tersebut. Akan tetapi dinamika organisasi tadi

sesungguhnya tidak hanya lahir dari hubungan yang dijalin, tetapi juga oleh lingkungan dimana hubungan itu sendiri dijalin. Dalam kutipan aslinya, **Steven A. Rosell** (1992 : 27) menulis : “.... *the dynamic properties arise not simply from the interactions of the component organizations, but also from the field itself. The ground is in motion*”.

Bentuk dan sifat organisasi kemasyarakatan dan pemerintahan dewasa ini pada dasarnya berada pada tipe lingkungan yang keempat, sehingga setiap organisasi memiliki potensi besar untuk berubah disebabkan lingkungan yang turbulent. Dengan kata lain, dewasa ini telah terjadi perubahan lingkungan dari yang *placid randomized* menjadi lingkungan yang *turbulent*. Dan perubahan lingkungan ini selalu mensyaratkan adanya perubahan paradigma manajemen dalam suatu organisasi.

Dalam kaitan ini, **Wahyudi Prakarsa** (1997 : 46) menyebutkan adanya tiga perubahan dimensi paradigma, yakni perubahan dalam *struktur, sistem dan kultur*. Dalam dimensi struktur, organisasi yang rigid dengan prinsip *big is beautiful* harus diubah menjadi fleksibel dengan prinsip *small is beautiful*. Dalam dimensi sistem, siklus pengawasan dengan model *quality control circle* menjadi *total quality management*. Sedangkan dalam dimensi kultur, prinsip *competition* harus berubah menjadi prinsip *coopetition*.

Sementara itu, dalam aspek sumber daya manusia, proses globalisasi dan implikasinya meniscayakan keberadaan

manusia-manusia pelaksana pembangunan dan pemerintahan yang profesional. Dalam kaitan ini, **Mary Ann von Glinow** (1988 : 12) menyatakan bahwa konsepsi profesional harus mencakup sedikitnya enam sifat sebagai berikut :

- *Expertise* – normally gained from prolonged specialized training – in a body of abstract knowledge.
- *Autonomy* – a perceived right to make choices that concern both means and ends.
- *Commitment to the work and profession* – in short, the “calling”.
- *Identification with the profession and other professionals.*
- *Ethics* – a felt obligation to render service without concern for self-interest and without becoming emotionally involved with clients.
- *Collegial maintenance of standards* – a perceived commitment to police the conduct of other professionals.

Sedangkan **Noorsyamsa Djumara** (1997 : 19-20) menulis bahwa pembentukan kompetensi dan kepemimpinan aparatur / pegawai negeri harus dilakukan meliputi : (1) Aspek intelektual, (2) Aspek manajerial, dan (3) Aspek behavioral. *Kompetensi intelektual* sangat diperlukan sehubungan dengan perkembangan berbagai bidang disiplin ilmu serta kemajuan masyarakat yang sangat pesat, sehingga aparatur pemerintah dituntut untuk dapat menghadapi setiap permasalahan dengan

wawasan yang tajam dan analitis, sehingga dapat ditentukan kebijakan atau keputusan yang tepat, akurat dan bermanfaat.

Kompetensi manajerial dibutuhkan mengingat bahwa kelompok aparatur sesungguhnya merupakan pemimpin (*elite*) dari masyarakat luas (*massa*). Menghadapi massa yang demikian heterogen disegala aspeknya, maka kepemimpinan yang partisipatif, responsif dan antisipatif menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

Adapun *kompetensi behavioral* atau perilaku, juga sangat diperlukan didalam era globalisasi yang sangat transparan ini. Sebab, sistem norma, kaidah atau nilai yang dibawa oleh arus globalisasi seringkali menjadikan orang cenderung individualis dan liberalis yang hanya mengejar keuntungan materi saja ; sementara kaidah-kaidah humanisme, moralisme, keharmonisan, kekeluargaan dan kebersamaan justru dilupakan.

B. Perdagangan Bebas Antar Bangsa Sebagai Ciri Globalisasi

Pada pembahasan diatas telah disinggung bahwa globalisasi akan mengakibatkan terjadinya keterkaitan antar bangsa dan persaingan antar bangsa. Keterkaitan dan persaingan tersebut secara konkrit diwujudkan dalam hubungan perdagangan. Oleh karena itu, hanya bangsa atau negara yang memiliki daya saing (produk dan SDM) tinggi

dengan dukungan struktur usaha yang lincah, sistem kerja yang efisien, serta budaya korporasi yang berbasis pada jiwa kewirausahaan, yang akan mampu memanfaatkan peluang globalisasi seoptimal mungkin.

Mengenai perdagangan internasional ini, secara teoretis mengacu kepada pendapat **Adam Smith** dan **David Ricardo**. **Smith** dalam bukunya berjudul *The Wealth of Nations : An Inquiry into The Nature and Causes* (1766) mengemukakan perlunya keunggulan mutlak (*absolute advantage*) bagi suatu negara, sementara **Ricardo** justru menganjurkan perlunya keunggulan nisbi (*comparative advantage*). Kedua tokoh ini tergolong dalam mashab ekonomi klasik.

Konsep *absolute advantage* mengajarkan bahwa pada umumnya akan menguntungkan bagi suatu negara bila mengkhususkan diri (*specialization*) dalam produk yang dapat dihasilkan dengan biaya lebih murah daripada negara lain. Jadi jika setiap negara melakukan hal yang serupa, maka semuanya akan beruntung atau lebih beruntung dari pada jika mereka menghasilkan sendiri semua produk yang mereka perlukan.

Sementara konsep *comparative advantage* mengajarkan bahwa meskipun suatu negara mampu menghasilkan berbagai produk yang biayanya lebih murah dari pada negara lain, tetap masih lebih menguntungkan baginya jika negara tersebut mengkhususkan diri hanya pada produk-produk yang paling murah biayanya dibanding negara

lain. Suatu negara hendaknya membiarkan negara lain menghasilkan produk yang perbedaan biayanya sedikit, sebab dengan demikian akan lebih banyak dana dan tenaga yang dapat dipusatkan pada produk yang paling efisien.

Menurut **Paul Ormerod** (1997 : 61), hingga hari ini konsep *comparative advantage* masih merupakan dasar perdagangan luar negeri. Konsep lanjutan dari konsep *absolute advantage* ini secara empirik berkembang seiring dengan perkembangan perekonomian Inggris berkat adanya penemuan-penemuan baru dibidang teknologi produksi dan industri. Kemajuan yang drastis dan dramatis tersebut mengakibatkan hampir semua barang dagangan waktu itu dapat dihasilkan oleh Inggris dengan biaya lebih murah (*absolute advantage*). Namun demikian, kenyataannya perdagangan dengan negara lain masih terus berlangsung. Hal ini disebabkan Inggris hanya mengkhususkan diri pada produk yang paling murah biaya pembuatannya, tidak hanya sekedar lebih murah dari biaya produk negara lain. Inilah inti dari prinsip *comparative advantage*.

Satu asumsi yang digarisbawahi dalam konsep **Ricardo** adalah bahwa teorinya hanya berlaku jika (*assumption*) dana dan tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk tidak bebas mengalir dari suatu negara ke negara lain. Jika faktor modal dan tenaga kerja bebas keluar masuk antar negara, maka teori ini tidak berlaku. Dengan demikian, sesungguhnya **Ricardo** mendukung pembatasan peredaran

modal (*capital mobility*) dan sangat menyedihkan kendornya pembatasan tersebut.

Sementara kondisi empiris kehidupan ekonomi saat dunia saat ini tidak memungkinkan suatu negara melakukan pembatasan-pembatasan atau proteksi, sebagai konsekuensi logis dari era globalisasi sebagaimana telah dijelaskan diatas. Dengan kata lain, pengandaian dalam teori **Ricardo** sudah tidak dapat lagi dipertahankan secara empirik. Ironisnya, para ekonom ortodoks masih tetap memuji perdagangan bebas dan pasar bebas sebagai suatu sistem baru yang akan menguntungkan semua negara.

Hal ini sangat bertentangan dengan pendapat **Maurice Allais** (dalam **Ormerod**, 1997 : 23) – ekonom Perancis peraih Nobel ilmu ekonomi tahun 1988 – yang mengeluarkan pernyataan pada bulan Maret 1993 sebagai berikut:

“Tidak betul bahwa perdagangan bebas pasti menguntungkan semua pihak. Perdagangan bebas hanya akan menguntungkan dalam keadaan yang sangat khusus, yakni jika tingkat perekonomian pihak yang terlibat kurang lebih sama. Itulah sebabnya, Perjanjian Maastricht itu keliru. Politik Komisi Eropa mengenai perdagangan bebas mengandung bahaya“.

Pandangan **Allais** menggambarkan betapa tingginya resiko yang akan dihadapi oleh suatu negara yang terikat dalam suatu kerjasama ekonomi regional dan yang menghilangkan batasan-batasan tertentu dalam praktek

perdagangannya. Jangankan secara global, untuk lingkup negara-negara Eropa Barat yang relatif maju saja, masih mengandung kekurangan-kekurangan. Inti dari permasalahan ini adalah adanya hubungan yang tidak simetris (*asymetric association*) dalam praktek perdagangan antar bangsa yang bersangkutan. Akibatnya, terjadilah *trade – gap* antara negara maju (*developed countries*) dengan negara yang relatif lebih terbelakang (*developing countries*).

Sehubungan dengan adanya bahaya dari prinsip perdagangan bebas tersebut, maka negara-negara berkembang yang akan bergabung kedalam forum kerjasama ekonomi internasional harus benar-benar memiliki keunggulan absolut, dan tidak semata-mata keunggulan nisbi seperti yang dianjurkan oleh **Ricardo**. Atau dengan kata lain, perlu dicapai suatu keseimbangan struktural ekonomi antar negara sebagai prasyarat keberhasilan sistem perdagangan bebas.

Dengan demikian, sistem perdagangan bebas tidak muncul menjadi ancaman, namun merupakan peluang bagi seluruh negara di dunia untuk meningkatkan kinerja ekonominya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ini dapat terealisasi hanya apabila perdagangan bebas dapat menimbulkan tiga situasi utama, yakni :

1. Menghindarkan terjadinya X-inefficiency. Artinya, dalam alam kompetisi, pihak produsen akan didorong untuk melaksanakan proses produksi yang efisien (meminimumkan biaya produksi) sehingga

harga yang dibebankan kepada pihak konsumen menjadi relatif murah.

2. Menghindarkan ketidakstabilan ekonomi makro yang menjurus kepada timbulnya *stop-go macroeconomic cycles*.
3. Mendorong berlangsungnya proses produksi dalam skala penuh dengan memperluas produksi untuk ekspor. Liberalisasi perdagangan diantisipasi menimbulkan situasi yang berciri *increasing returns to scale*, sehingga dapat kompetitif dipasaran internasional (Sritua Arief, 1998 : 149-150).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perdagangan bebas antar negara (*international trade*) dalam era globalisasi merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa ditolak, namun perlu disikapi dengan waspada dan hati-hati disertai dengan kesiapan sumber daya manusianya, baik dari kalangan aparatur dan pelaku ekonomi maupun lapisan masyarakat seluruhnya.

C. Peran dan Pergeseran Peran Pemerintah (Daerah) Dalam Era Perdagangan Bebas

Secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi utama suatu negara dengan perangkat pemerintahannya adalah untuk melayani dan melindungi kepentingan masyarakat, membebaskan penduduk dari rasa takut, sekaligus

meningkatkan kesejahteraan (Arief Budiman, 1996 : 29 ; Wahyudi Kumorotomo, 1992 : 62). Bahkan Frans Magnis Suseno (1988 : 305) mengatakan bahwa *raison d'être* atau alasan satu-satunya bagi eksistensi negara adalah kepentingan umum. Disamping itu, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara (*salus populi suprema lex*).

Dalam konteks ke-Indonesia-an, birokrasi harus mampu mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera.

Adanya fungsi kesejahteraan dan fungsi pelayanan yang diemban oleh birokrasi tadi jelas tidak dapat dipisahkan dari filsafat kerakyatan sebagai inti ajaran kontrak sosial yang dikembangkan oleh Jean Jacques Rousseau (*Du Contract Social*, 1762). Teori ini mengajarkan bahwa manusia pada fase masyarakat primitif memiliki sifat-sifat kesamaan. Namun dengan timbulnya hak milik perseorangan (*propriete privee*), sifat tadi berubah menjadi ketidaksamaan, yang pada gilirannya menimbulkan bentrokan (*conflict*) dan peperangan antar manusia yang mengakibatkan suatu keadaan kacau (*social disorder*). Untuk memperoleh ketenteraman dan kebebasan, maka masyarakat mengadakan perjanjian bersama (*kontrak sosial*), yang membentuk suatu pemerintahan dengan tugas-tugas pelayanan dan kesejahteraan (Koentjoro Poerbopranoto, 1987 : 17).

Untuk merealisasikan fungsi kesejahteraan dan fungsi pelayanan sebagaimana tersebut diatas, maka birokrasi pemerintahan harus menjalankan “kebijakan-kebijakan negara”. Dan untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan secara baik dan lancar, pemerintah dilengkapi dengan berbagai instrumen maupun sarana yang diharapkan mampu memacu kinerjanya secara optimal (*discretion of power*).

Oleh karena mengemban dua fungsi pokok ini, maka salah satu sisi normatif yang melekat pada setiap tindakan atau keputusan pejabat publik (sebagai unsur pelaksana birokrasi) adalah bahwa tindakan atau keputusan tadi haruslah selalu bermuara kepada upaya mencapai kesejahteraan publik.

Pentingnya peranan atau fungsi negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan umum terutama dalam sistem ekonomi menurut **Didik Rachbini** (1994 : 83) didasarkan paling tidak pada dua alasan. *Pertama*, timbulnya kegagalan pasar (*market failure*) dalam sistem ekonomi, membuka kemungkinan masuknya peranan negara untuk mendorong terwujudnya mekanisme pasar yang efektif sehingga kesejahteraan para pelaku ekonomi bisa tercapai secara lebih baik. *Kedua*, kenyataan terdapatnya kegagalan distribusi pendapatan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat, sehingga peranan pemerintah lebih tertuju untuk melakukan kebijakan redistribusi atau pengalokasian kembali sumber-sumber ekonomi. Inilah dasar teoritis dari mazhab *Welfare*

Economics yang menjadi basis pembenaran terhadap intervensi pemerintah dalam kehidupan masyarakat.

Meskipun demikian, dalam praktek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dapat diamati bahwa pemerintah menghadapi berbagai kendala maupun hambatan yang menyebabkan pelaksanaan fungsi pelayanan dan kesejahteraan menjadi tersendat. Dengan kata lain, banyaknya tingkat keluhan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik serta masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat, menunjukkan bahwa proses pencapaian tujuan nasional masih akan memakan waktu yang amat panjang, jika tidak dikatakan sebagai suatu kegagalan negara (*state failure*).

Oleh karena itu, wajarlah jika kemudian berkembang pemikiran yang menghendaki – atau bahkan menuntut – adanya perubahan orientasi pemerintahan yang lebih menekankan kepada fungsi-fungsi katalisasi, antisipasi dan desentralisasi. Artinya, masyarakat (atau swasta) perlu diberikan kebebasan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam bidang-bidang usaha, namun tetap dalam kerangka aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Disamping itu, pergeseran peran pemerintah juga merupakan suatu proses yang logis dan beralasan. Dikatakan logis dan beralasan, sebab pada tahap-tahap awal pembangunan, prioritas pembangunan masih ditekankan pada penyediaan sarana/prasarana dasar guna mendorong pertumbuhan ekonomi, mobilisasi dana, dan penjagaan

keseimbangan pertumbuhan antar daerah. Dengan adanya prioritas seperti ini, wajarlah jika peran pemerintah menjadi menonjol. Namun manakala potensi swasta telah berkembang dengan pesat, sudah saatnya pemerintah menarik mundur segenap kekuatannya, serta lebih banyak berdiri di belakang sebagai pengendali dan pengatur irama kehidupan diberbagai sektor (*tut wuri handayani*).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, suatu tugas dan atau urusan yang penyelenggaraannya masih bersifat sentralistis, jelas tidak sesuai lagi dengan tuntutan jaman. Oleh sebab itu, desentralisasi, deregulasi dan debirokratisasi merupakan salah satu pilihan strategis bagi para penentu kebijakan dan pengambil keputusan dalam upaya membangkitkan potensi, kemampuan dan kapasitas masyarakat (swasta) serta unit organisasi (birokrasi) yang lebih kecil.

Dengan adanya upaya otonomi atau desentralisasi dalam manajemen pembangunan dan pemerintahan, menurut **Emil J. Sady** (dalam **Bintoro Tjokroamidjojo**, 1990 : 82) akan memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut :

1. Mengurangi beban pemerintah pusat, dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil pada tingkat lokal dan memberikan peluang untuk koordinasi pelaksanaan tingkat lokal ;
2. Meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam kegiatan usaha pembangunan sosial

- ekonomi, dan pada tingkat lokal dapat merasakan keuntungan dari pada kontribusi kegiatan mereka ;
3. Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal sehingga dapat lebih realistis ;
 4. Melatih rakyat untuk dapat mengatur urusannya sendiri ; serta
 5. Pembinaan kesatuan nasional.

Dalam perspektif yang agak berbeda, analisis **Sofian Effendi** (1996 : 16 – 17) memberikan gambaran mengenai pentingnya “reformasi” sektor publik ini. Menurut Effendi, intervensi pemerintah yang terlalu besar dalam kegiatan ekonomi terbukti mengandung penuh keterbatasan serta telah menyebabkan inefisiensi yang sangat besar. Untuk itu sektor publik, terutama birokrasi publik, harus mengalami pergeseran nilai dari otoritarianisme birokratik ke otonomi birokratis, atau perubahan dari negara pejabat menjadi negara pelayan.

Dengan kata lain, pendapat yang beranggapan bahwa birokrasi merupakan organisasi mapan yang tidak pernah bangkrut, ternyata tidak memiliki relevansi lagi. Bahkan sesungguhnya, Peter Drucker sejak tahun 1968 lewat bukunya yang berjudul *The Age of Discontinuity* telah meramalkan secara jitu mengenai kebangkrutan pemerintahan birokratis.

Kondisi seperti ini mensyaratkan perlunya dilakukan penataan ulang, *restrukturisasi*, *reformasi*, *revitalisasi*, atau

reengineering pemerintahan. Istilah ini dipergunakan bersamaan, sebab diantara keempat istilah ini menunjuk pada sesuatu yang sama, yaitu suatu proses perubahan yang menurut Caiden (dalam Soesilo Zauhar, 1996 : 8) bertujuan :

"..... improve the administration performance of individual, groups, and institutions and to advise them how they can achieve their operating goals more effectively, more economically, and more quickly".

(..... meningkatkan kinerja administrasi pada tingkat individu, kelompok maupun lembaga, serta menunjukkan cara meraih tujuan operasional secara lebih efektif, ekonomis, dan lebih cepat).

Dalam rangka mengantisipasi tuntutan transformasi sektor publik yang didorong oleh proses globalisasi inilah, aktualisasi peranan aparat pemerintah Daerah Tingkat II semakin relevan. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, peran apakah yang dapat dijalankan oleh pemerintah daerah (Tingkat II), dan bagaimanakah peran tersebut dapat dijalankan ?

Untuk memahami peranan pemerintah daerah ini, kiranya perlu diajukan **John Stewart** (1988 : 79 – 82) yang mengajukan konsepsi tentang delapan peran pemerintah lokal, yakni sebagai berikut :

1. *Building the relationship between the political process and the management process.*

Hal ini berarti bahwa seorang pimpinan daerah harus menjadi mediator yang adil dalam menerjemahkan kebijakan politis pemerintah Pusat kedalam kebijakan operasional bagi kepentingan masyarakat di daerahnya.

2. *Understanding the organization, realising its strengths and overcoming its weaknesses.*

Jajaran aparatur pemerintah di Daerah tidak cukup hanya mampu mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan, namun harus mampu mengatasi kelemahan yang ada sekaligus memelihara faktor kekuatan yang dimiliki. Mereka perlu memastikan bahwa kinerja dan efektivitas organisasi tetap terjaga baik, sehingga akuntabilitas maupun responsibilitas organisasi berada pada tingkatan yang cukup tinggi..

3. *Appreciating policy not in service, but in authority terms.*

Ini mengandung makna bahwa para penyelenggara pemerintahan daerah hendaknya memiliki wawasan yang tidak sebatas organisasi pemerintah daerah itu sendiri, tetapi harus bersifat lintas sektoral maupun multi disipliner. Akan tetapi, meskipun dituntut untuk memahami berbagai dimensi permasalahan, namun para penyelenggara pemerintahan daerah ini tetap harus memiliki peran yang tinggi dalam spesialisasi tertentu.

4. *The responsibility for resolving the problems that cannot be resolved departmentally.*

Masalah kegagalan organisasi, konflik antar lembaga, dan seluruh permasalahan yang ditemui di suatu daerah, pada hakekatnya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

5. *Understanding the role of authority in its community and helping it to fulfil that role.*

Para pejabat pemerintah daerah memiliki peran pelayanan yang diidentifikasikan berdasarkan area atau wilayah, bukan berdasarkan substansi dari pelayanan tersebut. Dengan peran ini, aparat pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber-sumber daya publik maupun privat, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat seluruhnya.

6. *Having a sense of direction.*

Artinya, aparatur pemerintah di Daerah Tingkat II harus memiliki kemampuan memberikan perintah secara cermat, khususnya dalam rangka mengatasi suatu krisis akibat tekanan dan perubahan politik, maupun konflik-konflik yang terjadi dilingkungan organisasinya.

7. *Helping the organization change in a changing society.*

Aparatur pemerintah Daerah Tingkat II perlu menjamin keberlangsungan organisasi beserta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menjamin keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat, melalui penciptaan stabilitas lingkungan (internal dan eksternal)

organisasi. Dengan kata lain, aparatur harus mampu memberikan garansi bahwa dalam perubahan lingkungan seperti apapun, tujuan organisasi tetap dapat direalisasikan secara tepat waktu dan tepat kualitas.

8. *The head of the council paid service.*

Aparatur pemerintah Daerah Tingkat II memikul tanggungjawab secara keseluruhan atas penyelenggaraan tugas-tugas yang dilaksanakannya maupun atas kewenangan yang diberikan kepada unit-unit kerjanya yang lebih kecil. Aparatur juga dituntut tanggungjawab untuk membangun sebuah tim kerja yang mampu bekerjasama secara baik guna meningkatkan peranan tim tersebut.

Apa yang dikemukakan oleh **Stewart** ini memang belum memuaskan dan belum mampu menggambarkan peran pemerintah (daerah) secara konkrit dan menyeluruh. Namun pemikiran mengenai delapan peranan pemerintah tadi dapat dikatakan sebagai suatu kemajuan jika diingat bahwa semenjak terbitnya buku *Il Principe* dari **Niccolo Machiavelli**, belum ada lagi pakar ilmu politik yang mengkaji tentang tugas dan fungsi pemerintah.

Hal ini ditekankan oleh **Peter Drucker** (1997 : 282) yang mengatakan sebagai berikut:

“..... kita memerlukan sesuatu yang tidak kita miliki : sebuah teori mengenai apa yang bisa dilakukan oleh

pemerintah. Tak ada pemikir politik yang besar, setidaknya setelah Machiavelli hampir 500 tahun yang silam, yang telah menjawab pertanyaan ini. semua teori politik sejak Locke dalam *The Federalist Paper* sampai dengan artikel-artikel tak satupun yang mempertanyakan apa fungsi yang tepat dari pemerintah. Tak satupun yang mempertanyakan hasil-hasil dari kegiatan pemerintah yang seharusnya diperhitungkan”.

Sementara itu dalam konteks pembangunan secara umum, **John Weiss** (1995 : 8) mengemukakan peranan dan tanggungjawab pemerintah dalam pembangunan – khususnya bidang ekonomi – terdiri dari empat wilayah, yaitu :

“macroeconomic management, regulatory and promotional framework, investment in human capital and infrastructure, and protection of the poor and vulnerable”.

(mengelola dan menyelenggarakan kebijakan makroekonomi yang mantap, menyelenggarakan pengaturan dan promosi terhadap kebijakan dalam suatu kegiatan tertentu, mengembangkan kemampuan sumber daya manusia sebagai faktor modal, serta melindungi dan mengentaskan masyarakat miskin atau terbelakang).

Masing-masing dari keempat peranan pemerintah dalam pembangunan (berfokus pada bidang ekonomi) ini akan

dipaparkan lebih lanjut dalam sub bab lain pada bab ini yang membahas mengenai “Kebijakan Makro Ekonomi Negara Berkembang (termasuk Indonesia) dan Tingkat Kinerjanya”.

Berbagai peran, campur tangan atau intervensi pemerintah dalam proses pembangunan tersebut, menurut **Irving Swerdlow** sebagaimana dikutip **Bintoro Tjokroamidjojo** (1990 : 19) dapat dilakukan dengan beberapa strategi, antara lain operasi langsung (*direct operation*), pengendalian langsung (*direct control*), pengendalian tidak langsung (*indirect control*), pemengaruhan langsung (*direct influence*), serta pemengaruhan tidak langsung (*indirect influence*).

Lebih jauh dalam TAP MPRS No. XXIII tahun 1966 tentang “Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan” yang merupakan rumusan pertama mengenai peranan pemerintah dalam demokrasi ekonomi dan pembangunan, disebutkan :

“Dalam menjalankan peranannya di bidang ekonomi, maka Pemerintah harus lebih menekankan pengawasan kearah kegiatan ekonomi dan bukan pada penguasaan yang sebanyak mungkin dari kegiatan-kegiatan ekonomi”.

Ketentuan ini sangat bersesuaian dengan paradigma *Reinventing Government* yang diajukan **David Osborne** dan **Ted Gaebler** (1992) mengenai pemerintahan katalis, yakni pemerintah yang lebih banyak melakukan fungsi pengaturan

dan pengendalian daripada sebagai pelaksana langsung suatu kegiatan (*steering rather than rowing*). Dengan kata lain, pemerintah sudah harus mulai berpikir mengenai pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan privatisasi maupun kemitraan.

D. Masalah-Masalah Pembangunan

Dalam kenyataannya, prestasi pembangunan yang diraih oleh suatu negara – termasuk Indonesia – tidak terlepas dari berbagai masalah atau penyakit yang muncul sebagai akibat pelaksanaan pembangunan itu sendiri (*development pain*), serta masalah-masalah atau penyakit yang belum dapat diselesaikan oleh proses pembangunan.

Beberapa masalah yang muncul sebagai akibat pelaksanaan pembangunan dapat dicontohkan misalnya kerusakan lingkungan, distorsi pembangunan antar regional maupun antar sektoral, dekadensi nilai tradisional, hutang luar negeri, depresiasi mata uang, monopoli dan oligopoli berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kesenjangan dan kecemburuan sosial ekonomi, dan sebagainya.

Dalam konteks ini terdapat asumsi bahwa munculnya masalah-masalah tersebut dampak langsung dari penetapan strategi pembangunan yang salah. Artinya, secara filosofis, ekonomis maupun secara praktis, pembangunan adalah

konsepsi pertumbuhan atau pengembangan yang tidak mengandung unsur-unsur destruktif atau bersifat negatif. Oleh karena itu, masalah yang muncul sebagai akibat pelaksanaan pembangunan ini dapat disebut pula sebagai *ekses pembangunan*.

Sementara masalah yang belum dapat diselesaikan oleh proses pembangunan antara lain adalah kemiskinan dan keterbelakangan, kebodohan dan kelemahan daya saing, kesenjangan dan kecemburuan sosial ekonomi, hutang luar negeri, monopoli dan oligopoli, dan sebagainya.

Keseluruhan permasalahan diatas menunjukkan bahwa kebijakan dan proses pembangunan disamping harus mampu mengatasi masalah yang ada dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus juga harus mampu mengatasi eksek yang timbul dari proses pembangunan tadi.

Adapun secara lebih detail, beberapa permasalahan pembangunan yang sering dihadapi oleh negara berkembang (khususnya Indonesia) adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan dan Kesenjangan / Ketimpangan

Kemiskinan pada hakekatnya merupakan masalah yang bersifat multidimensional. Artinya, jika kita hendak menganalisis faktor kausalitas dari masalah kemiskinan, jelas tidak mungkin ditemukan dimensi tunggal yang paling dominan sebagai faktor penyebabnya. **Yuyun Wirasasmita** (1997 : tanpa halaman) berpendapat bahwa paling sedikit

terdapat delapan variabel yang bersinggungan dengan masalah kemiskinan, yakni pendapatan perkapita, tabungan, investasi, pendidikan, kesehatan, fertilitas, pertambahan penduduk dan pengangguran. Atau dengan kata lain, terdapat banyak variabel yang secara langsung maupun tidak langsung memberi kontribusi bagi terciptanya masalah kemiskinan. Secara riil, meskipun kebijakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan telah dan sedang dilaksanakan secara simultan dan lintas sektoral atau inter departemental, namun masalah klasik ini masih tetap menjadi problema besar dalam proses pembangunan nasional.

Dilihat dari jenis-jenis atau bentuk-bentuknya, kemiskinan dapat digolongkan sebagai berikut. Berdasarkan *tingkat pendapatannya*, menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. *Kemiskinan absolut* adalah keadaan serba kurang yang diukur berdasarkan indikator pengeluaran minimum, sedangkan *kemiskinan relatif* keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, atau dikenal pula dengan istilah ketimpangan distribusi pendapatan.

Sementara itu berdasarkan *pola waktunya*, kemiskinan dapat dipisahkan menjadi *persistent poverty* yakni kemiskinan yang telah kronis atau turun menurun ; *cyclical poverty* yakni kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan ; *seasonal poverty* yakni kemiskinan musiman yang sering dijumpai pada kasus nelayan atau petani tanaman pangan ; serta *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena

terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan turunnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu kemiskinan juga dapat dibedakan atas dasar *keadaan penduduk dan potensi wilayahnya* menjadi kemiskinan yang *dialami penduduk dan ketertinggalan wilayah* (Kartasasmita, 1996 : 234-235).

Untuk menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang termasuk yang berstatus miskin atau tidak, ditetapkan beberapa tolok ukur kemiskinan. Tolok ukur yang paling umum digunakan adalah yang berdasarkan *tingkat pendapatan per waktu kerja* (Amerika menggunakan setahun sebagai waktu kerja, sedangkan Indonesia sebulan). Pada tahun 1976/1977, pemerintah Indonesia telah menetapkan tingkat pendapatan per waktu kerja sebagai tolok ukur kemiskinan adalah Rp. 30.000 per bulan (Sajogyo, 1977).

Disamping itu, dipakai pula tolok ukur *pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari* atau *kebutuhan relatif per keluarga* yang batasannya dibuat berdasarkan atas dasar kebutuhan minimal yang harus dipenuhi sebuah keluarga agar dapat melangsungkan kehidupannya secara memadai. Termasuk dalam tolok ukur ini adalah biaya pemeliharaan kesehatan, biaya sekolah untuk anak, dan biaya sandang yang sewajarnya. Pada tahun 1993, angka pengeluaran minimum sebagai garis kemiskinan absolut ditetapkan rata-rata sebesar Rp. 27.905 per kapita per bulan untuk daerah perkotaan, dan Rp. 18.244 untuk daerah pedesaan.

Selanjutnya tolok ukur kemiskinan adalah *jumlah kalori minimal* yang dikonsumsi per orang, yang diambil persamaannya dalam beras, yaitu 320 kilogram (untuk desa) dan 420 kilogram (untuk kota). Dan tolok ukur terakhir sebagaimana di populerkan oleh **Lewis**, adalah *kekurangan dalam ukuran kebudayaan dan kejiwaan*, yakni yang sering kita sebut sebagai kebudayaan kemiskinan (**Suparlan**, 1995 : xx – xix).

Sementara itu **Kartasasmita** (1996 : 239-241) membedakan antara *kemiskinan struktural* dengan *kemiskinan kultural*. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan sebagai akibat pembangunan yang belum seimbang dan hasilnya belum terbagi merata. Artinya, kemiskinan merupakan konsekuensi logis dari keadaan pemilikan sumber daya yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang tidak seimbang, dan ketidaksamaan kesempatan dalam berusaha dan memperoleh pendapatan. Kondisi ini pada gilirannya mengakibatkan perolehan pendapatan tidak seimbang, dan akhirnya menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Adapun kemiskinan kultural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya.

Melihat faktor-faktor penyebab kemiskinan seperti tersebut diatas, **Kartasasmita** (1996 : 241-243) mengajukan pemikiran tentang tiga arah kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan, sebagai berikut :

“*Pertama*, kebijaksanaan *tidak langsung* yang diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan ; *kedua*, kebijaksanaan *langsung* yang ditujukan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah ; dan *ketiga*, kebijaksanaan *khusus* yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran program, dan sekaligus memacu dan memperluas upaya untuk menanggulangi kemiskinan”.

“Berbagai kebijaksanaan tersebut dituangkan kedalam berbagai program pembangunan *sektoral*, *regional* dan *khusus*, baik secara *langsung* maupun *tidak langsung*, dirancang untuk turut memecahkan tiga masalah utama pembangunan, yakni pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, dan kemiskinan”.

Mengenai jumlah penduduk miskin (dalam persentase dari seluruh jumlah penduduk), pada tabel dibawah ini dikemukakan beberapa versi sejak tahun 1965 sampai dengan 1987.

Tabel 2.1
Persentase Kemiskinan Menurut BPS, Sajogyo dan Esmara

TAHUN	PERKOTAAN			PERDESAAN		
	BPS	Sajogyo	Esmara	BPS	Sajogyo	Esmara
1964/65	n.a.	65,1	44,0	n.a.	49,3	51,6
1970	n.a.	45,4	38,1	n.a.	31,3	49,1
1976	38,8	31,2	39,9	40,4	28,1	46,4
1978	30,8	27,2	41,6	33,9	29,7	46,6
1980	29,0	24,4	37,3	28,4	17,1	43,2
1981	28,1	13,2	32,3	26,5	8,00	40,0
1984	23,1	31,3	31,3	21,2	7,4	39,3
1987	20,1	30,4	30,4	16,4	3,2	36,0

Sumber : **Mudrajad Kuncoro** (1997 : 117).

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Apalagi dengan adanya krisis moneter yang didorong oleh fluktuasi perdagangan dan investasi antar bangsa seperti saat ini, masalah kemiskinan di Indonesia menjadi semakin berat dan parah. Hal ini diakui juga oleh **Presiden Soeharto** (*Kompas*, 1 April 1998 : 1) yang mengatakan bahwa sebagai akibat krisis moneter dan krisis ekonomi, pendapatan rata-rata per kapita rakyat telah menurun, yang berarti makin banyak jumlah penduduk miskin di Indonesia dalam sembilan bulan ini.

Schubungan dengan hal tersebut, perumusan dan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan perlu lebih diperhatikan dan difokuskan kepada pengurangan jumlah kemiskinan (absolut). Dalam hal ini, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1983 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Filosofi dasar dari penetapan kebijakan (publik) ini meliputi tiga dimensi yakni : 1) bahwa pembangunan bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ; 2) merupakan pemihakan yang nyata kepada penduduk paling miskin di desa tertinggal, serta 3) untuk memecahkan perangkap ketertinggalan dan meningkatkan peran serta dan produktivitas rakyat dalam kegiatan sosial ekonomi.

Sebagai upaya pengembangan sosial ekonomi rakyat, program IDT dilaksanakan sendiri oleh masyarakat atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dengan tujuan utama adalah : 1) agar bantuan yang diberikan berjalan efektif sesuai kehendak dan kebutuhan masyarakat ; 2) meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Dengan kata lain, kunci keberhasilan program IDT untuk menaikkan taraf hidup penduduk miskin di pedesaan adalah diberikannya *kepercayaan* kepada mereka untuk mengelola sumber daya pembangunan. Dengan adanya kepercayaan ini, akan mengembangkan *rasa percaya diri* penduduk miskin bahwa mereka mampu melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi (Kartasasmita, 1996 : 249, 258).

2. Urbanisasi dan Pengangguran

Salah satu ciri yang menonjol dalam negara berkembang adalah tingginya angka urbanisasi. Hal ini tidak terlepas dari pertumbuhan wilayah perkotaan dalam suatu negara yang tidak seimbang, yang akhirnya mengakibatkan terjadinya distorsi regional. Dalam hal ini, pengertian urbanisasi menurut **Schoorl** (1988 : 263) adalah arus perpindahan dari desa ke kota, disertai dengan bertambah besarnya jumlah tenaga kerja non agraria di sektor industri dan sektor tersier, menyebabkan tumbuhnya permukiman menjadi kota serta meluasnya pengaruh kota tersebut ke daerah pedesaan mengenai segi ekonomi, sosial, kebudayaan dan psikologi.

Tingginya angka urbanisasi di negara berkembang tadi, paling tidak disebabkan oleh tiga faktor pokok sebagai berikut:

1. Migrasi (perpindahan dari desa ke kota)

Arus perpindahan penduduk dari pedesaan ke kota sendiri banyak disebabkan oleh faktor pendorong dan penarik (*push and pull factors*). Faktor pendorong misalnya adanya kemiskinan yang melanda desa-desa, sedangkan faktor penarik antara lain berupa daya tarik ekonomi perkotaan, usaha mengangkat posisi atau status sosial, fasilitas-fasilitas pelayanan umum, dan sebagainya.

Mengenai migrasi ini, terdapat tiga pola umum di negara dunia ketiga, yaitu :

- a. Migrasi temporer kaum laki-laki yang terpisah dari keluarga mereka.
- b. Migrasi keluarga ke wilayah perkotaan yang diikuti oleh migrasi balik ke kampung halaman, dan
- c. Pembangunan rumah tangga keluarga urban yang permanen (**Alan Gilbert dan Josef Gugler**, 1996 : 73).

2. Pertambahan penduduk secara alami.

Sebagaimana lazimnya negara berkembang, laju pertumbuhan penduduk (LPP) sangat tinggi. Dengan demikian, sebagian pakar justru menilai bahwa urbanisasi bukan disebabkan oleh migrasi, namun lebih banyak oleh pertambahan penduduk secara alami ini.

3. Perkembangan kota yang kuat secara horisontal

Faktor ini sering disebut sebagai urbanisasi pasif, dimana desa-desa di pinggiran kota lambat laun tertarik kedalam kehidupan kota, yang disebabkan oleh perkembangan kota tersebut secara horisontal.

Dengan memperhatikan faktor-faktor penyebabnya, maka dilihat dari perspektif historis, terjadinya urbanisasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara desa dengan kota. Hubungan ini bermula dari terbukanya isolasi pedesaan yang pada umumnya hidup dengan sistem ekonomi

subsisten. Masyarakat yang berpusat pada diri sendiri dengan kontak luar yang sangat terbatas, akhirnya hilang, dan terjadilah integrasi dengan sistem baru kehidupan perkotaan.

Penggabungan desa kedalam sistem dunia pada gilirannya menimbulkan dilema baru. Disatu sisi, interaksi desa – kota tersebut diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan daerah sub urban. Namun disisi lain, wilayah pedesaan dieksploitasi sampai titik tertentu, sehingga kehidupan penduduknya merosot. Ditempat lain, kelompok-kelompok tertentu mengalami kemiskinan, tetapi sebagian besar kondisi kehidupan penduduk pedesaan membaik. Meskipun demikian, peningkatan ini mempercepat pertumbuhan penduduk dan peningkatan jumlah penduduk ini sendiri menimbulkan persoalan-persoalan baru yang tidak kalah rumitnya, salah satunya adalah merebaknya pengangguran.

Timbulnya pengangguran sendiri tidak lepas dari adanya perkembangan teknologi produksi seperti yang telah disinggung pada bagian lain bab ini. Hal ini diakui pula oleh (**Alan Gilbert dan Josef Gugler**, 1996 : 82) yang mengatakan bahwa ada beberapa keuntungan memiliki akses terhadap teknologi tinggi, tetapi teknologi tinggi tidak tepat untuk negara-negara miskin. Teknologi maju lebih cocok dengan negara-negara industri maju. Pada bagian lain, mereka mengatakan sebagai berikut:

“Mengalihkan teknologi padat modal ke negara-negara miskin berarti pengurangan besar-besaran terhadap modal dan sumber daya yang langka dan sedikit sekali peluang kerja akibat perkembangan tadi. Ironisnya, sebagian besar negara Dunia Ketiga mendukung proses industrialisasi tersebut Pemerintah Dunis Ketiga dan para investor swasta sama-sama berkeinginan keras terhadap teknologi yang sangat menguntungkan karena akan menciptakan tenaga kerja yang murah dan berlimpah, meskipun resikonya banyak sekali”.

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik suatu pemikiran bahwa penggunaan teknologi dalam kehidupan ekonomi bangsa merupakan pilihan kebijakan (*policy alternative*), apakah akan dikembangkan atau sebaliknya justru dibatasi. Pengembangan dan penerapan teknologi canggih (otomatisasi, mekanisasi, robotisasi) disatu pihak menimbulkan konsekuensi kebutuhan tenaga kerja secara minimum, akan tetapi dilain pihak merupakan tuntutan yang tidak mungkin ditolak dalam rangka meningkatkan produktivitas bangsa – baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Dengan kata lain, dalam rangka percepatan dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah dihadapkan kepada dilema, apakah akan menggunakan mekanisme padat modal dan padat teknologi atautkah mekanisme padat karya.

Pengalaman empirik menunjukkan bahwa masalah ketenagakerjaan ini cukup sensitif, dalam arti suatu ketika

akan meledak menjadi problem nasional, tidak hanya karena adanya penemuan teknologi baru, tetapi juga oleh ketidakstabilan ekonomi. Dan pengalaman juga menunjukkan bahwa mekanisme padat karya tidak bisa berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, sistem produksi hendaknya tidak tergantung semata-mata pada faktor tenaga kerja, tetapi lebih berat kepada penggunaan teknologi tinggi yang tepat guna.

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa permasalahan pembangunan suatu bangsa, khususnya yang menyangkut masalah urbanisasi, pengangguran dan kemiskinan, sesungguhnya merupakan lingkaran setan (*vicious circle*) yang tidak berujung pangkal, dan oleh karenanya kebijakan penanganannya juga harus dirumuskan dan diimplementasikan secara terpadu dan komprehensif.

3. Hutang Luar Negeri

Sejak awal dasawarsa 1980-an, salah satu masalah ekonomi global yang mengkhawatirkan semua negara di dunia adalah hutang luar negeri yang meningkat cepat, dan melibatkan bukan hanya kelompok negara berkembang, melainkan juga negara yang perekonomian dan tingkat pendapatan per kapita-nya terbesar di dunia.

Krisis hutang yang melanda kelompok negara berkembang pada periode 1980-an, oleh Dana Moneter

Internasional (IMF) diperkirakan akan terus berlangsung pada periode tahun 1990-an. Krisis tersebut tampaknya akan disertai pula oleh berbagai permasalahan ekonomi di negara-negara berkembang. Permasalahan yang nampak akibat dari krisis tersebut diantaranya menurut **Faisal Basri** (1997 : 278) adalah :

1. Harga-harga komoditas pertanian dan pertambangan terus mengalami fluktuasi, yang disertai pula oleh adanya kecenderungan yang terus melemah dalam periode jangka panjang.
2. Inflasi terus meningkat akibat tetap ditempuhnya kebijakan deficit financing dari berbagai jenis untuk melanjutkan upaya pembangunan ekonomi.
3. Di Indonesia, inflasi juga terus meningkat sebagai akibat dari debt-servicing yang dibiayai melalui APBN di sisi Belanja Rutin, yang untuk banyak negara menuntut pembelian devisa dengan menggunakan matauang lokal dari negara yang bersangkutan.
4. Suku bunga internasional juga terus meningkat sehingga mencapai nilai riil yang tertinggi sepanjang sejarah.
5. Peningkatan debt-servicing menyebabkan berkurangnya jumlah dana yang bisa dikerahkan untuk investasi, sehingga laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) semakin menurun, selanjutnya memperlemah kemampuan *debt-servicing* pada tahun-tahun berikutnya.

Dari uraian analitis singkat di atas terlihat bagaimana bentuk krisis hutang yang melanda negara berkembang dewasa ini yang berdampak negatif pada kesinambungan perkembangan ekonomi global. Krisis tersebut tidak saja merupakan persoalan kelompok negara-negara berkembang, melainkan juga telah meluas menjadi permasalahan negara industri Barat dan Jepang serta berbagai badan dan bank-bank internasional.

Hutang luar negeri ditinjau dari sisi pandang makroekonomi, pada dasarnya merupakan suatu usaha kompensasi untuk menutupi kesenjangan antara tabungan domestik dan kebutuhan investasi serta untuk mengimbangi defisi transaksi berjalan pada neraca pembayaran. Fungsi hutang sebagai penutup kekurangan dana investasi bersumber dari kenyataan bahwa tingkat tabungan di NSB pada umumnya masih rendah, sementara di lain pihak tuntutan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dirasakan sangat mendesak agar terlepas dari belenggu keterbelakangan. Namun, dalam kenyataannya, hutang luar negeri tidak selalu termanfaatkan secara efektif dan efisien. Kesalahan bisa bersumber dari pihak pengguna dalam mengalokasikannya, baik disadari atau tidak, tetapi bisa juga karena motif di balik pemberian hutang yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis.

Menghadapi kondisi tersebut di atas, berikut adalah cara pandang terhadap permasalahan hutang **Faisal Basri** (1997 : 287-290):

1. Cara Pandang Linear

Pemikiran yang paling populer pada periode ini adalah doktrin Tahap-tahap Pembangunan dari Rostow dan model pertumbuhan Harrod Domar. Keduanya dikenal sebagai tokoh dalam model-model pembangunan linear karena menggeneralisasikan konsep pembangunan ekonomi bagi semua negara. Bantuan / pinjaman luar negeri merupakan suatu instrumen yang dianggap penting, bahkan mungkin terpenting untuk menggerakkan pembangunan mengingat keterbatasan tabungan dalam negerilah yang paling dirasakan sebagai kendala pemupukan modal untuk memacu pertumbuhan di NSB.

2. Cara Pandang Kaum Dependensia

Model-model dependensia menganggap keterbelakangan negara-negara berkembang disebabkan oleh tekanan pola hubungan ketergantungannya terhadap negara-negara maju yang menjelma dalam bentuk neo-kolonialisme. Keadaan ini menciptakan ketimpangan struktural antar-bangsa, dimana negara-negara terbelakang berada pada posisi bata luar periphery yang dipaksakan untuk tunduk pada kehendak negara maju yang merupakan metropolis, sebagai pusat pertumbuhan.

3. Cara Pandang Pihak Kreditor

Kreditor dapat dibedakan menjadi tiga jenis yang utama, yakni : Kreditor resmi, Kreditor swasta, dan Kreditor

lembaga multilateral. Suatu negara biasanya memberikan pinjaman kepada negara lain tidak semata-mata berdasarkan pada pertimbangan ekonomi. Bahkan, motivasi pemberian pinjaman/ bantuan kerap kali bukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi langsung, melainkan bersifat geopolitik.

4. Cara Pandang lembaga-lembaga Donor Multilateral

Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan hutang negara berkembang tidak terlepas dari kepentingan negara Barat. Dewasa ini Bank Dunia dan IMF memegang peranan penting dalam penyelesaian hutang negara-negara berkembang. Sejumlah negara (kebanyakan Amerika Latin) yang telah melakukan penjadwalan kembali hutang-hutangnya harus bersedia mengikuti petunjuk-petunjuk kedua lembaga tersebut. Lebih jauh lagi, prasyarat untuk memperoleh fasilitas keringanan beban hutang dan pinjaman baru dalam rangka *structural adjustment loan* dari Bank Dunia sedemikian beratnya sehingga menimbulkan gejolak ekonomi dan politik di dalam negeri. Meskipun IMF dan Bank Dunia menyadari bahwa krisis hutang dewasa ini dipengaruhi pula oleh gejolak perekonomian dunia, acuan mereka lebih berat ke sisi internal perekonomian negara penghutang. Ketidakberesan manajemen perekonomian, distorsi pasar akibat subsidi yang memberatkan anggaran dan hambatan import kerap kali dituduh sebagai biang penyebabnya.

Khususnya yang menyangkut hutang luar negeri Indonesia yang terdiri dari hutang sektor pemerintah dan sektor swasta yang telah dicairkan hingga akhir tahun 1993 mencapai nilai US \$ 92,8 milyar. Sedangkan hutang LN Indonesia yang outstanding (yang telah dicairkan ditambah dengan yang belum dicairkan) mencapai nilai US \$ 112,2 milyar.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan berakumulasinya hutang luar negeri Indonesia yang merupakan salah satu negara penghutang besar dengan penduduk yang mempunyai pendapatan paling rendah di dunia adalah sebagai berikut (**Sritua Arief**, 1998 : 126-130) :

Pertama, defisit perkiraan berjalan dalam neraca pembayaran. Pada umumnya negara-negara berkembang - termasuk Indonesia - mengalami defisit, karena kurang memperhitungkan pembayaran bunga hutang luar negeri, posisi perkiraan berjalan tetap negatif, sehingga sebagian pembayaran bunga hutang luar negeri dan keseluruhan cicilan pokok hutang luar negeri terpaksa ditutupi dengan hutang baru dan penggunaan cadangan devisa nasional melalui perkiraan modal.

Kedua, posisi netto yang negatif terjadi sebagai akibat lebih besarnya nilai pembayaran kewajiban hutang luar negeri (bunga ditambah cicilan pokok) dibandingkan dengan nilai hutang baru. Di Indonesia, data net transfer sektor pemerintah

telah menunjukkan nilai sebesar US \$ 7,8 milyar untuk periode 1985-1993 (World Bank).

Ketiga, faktor yang menyebabkan meningkatnya akumulasi hutang luar negeri negara-negara berkembang adalah *pelarian modal*. Pelarian modal harus dibiayai oleh hutang luar negeri sehingga menimbulkan posisi yang timpang pada perkiraan modal dalam neraca pembayaran, sedangkan neraca pembayaran harus diseimbangkan.

Menurut *Morgan Guaranty Trust Company* (1986) yang telah melakukan studi terhadap 18 negara berkembang (termasuk Indonesia), selama periode 1975-1986 telah terjadi pelarian modal dari negara-negara berkembang sebesar US \$ 198 milyar yang disertai oleh peningkatan hutang luar negeri negara-negara tersebut sebesar US \$ 451 milyar. Dari kondisi ini terlihat bahwa selama periode tersebut sebesar 44 % dari pertambahan hutang luar negeri negara-negara berkembang telah digunakan untuk membiayai pelarian modal.

Hal lainnya adalah pelarian modal oleh pihak swasta telah menimbulkan dampak negatif terhadap distribusi kekayaan dan pendapatan. Hal ini menimbulkan konsekuensi yang buruk, karena mengakibatkan rakyat menjadi penanggung beban hutang luar negeri, sementara pihak-pihak yang melarikan modal dan mempertahankan asset di luar negeri terbebas dari beban tersebut. Pada akhirnya, maka terjadilah proses sosialisasi beban hutang luar negeri secara tidak wajar, dan rakyat menjadi pemikul beban utama. Proses

sosialisasi beban hutang luar negeri tersebut disertai dengan proses privatisasi pemupukan asset di luar negeri.

Keempat, perubahan kurs mata uang. Membengkaknya akumulasi hutang Indonesia sejak tahun 1980 banyak diakibatkan oleh perubahan kurs mata uang Yen terhadap dollar Amerika Serikat. Menurunnya nilai dollar Amerika Serikat terhadap yen telah memperbesar nilai hutang luar negeri Indonesia yang berbentuk Yen, dan diukur dalam nilai dollar Amerika Serikat. Menurut laporan Bank Dunia (1994), selama periode 1980-1993, nilai hutang luar negeri Indonesia telah meningkat sebesar US \$ 18,8 milyar sebagai akibat menurunnya nilai dollar Amerika Serikat terhadap Yen.

E. Kebijakan Makro Ekonomi Negara Berkembang (c.q. Indonesia) dan Tingkat Kinerjanya

Sudah menjadi “pola umum” bahwa pembangunan yang dijalankan di negara-negara Dunia Ketiga atau negara berkembang (*developing countries*), sebagian besar menerapkan model-model atau paradigma pertumbuhan. Paradigma ini secara nyata telah berhasil mempercepat laju pertumbuhan ekonomi (LPE) di negara yang bersangkutan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya.

Hal inipun dapat dilihat pada kasus Indonesia, dimana pelaksanaan pembangunan menganut paradigma yang

berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi sosial ekonomi saat itu. Atau dapat dikatakan juga, titik berat pembangunan ekonomi Indonesia yang bertumpu pada trilogi pembangunan, urutan loginya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan pembangunan pada tiap-tiap tahap.

Logi *stabilitas* menjadi prioritas pada masa awal pembangunan karena latar belakang suasana ketidakstabilan politik selama Orde Lama dan sebelumnya ; sementara logi *pertumbuhan* menjadi prioritas berikutnya karena latar belakang keadaan ekonomi yang mandeg dengan ditandai tingkat inflasi diatas 600 % (Moebyarto, 1996 : 5).

Namun setelah \pm 25 tahun pembangunan berjalan, nampaklah bahwa paradigma pembangunan yang bertumpu kepada pertumbuhan tidak dapat menimbulkan efek menetes kebawah (*trickle down effect*) atau penyebaran ke kawasan sekitarnya, bahkan sebaliknya menimbulkan efek yang merugikan. (*back wash effect*) daerah yang terkena program pembangunan, misalnya berupa penggusuran atau kerusakan lingkungan. Selain itu, pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ternyata mengakibatkan munculnya ketimpangan ekonomi yang makin besar.

Untuk itulah pada tahun 1970-an muncul pemikiran untuk mengembangkan model pembangunan alternatif yang mengarah pada pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia (*basic needs approach*). Namun pendekatan ini ternyata juga tidak mampu memancing reaksi masyarakat

misikin untuk mampu mengembangkan kegiatan usahanya (**Hari Susanto**, 1996 : 42-43). Oleh karena pendekatan inipun ternyata kurang memuaskan, maka munculah pemikiran baru tentang paradigma pertumbuhan yang harus dipadukan dengan paradigma pemerataan. Perpaduan antara paradigma pertumbuhan dan pemerataan ini oleh **Ginandjar Kartasasmita** disebut dengan istilah *pemberdayaan masyarakat* (1996 : 142-143).

Menurut **Ginandjar** dengan mengutip pendapat **Robert Chamber**, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial dan mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *people centered, participatory, empowering, and sustainable* atau *community based development*. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*).

Dalam terminologi **Friedmann**, konsep pemberdayaan masyarakat ini disebut *alternative development*, yang menghendaki adanya *inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality, and intergenerational equity* (mencakup kehidupan demokrasi, pertumbuhan ekonomi, persamaan antar jenis kelamin, serta persamaan hak antar generasi).

Dengan berbagai paradigma diatas, kinerja pembangunan ekonomi Indonesia terbukti mengalami

kemajuan yang sangat berarti selama 30 tahun terakhir. Keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia ini dapat diketahui dari beberapa indikator misalnya berkurangnya jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan, yaitu dari $\pm 40,08$ % penduduk pada tahun 1976 menjadi $\pm 17,42$ % pada tahun 1987, serta menjadi hanya $\pm 11,39$ % pada tahun 1996 (*Suara Karya*, 23-4-1997).

Disamping itu, dilihat dari aspek GNP, pada tahun 1960-an pendapatan perkapita Indonesia termasuk paling rendah di dunia, yaitu sebesar US \$ 50. Jumlah ini hanya separuh dari GNP negara-negara India, Nigeria, dan Bangladesh. Namun mulai tahun 1980-an, GNP Indonesia meningkat hampir mencapai US \$ 500 per kapita. Ini berarti 30 % lebih tinggi dari pada GNP India, 49 % lebih tinggi dari pada GNP Nigeria, dan 150 % lebih tinggi dari pada GNP Bangladesh (**Frans Husken**, 1996 : 3).

Dengan berbagai keberhasilan tersebut, bahkan semenjak tahun 1995 status ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia dinaikkan dari kelompok negara berpendapatan rendah (*low income countries*) menjadi kelompok negara berpendapatan rendah menengah (*lower-middle income countries*).

Peningkatan status ini didasarkan pada beberapa indikator antara lain : laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (6-8 %), laju inflasi cukup rendah, ekspor non migas yang cukup tinggi, keberhasilan swasembada pangan, upaya

pengentasan kemiskinan yang cukup berhasil, serta keberhasilan penyesuaian kebijakan ekonomi domestik untuk menghadapi berbagai *shock* dalam dan luar negeri (**Edison Hulu**, 1997 : 27-28). Dengan keberhasilan ini, Bank Dunia sampai memberikan predikat menakjubkan atau ajaib (*miracle*) kepada Indonesia bersama dengan 6 negara Asia lainnya (Hongkong, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Taiwan dan Thailand).

Meskipun demikian, keberhasilan tadi tidak identik dengan stabilitas ekonomi. Artinya, meskipun laju pertumbuhan tergolong tinggi, namun jika fundamental ekonominya tidak kuat, maka dengan seketika pertumbuhan tersebut dapat kembali ke titik nol. Atau menurut analisis **Krugman** (1994 : 62-78), kinerja ekonomi yang dicerminkan oleh laju pertumbuhan yang tinggi di negara-negara Asia tidak akan mampu bertahan lama, yang disebabkan oleh 3 faktor penyebab sebagai berikut :

1. Rendahnya pertumbuhan *total produktivitas* (faktor pendorong peningkatan kapasitas produksi : modal & tenaga kerja) sebagai akibat kurangnya pengaplikasian teknologi.
2. Masih kuatnya *campur tangan pemerintah* terhadap mekanisme pasar (contoh : kasus Eropa Timur dan Rusia).
3. Keterlambatan *integrasi perekonomian negara* terhadap perekonomian dunia.

Atas dasar analisis **Krugman** inilah, terjadinya krisis moneter di negara-negara Asia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya dapat dijelaskan. Untuk itu, **Krugman** menyarankan agar negara-negara tersebut tidak terlena pada simbol *miracle*, dan pada saat yang bersamaan melakukan berbagai upaya konkrit seperti memperkuat keunggulan berbanding (*comparative advantage*), memajukan aplikasi teknologi, mengevaluasi campur tangan pemerintah agar tidak mengganggu mekanisme pasar, meningkatkan kualitas SDM, dan memperkuat produksi andalan ekspor.

Sebagaimana disebutkan pada sub bab sebelumnya, substansi kebijakan pembangunan di negara berkembang secara umum ditujukan pada empat wilayah substansial, yakni manajemen makroekonomi yang mantap (*macroeconomic management*), kerangka kerja pengaturan dan promosi (*regulatory and promotional framework*), pengembangan kemampuan sumber daya manusia (*investment in human capital and infrastructure*), serta perlindungan masyarakat miskin / pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan (*protection of the poor and vulnerable*).

Masing-masing wilayah substansial kebijakan ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Manajemen Makro Ekonomi

Pengelolaan terhadap kondisi makro ekonomi suatu negara sangat diperlukan mengingat bahwa kehidupan dan kebijakan ekonomi tanpa didukung oleh keseimbangan makro ekonomi tidak dapat menjamin keberlangsungan pertumbuhan (Easterley and Schmidt-Hebbel dalam John Weiss, 1995 : 8). Oleh karena itu, pemerintah memainkan peranan penting dalam menyelesaikan setiap masalah ketidaksacimbangan makro ekonomi sekaligus menyiapkan basis atau fundamen ekonomi makro yang kuat. Pengalaman menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi negara industri baru seperti Korea Selatan dan Taiwan tiba-tiba merosot, disebabkan oleh kesalahan serius pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen ekonomi makro mereka.

Masalah pokok dari ekonomi makro disini menyangkut anggaran belanja negara serta nilai tukar mata uang. Mengenai masalah anggaran belanja negara, pendekatan yang digunakan adalah bahwa dalam sistem ekonomi yang terbuka terhadap perdagangan luar negeri dan pergerakan modal, pengambil kebijakan perlu memfokuskan kepada dua sasaran makro ekonomi, yakni keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal.

Keseimbangan internal dimaksudkan sebagai aktivitas ekonomi dalam negeri yang memadai untuk menggerakkan potensi ekonomi secara keseluruhan, yang berimplikasi pada penggunaan tenaga kerja secara maksimum. Kesimbangan

internal ini ditunjukkan kapasitas yang tidak termanfaatkan dan tenaga kerja, serta naiknya harga-harga bahan kebutuhan.

2. Kerangka Kerja Regulasi dan Promosi

Terdapat suatu “kebiasaan” bahwa kebijakan pemerintah di bidang ekonomi akan mengizinkan perusahaan swasta untuk terus berkembang, dan mengusahakan perusahaan negara dijalankan dengan lebih efisien.

Dalam kaitan ini, perusahaan swasta membutuhkan banyak pengurangan restriksi dan campur tangan pemerintah melalui kebijakan deregulasi, misalnya dalam hal pengendalian harga, izin investasi, dan sebagainya. Khususnya dalam konteks globalisasi ekonomi, maka pemerintah perlu mendorong dan atau memberdayakan sektor swasta melalui pengurangan proteksi dan subsidi, mengeluarkan kebijakan tarif yang proporsional, dan sebagainya.

Sementara dipihak lain, dalam manajemen perusahaan negara diperlukan adanya pelimpahan wewenang (otonomi) yang makin besar, sehingga keputusan-keputusan perusahaan dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan atau kriteria komersial.

Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan (air minum, listrik dan sebagainya) – baik dilakukan oleh swasta maupun oleh negara – sama-sama membutuhkan pengaturan dari

pemerintah yang bersesuaian dengan kepentingan perusahaan untuk mencari keuntungan, mengembangkan usaha (ekspansi), dan perubahan teknik atau kiat-kiat usaha dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan pelanggan. Dalam kaitan ini, strategi promosi perusahaan yang dapat ditempuh adalah dengan mewujudkan kelembagaan finansial (baik perbankan maupun non perbankan) secara efektif.

Disamping itu, pemerintah perlu memikirkan upaya pengalihan asset dan pengelolaan perusahaan dari negara kepada swasta. Atau dengan kata lain, kebijakan privatisasi perlu dilakukan (secara hati-hati) dengan maksud untuk mendorong kinerja BUMN / BUMD yang selama ini terlihat agak lesu.

Privatisasi sendiri menurut **Savas** (1987 : 3), adalah :

.... act of reducing the role of government, or increasing the role of the private sector, in an activity or in the ownership of assets (pengurangan peran pemerintah atau peningkatan peran sektor swasta, baik dalam suatu aktivitas tertentu maupun dalam pemilikan sejumlah aset).

Sementara itu, **Nafziger** (1997 : 582) mengatakan bahwa privatisasi merupakan rangkaian kebijakan yang meliputi : 1) perubahan kepemilikan perusahaan dari sektor publik kepada sektor swasta ; 2) kebebasan yang lebih besar untuk memasukkan suatu produk tertentu kedalam sektor publik ; serta 3) dilakukannya upaya franchise atau kontrak

dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum, atau menyewakan sumber daya atau aset sektor publik kepada sektor swasta.

Pelunya ditempuh kebijakan privatisasi ini menurut **Savas** (1987 : 4-10) disebabkan oleh adanya empat alasan pendesak atau faktor pendorong, yaitu yang bersifat *pragmatis, ideologis, komersial dan kerakyatan* (populist).

Alasan pragmatis menginginkan privatisasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik (*better government*) dan efektif dalam hal pembiayaan pelayanan umum. **Alasan ideologis** berasumsi bahwa pemerintah sudah terlalu besar dan terlalu berkuasa sehingga berbahaya bagi demokrasi. Oleh karena itu, privatisasi diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang tidak banyak mengatur (*less government*) dan memainkan peran yang lebih kecil seperti pada institusi swasta.

Selanjutnya, **alasan komersial** didasari pemikiran bahwa pengeluaran pemerintah merupakan satu bagian besar dari kegiatan ekonomi nasional, dan pelaksanaan pengeluaran tadi sebenarnya dapat dilimpahkan kepada perusahaan-perusahaan swasta. Artinya, perusahaan milik negara (*state-owned enterprises* atau *parastatals*) dan segenap asetnya dapat dikerjakan secara lebih baik oleh sektor privat.

Adapun **alasan kerakyatan** dilakukannya privatisasi adalah bahwa masyarakat harus memiliki pilihan yang lebih baik dalam hal pelayanan umum. Oleh karenanya, mereka

perlu diberi kewenangan untuk mendefinisikan dan mengarahkan kebutuhannya, sekaligus mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah.

Untuk melihat sejauh mana “privatisasi” telah dijalankan di Indonesia, data yang tertera pada tabel dibawah ini akan menunjukkan perbandingan kegiatan bisnis diberbagai sektor yang masih diselenggarakan penuh oleh pemerintah dan yang telah dilakukan bersama dengan swasta (Pangestu, 1996 : 74).

Dari data diatas dapat disimak bahwa dari 215 perusahaan milik negara yang ada, baru 33 atau 15 % lebih sedikit yang telah diselenggarakan bersama dengan swasta. Pada masa itu, reorganisasi dan atau restrukturisasi perusahaan milik negara belum menjadi prioritas mengingat keuntungan yang diperoleh pada jaman keemasan minyak ini masih mampu menjamin pemerintah untuk memberikan subsidi kepada perusahaan milik negara. Baru semenjak tahun 1986, kebijakan untuk meningkatkan peran sektor privat menjadi prioritas.

Tabel 2.2
Jumlah Perusahaan Milik Negara Berdasar Sektor

Sector	100 % Government	Joint Ventures	Total
Finance	22	10	32
Transportation	17	1	18
Trading	9	1	10
Information	2	-	2
Defense	3	-	3
Health	4	-	4
Education	1	-	1
Labor	1	-	1
Public Works	19	-	19
Agriculture	38	3	41
Mining and Energy	8	2	10
Industry	38	16	54
Tourism, Post, Telecom.	8	-	8
Non Departmental	5	-	5
Total	182	33	215

3. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

Bahwa keberadaan sumber daya manusia bagi suatu organisasi sangatlah vital, memang tidak bisa dibantah. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Siagian (1983 : 128) sebagai berikut :

Manusia itu merupakan unsur terpenting karena unsur-unsur lainnya yang dimiliki oleh suatu organisasi seperti uang, materi, mesin-mesin, metode kerja, waktu

dan kekayaan lainnya hanya dapat memberikan manfaat bagi organisasi jika manusia yang di dalam organisasi itu merupakan daya pembangun dan bukan perusak bagi organisasi.

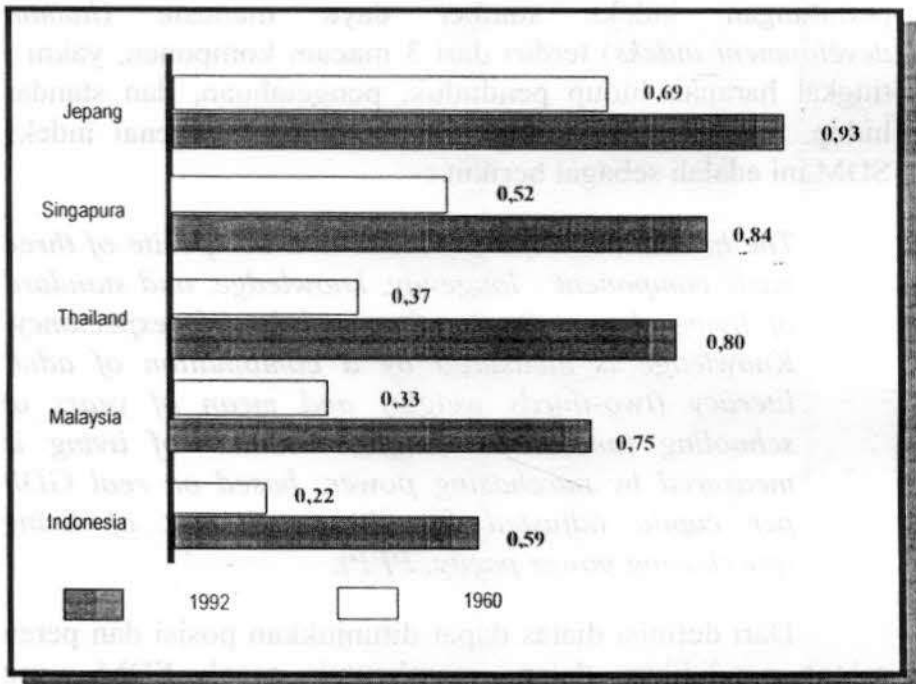
Menurut UNDP (**World Bank**, 1993 : 12), indikator perhitungan indeks sumber daya manusia (*human development indeks*) terdiri dari 3 macam komponen, yakni : tingkat harapan hidup penduduk, pengetahuan, dan standar hidup. Selengkapnya laporan Bank Dunia mengenai indeks SDM ini adalah sebagai berikut :

The human development index is a composite of three basic component : longevity, knowledge, and standard of living. Longevity is measured by life expectancy. Knowledge is measured by a combination of adult literacy (two-thirds weight) and mean of years of schooling (one-thirds weight). Standar of living is measured by purchasing power, based on real GDP per capita adjusted for the local cost of living (purchasing power parity, PPP).

Dari definisi diatas dapat ditunjukkan posisi dan peran sektor pendidikan dalam membentuk sosok SDM yang berkualitas, khususnya dari sisi kemampuannya (*knowledge*). Akan tetapi sayangnya, dengan mengambil perbandingan antara negara-negara tetangga yang juga digolongkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan, ternyata indeks

SDM Indonesia berada pada tingkat yang paling rendah. Hal ini terlihat seperti pada gambar 2.

Gambar 2.1
Indeks Sumber Daya Manusia



Atas dasar indeks diatas, maka jelaslah bahwa peran pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan atau kemampuan manusia Indonesia – khususnya dalam menghadapi era persaingan dan perdagangan bebas – menjadi sangat berat.

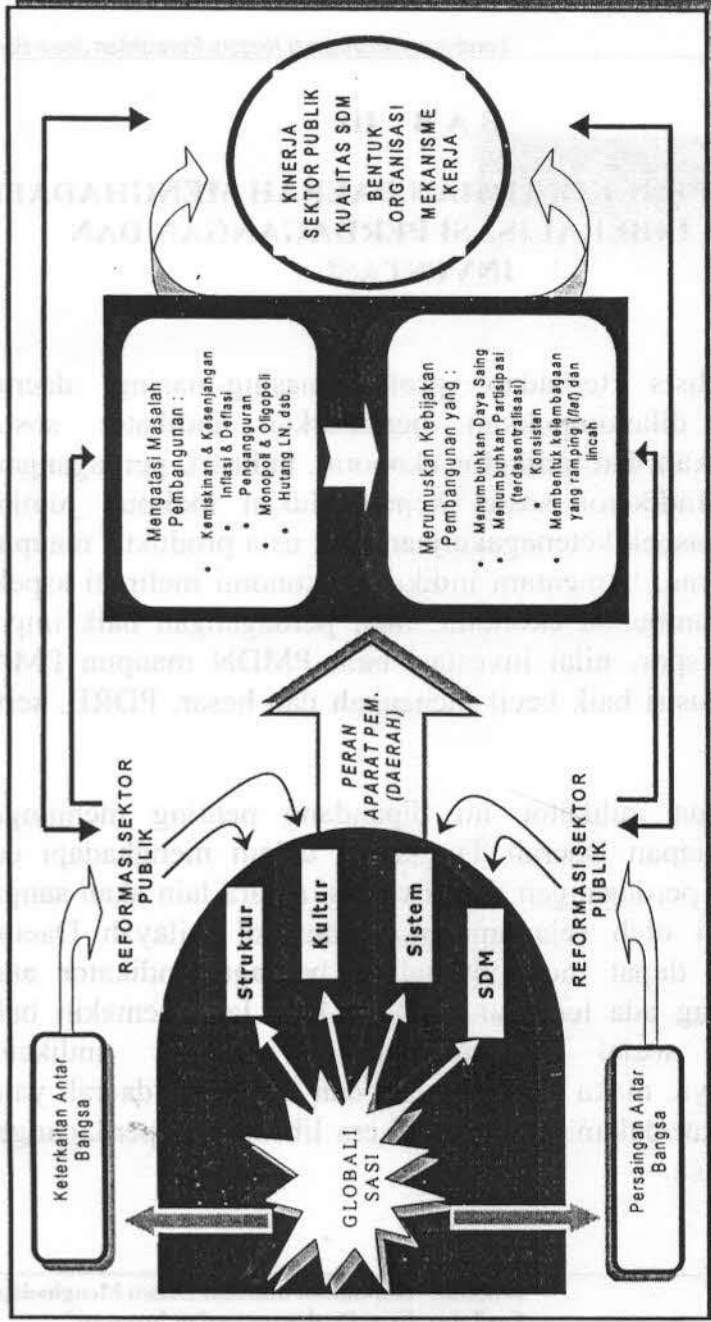
4. Perlindungan Masyarakat Miskin dan Pengentasan Kemiskinan

Isu sentral dari peran negara yang keempat ini adalah bagaimana menciptakan distribusi pendapatan yang relatif merata diantara seluruh lapisan masyarakat. Dalam kaitan ini, kebijakan pemerintah untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup rakyat miskin ini perlu dilakukan dengan berpedoman kepada lima pendekatan sebagaimana yang dikemukakan oleh **Demery and Addison** (dalam **John Weiss**, 1995 : 118), yakni :

1. *Increasing their access to productive assets* (meningkatkan akses penduduk miskin terhadap aset produktif seperti tanah atau modal usaha).
2. *Raising the return on such assets* (meningkatkan ketersediaan sarana untuk berfungsinya suatu asset, antara lain perlunya penyediaan fasilitas infrastruktur yang memungkinkan penduduk miskin mampu menaikkan produksinya atas aset tanah).
3. *Improving their employment opportunities* (memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan memperoleh pekerjaan).
4. *Ensuring their access to basic education and health services* (menyediakan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan).

5. *Supplementing their income with transfer* (melengkapi penghasilan penduduk miskin dengan transfer beberapa komoditas tertentu, misalnya makanan. Hal ini biasanya untuk penanganan jangka pendek).

Keseluruhan pola pikir atau kerangka teoritis mengenai proses globalisasi yang ditandai oleh liberalisasi perdagangan bebas dan investasi, serta kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan peran yang harus diembannya dalam rangka meningkatkan kinerja sektor publik, dapat digambarkan kedalam model sebagai berikut.



B A B III

PROFIL PEREKONOMIAN DAERAH MENGHADAPI ERA LIBERALISASI PERDAGANGAN DAN INVESTASI

Analisis terhadap profil masing-masing daerah penelitian dikelompokkan berdasarkan indikator sosial kependudukan dan indikator ekonomi, industri, perdagangan, investasi. Indikator sosial kependudukan meliputi jumlah penduduk, aspek ketenagakerjaan baik usia produktif maupun pengangguran. Sementara indikator ekonomi meliputi aspek-aspek pertumbuhan ekonomi, nilai perdagangan baik impor maupun ekspor, nilai investasi baik PMDN maupun PMA, jumlah industri baik kecil menengah dan besar, PDRB, serta PAD.

Kedua indikator ini dipandang penting mengingat bahwa kesiapan Daerah Tingkat II dalam menghadapi era liberalisasi perdagangan dan investasi antara lain akan sangat dipengaruhi oleh sejauhmana aparatur di wilayah Daerah Tingkat II dapat mengoptimalkan berbagai indikator atau kriteria yang ada tersebut. Dengan kata lain, semakin baik indikator sosial kependudukan maupun indikator ekonomisnya, maka semakin siap dan kuat pula daerah yang bersangkutan dalam menghadapi era liberalisasi perdagangan dan investasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu strategi memperkuat kesiapan Daerah Tingkat II adalah dengan memperbaiki atau meningkatkan kemampuan daerah dalam setiap indikator yang relevan ini. Sebagai contoh, indikator jumlah PAD setiap daerah, selain menjadi ukuran kemampuan otonomi daerah yang bersangkutan, sekaligus juga menunjukkan daya mampu daerah tersebut dalam menghadapi era liberalisasi perdagangan dan investasi, khususnya dari sisi pembiayaan atau pendanaan pembangunan daerah. Untuk itu, kebijakan umum dan langkah-langkah konkrit yang perlu dilakukan oleh Daerah Tingkat II adalah bagaimana meningkatkan kemampuan PAD, baik melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi maupun diversifikasi.

Adapun masing-masing indikator kesiapan Daerah Tingkat II yang akan dibahas lebih lanjut pada uraian dibawah ini adalah sebagai berikut.

A. Profil Daerah Berdasarkan Indikator Sosial Kependudukan

Pada umumnya dapat dikemukakan bahwa laju pertumbuhan penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di wilayah penelitian, cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat misalnya dari data Propinsi Daerah Tingkat II Sumatera Utara yang memiliki jumlah penduduk 11,1 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) sekitar 1.62 % per tahun. Diantara seluruh jumlah tersebut, sekitar 2 juta penduduk atau

17,9 % berkedudukan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan.

Data diatas juga menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berdomisili di ibu kota propinsi. Hal ini merupakan fenomena yang wajar mengingat pertumbuhan industri dan ekonomi lebih terkonsentrasi di wilayah ibu kota propinsi dibanding daerah-daerah disekitarnya (sub-urban). Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan dan jumlah tenaga kerja atau usia produktif juga lebih tinggi di wilayah ibu kota propinsi.

Di Propinsi Sumatera Selatan misalnya, sektor industri telah menyerap tenaga kerja 281,540 orang pada tahun 1996, meningkat dari 193,481 orang pada tahun 1984. Kondisi ini menggambarkan bahwa peningkatan lapangan kerja dan daya serapnya sangat rendah, dan tidak seimbang dengan pertambahan jumlah angkatan kerja. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara *supply* dengan *demand*.

Demikian pula gambaran ketenagakerjaan di Bali. Jumlah kesempatan kerja di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang tersedia tahun 1995 sebanyak 1.568.686 orang dan pada tahun 1996 meningkat menjadi 1.584.827 orang, yang terbagi dalam sembilan sektor.

Diantara sektor-sektor tersebut, pertanian justru menyerap paling sedikit, yakni sebanyak 3,97 %. Disini sektor listrik, gas dan air merupakan potensi penyerap tenaga kerja yang terbesar dengan jumlah 15 %, disusul oleh sektor

industri sebesar 10,19 %, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,13 %. Hal ini kemungkinan besar tidak terlepas dari ciri Bali sebagai kota pariwisata, yang memberikan efek kepada pengembangan jasa pelayanan dan fasilitas-fasilitas umum. Adapun gambaran penyerapan tenaga kerja berdasarkan sektor tersebut dapat dilihat selengkapnya pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Persebaran Angkatan Kerja Berdasar Sektor di Propinsi Daerah
Tingkat I Bali

Sektor	%
1. Pertanian	3,97 %
2. Penggalian	5,28 %
3. Industri	10,19 %
4. Listrik, gas dan air	15,75 %
5. Bangunan	8,78 %
6. Perdagangan, Hotel dan Restaurant	10,13 %
7. Pengangkutan dan Komunikasi	9,69 %
8. Keuangan	9,49 %
9. Jasa jasa	6,01 %

Sumber : BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Bali, 1997

Sementara itu, kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Utara menunjukkan data bahwa jumlah angkatan kerja pada tahun 1993 tercatat sebanyak 1.04 juta orang dan pada tahun 1997 meningkat menjadi 1,19 juta orang atau terjadi kenaikan rata-rata sebesar 4,8 % per tahun. Dilihat dari distribusi penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha sampai dengan tahun 1997 masih didominasi oleh sektor pertanian yakni sebesar 51,15 %, disusul oleh sektor jasa 17,44 %, sektor Perdagangan 13,68 %, bangunan 5,07 %, pengangkutan 4,25 %, keuangan dan Bank 0,27 % serta listrik dan air minum sebesar 0,31 %.

Dalam hal ini, terlihat adanya perbedaan antara kondisi Sulawesi Utara dengan Bali, khususnya yang menyangkut kontribusi sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja. Jika dilihat dari potensi daerah Sulawesi Utara yang masih mengandalkan pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan, maka perbedaan ini sangat bisa diterima.

B. Profil Daerah Berdasarkan Indikator Ekonomis

1. Struktur Ekonomi Daerah

Potensi utama seluruh daerah penelitian pada umumnya berbasis pada sektor pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, dan pertambangan. Namun khusus Propinsi Bali, potensi sektor lain – terutama perdagangan,

hotel dan restoran serta jasa – cukup berimbang dibanding dengan sektor lainnya.

Di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara misalnya, potensi sektor-sektor tersebut hampir merata di seluruh Daerah Tingkat II, sehingga peluang usaha dibidang investasi dan perdagangan dimiliki oleh seluruh Daerah Tingkat II hampir merata. Namun jika dilihat dari segi geografisnya, masing-masing Daerah Tingkat II mempunyai kondisi ada beberapa perbedaan, misalnya dalam tingkat kesuburan lahan pertanian, infrastruktur dan jarak dari Ibukota Propinsi. Sebagai akibatnya, kegiatan perekonomian dan perdagangan masih terkonsentrasi dibagian bagian pantai timur (wilayah utara).

Keadaan ini tidak berbeda jauh dengan wilayah Sumatera Selatan, dimana struktur perekonomiannya masih didominasi sektor industri pengolahan sebesar 20,89 %, sektor pertanian 19,36 %, perdagangan, hotel dan restoran 17,86 % serta sektor pertambangan dan energi 15,98 % industri pengolahan. Badan Usaha Milik Negara memegang peranan menjadi penyangga perekonomian daerah, yaitu Pertamina, Semen Baturaja serta Pupuk Sriwijaya.

Dengan struktur demikian, maka tidak mengherankan jika sektor pertanian masih menjadi prioritas kebijaksanaan ekonomi di propinsi ini disebabkan besarnya penyerapan tenaga kerja oleh sektor ini yaitu sekitar 60 % meskipun trendnya menurun. Prospek sektor ini terletak pada kelapa

sawit yang investasinya diarahkan pada industri pengolahan kelapa sawit, yang selama ini nilai tambahnya dibawa ke daerah Lampung. Komoditi utama pertanian lainnya adalah karet, kelapa serta lada. Bila dilihat per DT II, penduduk yang bekerja di sektor pertanian relatif banyak di kabupaten OKU, Musi Banyuasin dan Lahat.

Sementara struktur perekonomian di Jawa Barat, khususnya di Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dapat dilihat dari besarnya kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB Daerah, sebagaimana nampak pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Struktur Ekonomi Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor
(Tahun 1994 s/d Tahun 1995)

No.	Lapangan Usaha	PDRB atas Dasar harga berlaku	PDRB atas dasar harga konstan
1.	Pertanian	0,25 %	2,98 %
2.	Industri Pengolahan	18,13 %	16,71 %
3.	Listrik, Gas dan Air	4,69 %	13,04 %
4.	Bangunan	12,93 %	6,20 %
5.	Perdagangan Hotel dan Rest.	17,74 %	12,60 %
6.	Pengangkutan dan Komunikasi	15,04 %	8,26 %
7.	Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan	22,29 %	10,27 %
8.	Jasa-jasa	8,94 %	8,04 %

Untuk wilayah Sulawesi Utara, struktur ekonominya menurut harga konstan tahun 1993 selama periode 1993-1997 tidak banyak mengalami perubahan. Pada Tahun 1993 sumbangan sektor pertanian adalah 27,62 % selanjutnya pada tahun 1997 sedikit menurun menjadi 27,20 %. Sektor Industri hanya mengalami kenaikan dari 8,49 % tahun 1993 naik menjadi 8,92 % tahun 1997, sektor Jasa mengalami sedikit

penurunan yaitu dari 18,45 % tahun 1993 menjadi 16,18 % pada tahun 1997.

Selanjutnya sektor-sektor lain seperti sektor pengangkutan tahun 1993 sebesar 13,94 % tahun 1997 naik menjadi 13,98 % demikian juga sektor perdagangan, hotel dan restoran tahun 1993 sebesar 10,77 % naik menjadi 11,27 % pada tahun 1997. Selanjutnya sektor bangunan naik dari 10,77 % tahun 1993 menjadi 11,27 % tahun 1997. Sementara sektor pertambangan listrik dan keuangan kontribusinya terhadap PDRB sampai dengan tahun 1997 rata-rata masih dibawah 10 %.

2. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

Sebelum krisis moneter terjadi, tingkat pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah penelitian dapat dikatakan menggembirakan dan memberikan optimisme tinggi. Kinerja ekonomi seluruh wilayah ini secara nasional tercermin pula dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi pula (6-8 % per tahun). Namun dengan terjadinya krisis moneter, sebagian besar wilayah mengalami penurunan, meskipun pada sektor-sektor tertentu (seperti perkebunan kopi di Sulawesi Selatan) justru menguntungkan.

Gambaran masing-masing wilayah penelitian dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi dan tingkat PDRBnya adalah sebagai berikut.

Di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, selama PJP I laju pertumbuhan ekonomi (LPE) mencapai rata-rata 8,54 % pertahun. Demikian juga selama 3 tahun pelaksanaan Pelita VI berdasarkan harga konstan 1993 yaitu sebesar 10,11% pada tahun 1994, sebesar 9,37 % pada tahun 1995, sebesar 9,46 % pada tahun 1996, dan sebesar 7,67 % pada tahun 1997.

Pertumbuhan ekonomi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang cukup tinggi telah berhasil mengangkat PDRB perkapita dari sebesar Rp 1.698.013,- pada tahun 1993 menjadi Rp 1.951.632 pada tahun 1994, sebesar Rp 2.190.323,- pada tahun 1995, sebesar Rp 2.464.295,- pada tahun 1996, dan sebesar Rp 2.830.301,- pada tahun 1997.

Laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi terjadi juga di Sumatera Selatan. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan selama kurun waktu 1989 - 1996 berdasarkan harga konstan 1993 sebesar 5,77 % per tahun (dengan migas), sedangkan tanpa migas sebesar 6,60 % per tahun. Adapun pertumbuhan pendapatan per kapita selama kurun waktu tersebut sebesar 10,73 % per tahun dengan migas serta 12,31 % tanpa migas (harga berlaku).

Sementara pertumbuhan perekonomian Jawa Timur selama beberapa dasawarsa lalu telah menunjukkan prospek yang sangat menggembirakan dimana laju pertumbuhannya selalu diatas angka rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 1996 laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur

sebesar 8,5% lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 7,82%. Ditinjau dari besaran sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), secara nasional, Jawa Timur masih tetap termasuk dalam tiga (3) propinsi terpenting yang menentukan perkembangan perekonomian Indonesia karena hampir 20% dari total PDB nasional berasal dari sumbangan Propinsi Jawa Timur.

Perkembangan ekonomi Jawa Barat dalam skala propinsi tidak tergambarkan secara utuh, namun dari perkembangan ekonomi yang terjadi di Daerah Tingkat II Bogor, sedikit banyak tergambar pula kinerja ekonomi Jawa Barat secara umum.

Dalam kaitan ini, pertumbuhan ekonomi Kodya Dati II Bogor hasil proyeksi tahun 1995 sampai dengan setiap tahun rata-rata pertumbuhannya adalah 9,40 %. Sektor yang sangat dominan dalam PDRB ini masih tetap berada pada sektor industri, perdagangan, hotel dan restoran serta keuangan, dan persewaan jasa perusahaan. Sektor lainnya yang kelihatannya agak dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB antara lain sektor angkutan / komunikasi dan bangunan. Adapun data proyeksi PDRB sampai tahun 2000 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Proyeksi PDRB Kotamadya Dati II Bogor Tahun 1995 – 2000
(000.000 Rp.)

No.	Lapangan Usaha	1995	2000	Rata-2 Pertumbuhan
1.	Pertanian	1.557	947	8,0 %
2.	Industri Pengolahan	116.423	208.317	15,80 %
3.	Listrik, Gas dan Air	33.347	49.711	9,80 %
4.	Bangunan	82.044	105.736	5,8 %
5.	Perdagangan Hotel dan Rest.	114.037	198.961	14,8 %
6.	Angkutan dan Komunikasi	98.677	124.187	5,2 %
7.	Bank dan Lembaga Keuangan	141.848	189.149	6,4 %
8.	Jasa-jasa	55.128	67.396	4,4 %
PDRB		643.028	942.404	9,4,0 %

Sumber: Proyeksi PDRB Kodya Bogor

Gambaran perkembangan ekonomi yang dapat dianggap sangat menggembirakan justru berada di wilayah Indonesia bagian timur, khususnya Propinsi Sulawesi Utara.

Selama periode 1992-1996 perekonomian Sulawesi Selatan tumbuh rata-rata 7,92 % per tahun. Bila diperhatikan perkembangannya dari tahun ke tahun pada Tabel dibawah, maka selama periode tersebut ternyata pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan secara umum menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, yakni 7,72 % pada awal periode meningkat menjadi 8,16 % pada tahun 1996. Ini berarti

pertumbuhan ekonomi daerah ini telah sesuai dengan sasaran pembangunan yang diamanatkan Pola Dasar Pembangunan Daerah yakni pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi.

Tabel 3.4
PDRB Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan 1993
Pada Periode 1992 - 1996 (Dalam Persen)

Tahun	PDRB (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)
1992	6.973.423	-
1993	7.511.772	7,72
1994	8.088.147	7,67
1995	8.744.279	8,11
1996	9.458.016	8,16
1992 - 1996 (Rata-Rata)		7,92

Dapat disampaikan pula bahwa pertumbuhan total PDRB harga konstan tahun 1993 atau pertumbuhan ekonomi tahun 1993 di Sulawesi Selatan tercatat sebesar 7,72 %. Selain itu besar sumbangan PDRB Sulawesi Selatan terhadap pembentukan PDB Nasional pada tahun 1988 sebesar 2,51 %.

pada tahun 1989 sebesar 2,41 %, dan pada tahun 1990 sebesar 2,29 %. Pada tahun 1991 dan 1992 nampak bahwa andil PDRB Sulawesi Selatan terhadap pembentukan total PDB Nasional meningkat lagi masing-masing menjadi 2,33 % dan 2,68 %.

Pada tabel diatas dapat juga dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan PDRB riil atau pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 1993 - 1996 tercatat sebesar 7,92 % per tahun. Angka ini relatif lebih besar bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sekitar 6,74 % per tahun selama periode tahun 1988-1992.

Pada tahun 1988 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan mencapai angka sebesar 10 %, sedangkan nasional hanya sekitar 5,78 %. Dibandingkan dengan keadaan pada tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 1989 agak melambat yaitu sebesar 6,48 %. Sebaliknya yang terjadi dengan perekonomian nasional justru tumbuh agak melaju dengan angka sebesar 7,46 %. Kemudian pada tahun 1990-1991 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan meningkat sangat pesat, mencapai angka sebesar 9,53 %. Sedangkan nasional tumbuh sebesar 6,90 %. Selama periode tahun 1988-1993 rata-rata pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sebesar 8,04 % per tahun.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada tahun 1993 sebesar Rp.6.811.541 juta atau sebesar 2,41 % dari total PDB Indonesia yang sebesar Rp.283.056.688 juta pada tahun

yang sama. Adapun pertumbuhan PDRB Sulsel pada tahun 1988-1993 sebesar 6,9 %, itu berarti lebih besar dari pertumbuhan rata-rata nasional yang sebesar 4,8 %. Usaha untuk terus memacu tingkat pertumbuhan propinsi diatas rata-rata nasional diharapkan dapat mengejar ketinggalan yang dialami oleh Sulsel dan umumnya daerah-daerah di wilayah KTI pada masa Pembangunan Jangka Panjang Pertama.

Sementara itu perkembangan ekonomi di wilayah Indonesia bagian timur lainnya yakni Propinsi Sulawesi Utara dapat dikemukakan berdasar data yang diperoleh sebagai berikut.

Berdasarkan harga konstan 1993, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Sulawesi Utara pada periode 1993-1997 mencapai 8,94 % rata-rata per tahun. dengan pencapaian laju pertumbuhan tersebut dapat dikatakan bahwa sasaran pertumbuhan Repelita VI sebesar 8,5 % dapat dicapai. Angka pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dicapai pada tahun 1996 yang mampu bertumbuh sebesar 9,25 %. Hal ini disebabkan tingginya produksi sektor pertambangan emas yang mencapai 500 %, terutama karena mulai berproduksinya PT. Newmont Minahasa Raya di Ratatotok, sehingga mewarnai Unggulan sektor pertambangan dan Energi dalam Panca Program unggulan (PPU) Sulawesi Utara.

Dengan laju pertumbuhan ekonomi seperti tersebut di atas dan struktur ekonomi yang tidak banyak berubah ternyata berdampak pada peningkatan yang cukup signifikan

terhadap PDRB Sulawesi Utara. Hal ini terlihat bahwa pada tahun 1993, PDRB per kapita Sulawesi Utara sebesar Rp. 1.093.475 dan pada tahun 1997 meningkatkan Rp. 2.038.507. Hal ini berarti selama kurun waktu 1993-1997 PDRB per kapita mengalami peningkatan rata-rata 16,98 % setiap tahun.

3. Pendapatan Asli Daerah

Indikator ekonomi lainnya yang sangat penting dalam mengukur kinerja pembangunan suatu daerah adalah sejauhmana daerah tersebut mampu menggali potensi sumber pendapatan aslinya, dengan tidak semata-mata berorientasi kepada pencapaian total PAD sebanyak-banyaknya, namun juga pemanfaatan sumber pembiayaan tersebut bagi penyelenggaraan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Atas dasar data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah PAD seluruh daerah meningkat setiap tahunnya, tetapi belum mampu mendongkrak percepatan investasi di daerah, karena sebagian besar pendapatan tersebut hanya dipergunakan untuk pembiayaan tugas-tugas rutin pemerintahan. Disamping itu, terdapat kecenderungan pula bahwa kemampuan daerah dari aspek pembiayaan ini relatif rendah, sehingga dari tahun ke tahun bantuan atau subsidi pemerintah Pusat masih besar, bahkan cenderung makin kuat atau dominan.

Adapun gambaran mengenai potensi PAD dari beberapa daerah penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut.

Di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, besarnya PAD masing masing Daerah Tingkat II sangat beragam, dimana yang tertinggi adalah PAD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan yang terendah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung. Walaupun demikian di Propinsi Daerah Tingkat I Bali diupayakan terjadi pemerataan, sehingga kepada Daerah Tingkat II yang mempunyai PAD lebih tinggi diharuskan memberi subsidi kepada Daerah Tingkat II yang mempunyai PAD lebih rendah, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Realisasi PAD Seluruh Daerah Tingkat II di Bali

Daerah Tingkat II	Jumlah PAD
Buleleng	5.015.000.000,-
Jembrana	3.076.701.000,-
Tabanan	4.910.635.160,-
Badung	89.361.290.000,-
Gianyar	10.299.991.000,-
Bangli	3.006.350.000,-
Klungkung	2.836.676.300,-
Karangasem	4.230.310.441,-
Denpasar	28.554.021.093,-

Sumber : BAPPEDA Propinsi DT I Bali, 1997

Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I dan Tingkat II se Sulawesi Selatan sebagai salah satu komponen pembiayaan daerah mengalami pertumbuhan yang cukup mengesankan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (1992/1993 – 1996/1997), APBD Tingkat I Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan rata-rata 22,97 % atau dari Rp 126.623.123.000 pada tahun anggaran 1992/1993 meningkat menjadi Rp 242.941.150.000 pada tahun anggaran 1996/1997. Demikian pula dengan APBD II se Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan rata-rata 23,92 % per tahun, yaitu dari Rp 396.451.998.472 pada tahun anggaran 1992/1993 menjadi Rp 775.800.117.868 pada tahun anggaran 1996/1997.

Sumber dana APBD baik Tingkat I maupun Tingkat II masih didominasi oleh pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Pusat, berupa bantuan dan sumbangan, rata-rata sekitar 59,58 % untuk Daerah Tingkat I dan 78,21 % untuk Daerah Tingkat II.

Penerimaan Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 1996/1997 untuk APBD Tingkat I Sulawesi Selatan sebesar Rp. 242.941.150.000, dan untuk APBD Tingkat II se Sulawesi Selatan sebesar Rp. 775.800.117.868. Jika jumlah tersebut dihadapkan dengan jumlah dana investasi yang bersumber dari APBD I dan APBD II dalam tahun anggaran 1996/1997 – yaitu masing-masing sebesar Rp. 88.400.000.000 dan Rp. 263.283.000.000 – maka dana APBD yang terserap untuk kebutuhan investasi pembangunan daerah baru berkisar

masing-masing sebesar 36,38 % untuk Dati I dan 33,93 % untuk DT II.

Hal itu mengindikasikan pula bahwa sebagian besar dana APBD (khususnya Tingkat II), dialokasikan untuk kebutuhan pembiayaan tugas-tugas pemerintahan dibidang pelayanan umum dan pemerintahan.

Kondisi kemampuan PAN di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara menunjukkan bahwa sumber pembiayaan pembangunan daerah selama tiga tahun terakhir (1994/1995, 1995/1996, dan 1996/1997) menunjukkan peningkatan yang cukup berarti dalam proses percepatan pembangunan di daerah baik yang bersumber dari APBD tingkat I, APBD Tingkat II, Sektoral/APBN, Bantuan Luar Negeri maupun yang bersumber dari swasta/masyarakat. Tahun Anggaran 1994/1995 anggaran pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD I, dan APBD II berjumlah Rp. 332,5 milyar. Kemudian tahun 1995/1996 mengalami peningkatan 21,93 % atau menjadi Rp. 405,4 milyar. Selanjutnya tahun 1996/1997 pembiayaan pembangunan meningkat 34,38 % atau naik menjadi Rp. 544,79 milyar dan pada TA. 1997/1998 alokasi pembiayaan pembangunan mengalami peningkatan sebesar 26,44 % atau naik menjadi Rp. 688,83 milyar.

Berdasarkan data-data yang disebutkan diatas, maka dalam rangka menghadapi titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II yang akan datang, dilihat dari aspek pembiayaan pembangunan daerah cukup menguntungkan, namun tetap

harus memperhatikan aspek-aspek pemerataan antar daerah maupun antar golongan.

Satu hal lagi yang perlu diperhitungkan adalah bahwa dengan terjadinya krisis moneter dewasa ini yang mengakibatkan banyaknya industri gulung tikar serta lesunya kegiatan ekonomi secara luas, hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk semakin intensif dan jeli dalam menentukan suatu sumber-sumber baru penggalan potensi daerah. Sebab jika tidak, maka kemampuan keuangan daerah menjadi sangat terancam merosot serta kehilangan sumber-sumber yang selama ini sangat diandalkan.

4. Industri, Perdagangan dan Investasi

Pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah sebagaimana diuraikan diatas ternyata berhubungan secara positif dengan dinamika kehidupan industri, perdagangan dan investasi di daerah. Hal ini dapat disimak dari profil daerah berdasarkan indikator industri, perdagangan dan investasi ini.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tingi di Sumatera Utara dengan di tunjang pula oleh stabilitas ekonomi yang mantap, ternyata diikuti oleh pergeseran pada struktur ekonomi ke arah yang makin mantap dan seimbang pula. Berdasarkan kontribusi setiap sektor terhadap penciptaan PDRB, peran sektor Industri makin menggantikan peranan sektor pertanian, walaupun secara total peran sektor pertanian

masih dominan memberikan lapangan pekerjaan yang cukup besar.

Terjadinya pergeseran dengan menurunnya kontribusi Sektor Pertanian sebesar 28.98% pada tahun 1994 menjadi 24,2%, pada tahun 1995 dan sebesar 24.8% pada tahun 1996. Sedangkan Sektor Industri memberikan kontribusi sebesar 23,6% pada tahun 1993 menjadi 25,51% pada tahun 1994, 26,29% pada tahun 1995, sebesar 27,12% pada tahun 1996 dan sebesar 26,24% pada tahun 1997. Dengan kontribusi seperti itu, maka Sektor Industri merupakan primadona yang strategis bagi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara pada Pelita VI, mengingat makin besarnya kontribusi disektor ini.

Sedangkan profil kehidupan industri di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa jumlah industri pada tahun 1984 28,680 unit usaha sedangkan pada tahun 1996 menjadi 44,169 unit usaha. Sektor industri berperan sebagai penggerak sektor pertanian dan pertambangan dengan kenaikan nilai pada tahun pertama Repelita VI sebesar 2,08 % dan tahun kedua 1,12 %. Nilai produksi meningkat dari 14,58 % menjadi 63,39 %.

Adapun sektor pertambangan didominasi terutama oleh Batubara dengan pemanfaatan mencapai 40 juta ton / tahun dan tersebar di Muara Enim, Pendopo Prabumulih serta Muara Lakitan. Keuntungan dari produk batubara adalah *Environmentally friendly*.

Demikian pula kondisi yang terjadi di Propinsi Sulawesi Selatan. Pada akhir Pelita V unit usaha yang bergerak di sektor industri sebanyak 60.428 buah dan menyerap tenaga kerja sebanyak 221.854 orang. Nilai produksi baru mencapai Rp. 835.925 juta, sedang nilai ekspor hanya sebesar US\$ 102.949,513. Ini menggambarkan produktivitas dan peranan industri dalam perekonomian Sulawesi Selatan masih rendah. Oleh karena itu pengembangan industri di Sulawesi Selatan masih perlu dipacu dan ditingkatkan, terutama industri yang mempunyai daya saing dan daya tumbuh yang tinggi.

Pada tabel dibawah ini disajikan data-data mengenai potensi dan trend perkembangan sektor industri (Industri Kecil, Aneka Industri, Industri Logam Dasar, serta Industri Kimia Dasar) baik dilihat dari kuantitas, daya serap tenaga kerja, maupun jumlah investasi yang ditanamkan.

Tabel 1.1. Potensi dan Trend Perkembangan Sektor Industri (Industri Kecil, Aneka Industri, Industri Logam Dasar, serta Industri Kimia Dasar) di Sulawesi Selatan, 1980-1985					
Kuantitas (Unit Usaha)					
Tahun	1980	1981	1982	1983	1984
Industri Kecil	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
Aneka Industri	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
Industri Logam Dasar	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
Industri Kimia Dasar	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
Jumlah	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
Daya Serap Tenaga Kerja (Orang)					
Tahun	1980	1981	1982	1983	1984
Industri Kecil	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
Aneka Industri	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
Industri Logam Dasar	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
Industri Kimia Dasar	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
Jumlah	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
Jumlah Investasi (Rp. Miliar)					
Tahun	1980	1981	1982	1983	1984
Industri Kecil	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
Aneka Industri	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
Industri Logam Dasar	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
Industri Kimia Dasar	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
Jumlah	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000

Tabel 3.6
Perkembangan Industri Daerah (Sulawesi Selatan)
Tahun 1992/1993 - 1995/1996

Aspek	Satuan	1993	1994	1995	1996
INDUSTRI KECIL					
a. Jumlah	UNIT	66.822	69.835	71.886	79.074
b. Tenaga Kerja	ORANG	206.834	214.198	224.378	246.816
c. Investasi	Rp. Juta	89.733	101.349	133.073	146.380
ANEKA INDUSTRI					
a. Jumlah	UNIT	189	196	213	234
b. Tenaga Kerja	ORANG	34.233	40.282	39.391	43.330
c. Investasi	Rp. Juta	452.835	549.437	8.320.135	9.152.149
INDUSTRI LOGAM DASAR					
a. Jumlah	UNIT	29	31	31	34
b. Tenaga Kerja	ORANG	808	1.225	2.223	2.445
c. Investasi	Rp. Juta	27.759	31.480	30.583	43.641
INDUSTRI KIMIA DASAR					
a. Jumlah	UNIT	50	51	52	60
b. Tenaga Kerja	ORANG	3.015	2.298	2.377	3.615
c. Investasi	Rp. Juta	320.618	321.017	342.106	376.317

Dari data di atas menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir perkembangan industri daerah di Sulsel

menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Pada tahun 1992 industri kecil berkembang dari 62.987 unit menjadi 79.074 unit dalam tahun 1996. Aneka industri dari 190 unit pada tahun 1992 menjadi 234 unit pada tahun 1996. Industri logam dasar dari 29 unit pada tahun 1992 menjadi 34 unit pada tahun 1996. Industri kimia dasar dari 49 unit pada tahun 1992 menjadi 60 unit pada tahun 1996. Dilihat dari aspek tenaga kerja dan investasi, sektor industri di Sulsel mengalami peningkatan yang berarti pula.

Sementara itu dalam sektor perdagangan, keadaan masing-masing daerah penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut.

Di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, nilai ekspor non migas selama tiga tahun Pelita VI mengalami peningkatan rata-rata sebesar 15,64 % pertahun. Nilai ekspor Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara tahun 1993 sebesar US\$ 2,22 milyar, meningkat menjadi US\$ 2,67 milyar pada tahun 1994 sebesar US\$ 3,10 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1996 US\$ 3,43 milyar. Nilai Impor juga mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,66 % pertahun, dimana pada tahun 1993 sebesar US\$ 0,95 milyar meningkat menjadi US\$ 1,09 milyar pada tahun 1996. Dengan demikian neraca perdagangan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara mengalami surplus rata-rata sebesar US\$ 2,04 milyar setiap tahunnya.

Disisi lain, volume ekspor Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan mengalami peningkatan sebesar 11,46 % pada tahun 1996 dari tahun 1995 tetapi nilainya mengalami penurunan sebesar 5,91 %. Hal ini berarti bahwa harga komoditi ekspor telah mengalami penurunan. Persentase ekspor terhadap PDRB rata-rata adalah sebesar 16,77 % sementara impor 4,37 %. Tabel berikut berisi 10 jenis komoditi andalan propinsi ini dari 69 jenis komoditi ekspor non migas.

Tabel 3.7

10 Komoditi Andalan Ekspor Propinsi Sumatera Selatan

No	Komoditi	Volume (kg)	Nilai (US\$)
1	Karet	296.881.637	431,323,835.70
2	Logam Timah	40.504.605	245,324,969.78
3	Kopi	46.285.600	110,581,337.8.
4	Kayu lapis	106.092.081	84,270,204.26
5	Urea	355.288.241	71,441,106.75
6	Lada	17.332.600	61,546,206.07
7	Finger Jointed	8.764.587	4,1967,541.82
8	Udang	1.915.100	20,155,379.69
9	CPO	28.295.941	16,904,320.08
10	Batubara	483.631.000	16,164,787.24

Sumber: Makalah Bappeda DT I Sumatera Selatan pada Lokakarya

Sedangkan total pertumbuhan ekspor dan impor Sumatera Selatan tahun 1990 - 1996 dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 3.8
Pertumbuhan Ekspor dan Impor Sumatera Selatan
(Periode 1989 – 1996)

Tahun	Ekspor	Impor
1990	-20,34	22,75
1991	10,35	-24,77
1992	0,88	152,90
1993	-0,74	-28,27
1994	30,45	-51,84
1995	37,24	8,48
1996	1,25	22,54

Sumber: Indikator Ekonomi Sumatera Selatan 1996

Keadaan ekonomi khususnya sektor industri dan perdagangan di Jawa Timur menunjukkan kinerja yang naik turun, terutama pada periode tahun 1994-1995 dilihat dari kriteria jumlah komoditi dan volumenya. Namun dilihat dari nilai produksinya, terus mengalami kenaikan secara berarti. Data ini memperlihatkan bahwa pembinaan usaha kecil perlu lebih diintensifkan, khususnya industri kerajinan dan rumah tangga (*home industry*), agar komoditi yang dikembangkan

tidak mati di tengah jalan. Secara lebih detail, keadaan industri di Jawa Timur terlihat pada tabel 3.9 berikut ini.

Tabel 3.9
Ekspor Hasil Industri Jawa Timur

Tahun	Jumlah Komoditi	Volume (Kg)	Nilai US \$
1992	758	2.123.148	2.341.291,00
1993	899	2.683.372	2.692.559,00
1994	813	2.704.552	2.899.205,00
1995	865	2.371.148	3.355.563,00
1996	992	2.836.355	3.700.042,00
Jumlah		12.718.575	14.988.600,00

Sumber : Kanwil Depperindag Jawa Timur

Keadaan dan kinerja perdagangan yang terjadi di Propinsi Sulawesi Selatan tidak berbeda jauh dengan daerah-daerah lain yang telah disebut diatas.

Dengan pembinaan yang telah dilakukan ternyata membawa pengaruh positif terhadap peningkatan nilai ekspor Sulawesi Selatan secara keseluruhan dalam 5 tahun terakhir, sebagaimana terlihat pada tabel 3.10 sebagai berikut. Sementara itu pada tabel 3.11 akan dapat digambarkan

perkembangan ekspor Sulawesi Selatan berdasarkan komoditi andalannya.

Tabel 3.10
Perkembangan Nilai Ekspor Sulawesi Selatan 1992-1996

Tahun	Nilai (000 US \$)	Pertumbuhan (%)
1992	401.813.245	-
1993	486.354.395	21,04
1994	560.445.223	15,23
1995	664.110.654	18,50
1996	876.384.324	32,00
RATA – RATA		21,70

Dari tahun 1992 sampai 1996 dicapai pertumbuhan rata-rata ekspor sebesar 21,70 %, yang meliputi sepuluh negara tujuan yaitu Jepang, Singapura, Amerika Serikat, Jerman, Hongkong, Belgia, India, Korea, Cina dan Taiwan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perdagangan luar negeri dari Sulawesi selatan sangat memiliki prospek sehingga dari akan lebih berperan di dalam distribusi anggaran Pembangunan daerah di samping dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.

Sedangkan perkembangan ekspor Sulawesi Selatan menurut komoditas andalannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.11
Perkembangan Ekspor Menurut Komoditas Di Sulsel
Tahun 1992 – 1996 (000 US\$)

Komoditas	1992	1993	1994	1995	1996	Pertumbuhan (%)
Nikel	160.813	133.602	201.301	284.993	364.422	31,25
Udang Segar	50.390	54.648	70.160	86.912	99.812	25,58
Kayu Lapis	28.048	23.061	19.681	18.866	19.877	(30,4)
Kakao	92.640	94.218	134.164	150.562	180.747	24,96
Mete Gelondongan	-	5.542	9.361	10.434	12.742	51,60
Karet	3.371	3.273	5.353	8.448	9.439	55,77
Dedak Gandum	6.013	6.450	5.240	8.449	9.444	16,24
Kepiting Hidup	1.874	3.533	5.008	7.110	9.412	71,25
Rotan Furniture	82.640	3.200	4.492	3.924	7.612	44,78

Dari data di atas terlihat bahwa komoditas ekspor andalan di Sulawesi Selatan pada tahun 1992 sampai tahun 1996 yang memiliki pertumbuhan mencapai lebih dari 50 % adalah kepiting hidup 71,75 %, mete gelondongan 51,77 %, karet 55 % komoditi yang bertumbuh di bawah 50 % seperti rotan furniture 44 %, nikel 31 %, dan komoditas yang bertumbuh di bawah 25 % meliputi udang segar 25 %, kakao 24,96 % dedak gandum 16 %, khusus untuk komoditi ekspor

kakao dari keseluruhan ekspor kakao Indonesia 70 berasal dari Sulawesi Selatan.

Adapun keadaan dan kinerja sektor perdagangan Sulawesi Utara dapat diamati dari volume eksportnya, dimana sampai dengan September 1997 berjumlah 283.404,00 ton. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 1996 yang berjumlah 242.344,00 ton, maka mengalami peningkatan sebesar 16,9 %. Sejalan dengan peningkatan volume ekspor, maka nilai ekspor turut mengalami peningkatan sebesar 4,25 % dari US \$ 149.609 juta pada tahun 1996 meningkat menjadi US \$ 155.966 juta pada tahun 1997. Hal ini dapat terwujud antara lain dengan adanya peningkatan diversifikasi pasar, membaiknya diversifikasi komoditas ekspor serta ditinjau dengan lembaga perbankan yang ada di daerah ini dalam mendorong ekspor non migas. Adapun jenis-jenis komoditi yang diekspor dari daerah ini adalah minyak kelapa, bungkil, ikan tuna, pala, fulli, dan vanilli.

Satu inidikator lagi dari kehidupan dan kinerja ekonomi daerah adalah sektor investasi. Ini merupakan sektor yang amat strategis dalam rangka memacu kehidupan atau dinamika industri dan perdagangan daerah yang bersangkutan. Bahkan sektor ini juga merupakan ladang yang sangat potensial sebagai sumber penghasil PAD. Oleh karena itu, pembinaan dalam sektor ini perlu dilakukan secara serius dengan orientasi kepada kelancaran prosedur perijinannya.

Adapun kinerja beberapa daerah penelitian dalam sektor investasi ini akan dijelaskan lebih lanjut pada paparan dibawah ini.

Perkembangan persetujuan PMDN di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara selama 3 tahun terakhir (1995-1997) terlihat cenderung mengalami kenaikan. Tahun 1995 yang disetujui sebanyak 27 proyek dengan nilai investasi Rp 1.730,6 milyar, tahun 1996 berjumlah 31 proyek dengan nilai investasi Rp 2.364 milyar dan pada tahun 1997 (sampai 31 Mei 1997) berjumlah 11 proyek dengan nilai investasi Rp 2.659,7 milyar.

Sedangkan perkembangan persetujuan PMA memperlihatkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1995 proyek-proyek yang disetujui sebanyak 19 proyek dengan nilai investasi US\$ 658,092 tahun 1996 sebanyak 20 proyek dengan nilai investasi US\$ 614,718 ribu dan pada tahun 1997 (sampai Mei 1997) berjumlah 7 proyek dengan nilai investasi US\$ 1.988,5 ribu.

Sementara itu di wilayah Propinsi Sumatera Selatan, investasi non PMA dan PMDN pada tahun 1994 sebesar Rp. 1.624 triliun meningkat menjadi Rp. 1,656 triliun pada tahun 1995. Berdasarkan DT II, investasi terbesar berada di Kodya Palembang disusul oleh Musi Banyu Asin dan Bangka. Adapun perkiraan investasi per sektor pada Pelita VI adalah : 26,1 % sektor pertanian, 14,2 % sektor industri, 29,9 % untuk sektor perdagangan.

Di Propinsi Jawa Timur, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam dua tahun terakhir tidak terlepas dari dukungan investasi yang berkembang pesat. Pada tahun 1994/1995 yang lalu target investasi sebesar Rp. 30,49 trilyun, sedangkan pada tahun 1995/1996 dari target sebesar Rp. 15,7 trilyun kita mendapat konfirmasi investasi sebesar Rp. 34,65 trilyun.

Dengan demikian sampai dengan pertengahan REPELITA VI, jumlah kumulatif investasi yang masuk telah mencapai Rp. 65,14 trilyun dari target total Rp. 85 trilyun. Dari angka perkembangan investasi tersebut yang paling menggembirakan adalah investasi masyarakat swasta mengambil porsi lebih dari 80% dari total investasi. Untuk PMDN total investasi yang disetujui selama empat tahun dari 1994 sampai dengan 1997 adalah Rp. 39.199.500.000.000 , -.

Di Propinsi Bali, kondisi dan kinerja investasi belum mencerminkan kemampuan yang merata diantara Daerah Tingkat II. Sebagaimana tertera pada tabel diawah, jumlah Investasi PMA dan PMDN di Propinsi Daerah Tingkat I Bali berdasarkan SPP/SP tahun 1994 – 1996 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Jumlah Investasi di Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Daerah Tingkat II	Jumlah Investasi	%
Badung	3.527,7 milyar	67,23 %
Denpasar	378,89 milyar	7,22 %
Tabanan	676,81 milyar	12,90 %
Gianyar	310,59 milyar	5,92 %
Buleleng	120,95 milyar	2,31 %
Klungkung	217,22 milyar	4,14 %
Karangasem	9,22 milyar	0,18 %
Jembrana	3,86 milyar	0,07 %
Bangli	1,20 milyar	0,02 %

Sumber :BAPPEDA Propinsi DT I Bali,1997.

Selanjutnya dapat dikemukakan kinerja dan keadaan investasi di Propinsi Sulawesi Selatan.

Investasi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dana swasta mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir ini. Pada TA. 1992/1993 investasi sebesar Rp. 447,12 milyar meningkat menjadi Rp. 2.563,19 milyar pada TA. 1996/1997. Atau dengan kata lain mengalami peningkatan rata-rata sebesar 54,74 % pertahun. Secara rinci perkembangan anggaran pembangunan daerah dan sektoral

pada TA. 1992/1993 sampai dengan 1996/1997, serta perkembangan komposisi investasi pemerintah dan swasta / masyarakat, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.13
Perkembangan Komposisi Antara Investasi Pemerintah
Dengan Swasta/Swadaya Masyarakat Periode 1992/1993 –
1996/1997 (Dalam Juta Rupiah)

Investasi Pembangunan	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97
I. Investasi Pemerintah	611.915	720.589	924.659	1.094.477	1.301.035
- APBN/SEKTORAL	244.073	257.357	392.431	462.313	584.877
- APBD TK. I	55.389	57.138	71.967	75.953	95.912
- APBD TK. II	312.453	406.094	460.261	556.211	620.246
II. Investasi Swasta	447.119	575.616	1.613.323	1.866.832	2.563.189
- PMA	2.440	27.460	62.211	2.226	139.396
- PMDN	74.960	360.100	666.248	318.140	680.661
- NON FASILITAS	369.719	188.056	884.864	1.546.466	1.743.132

Melihat data sebagaimana tertera pada tabel diatas, dapat dikatakan bahwa secara umum perkembangan investasi pembangunan di Sulawesi Selatan menunjukkan kinerja yang dari tahun ke tahun semakin membaik. Namun demikian, masih perlu di lakukan berbagai upaya untuk meningkatkan investasi pembangunan sesuai dengan target yang diharapkan sampai pada akhir Pelita VI ini, terutama dengan menggali potensi dana dari investasi swasta dan masyarakat.

Namun dari 23 Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, distribusi atau penyebaran investasi – baik asing maupun domestik – tidak merata. PMA hanya terjadi di 7 Daerah Tingkat II, sementara untuk PMDN, hanya Ujung Pandang, Pangkep, Maros dan Luwu yang memiliki peluang besar untuk berkembang.

Kesenjangan investasi antar regional tersebut selain disebabkan oleh potensi obyektif daerah yang bersangkutan juga dipengaruhi oleh keberadaan fasilitas pendukung (infrastruktur), serta ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai modal dasar berlangsungnya kegiatan investasi.

Dalam bentuk tabel, penyebaran atau distribusi investasi di seluruh Daerah Tingkat II se Sulawesi Selatan dapat disimak sebagai berikut.

Tabel 3.14
Rekapitulasi Distribusi Investasi di Sulawesi Selatan

No	Regency	Number of Projects		Investment Value		Man Power (person)			
		Dom. Inv.	For. Inv.	Million (Rp.)	Thousand (\$)	Domestic Inv.		Foreign Inv.	
						Dom.	For.	Dom.	For.
1	Maros	13 (7)	-	609.945,8	-	3.324	12	-	-
2	Pangkep	1 (6)	-	864.838,3	-	3.425	-	-	-
3	Barru	1 (2)	-	18.342,9	-	287	1	-	-
4	Pinrang	5	-	6.512,0	-	661	3	-	-
5	Polmas	3 (2)	-	16.856,4	-	2.277	10	-	-
6	Majene	2	-	16.918,5	-	-	-	-	-
7	Mamuju	11 (3)	-	257.142,4	-	6.023	26	-	-
8	Luwu	24 (3)	4 (2)	509.985,4	1.317.206,0	62.720	86	2.172	18
9	Tator	13 (2)	1	85.682,2	6.330,0	9.058	14	438	13
10	Enrekang	3 (1)	-	30.199,9	-	3.058	-	-	-
11	Sidrap	5 (2)	-	15.832,3	-	613	-	-	-
12	Soppeng	2	-	7.918,3	-	5.380	2	-	-
13	Wajo	4 (1)	-	55.709,7	-	1.880	-	-	-
14	Bone	6 (2)	-	72.703,2	-	7.721	7	-	-
15	Sinjai	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Bulukumba	(2)	1 (2)	11.948,1	2.615,5	300	-	1.400	-
17	Selayar	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Bantaeng	1	-	5.918,0	-	80	-	-	-
19	Jeneponto	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Takalar	5	1	50.548,0	70.591,2	1.837	7	-	-
21	Gowa	16 (5)	1 (1)	108.948,2	3.800,0	7.099	39	303	9
22	Pare-Pare	5 (1)	2	92.872,0	3.070.000,0	595	-	590	38
23	Uj. Pandang	91 (29)	21 (7)	1.438.604,6	918.603,1	19.538	433	2.037	57
Total		262 (67)	29 (12)	4.276.749,2	5.389.144,8	213.249	640	7.043	137

Akhirnya dapat dikemukakan mengenai kinerja sektor investasi di Propinsi Sulawesi Utara. Mengacu pada sumber pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp. 5 triliun selama Pelita VI Daerah dengan proporsi 60 % dari sektor swasta dan

40 % dari sektor pemerintah, maka posisi sampai tahun keempat (1997/1998) Pelita VI Daerah menunjukkan bahwa sumber pembiayaan yang dicapai kedua sektor tersebut sudah mencapai sebesar Rp. 4.618,8 trilyun atau sekitar 92,37 % dari total investasi yang dibutuhkan dalam Pelita VI daerah. Kontribusi terbesar masih bersumber dari sektor Pemerintah yang mencapai Rp. 2.050 trilyun atau sebesar 102,50 % dari target sebesar Rp. 2 trilyun. Sementara sektor swasta sudah mencapai 85,57 % atau sekitar Rp. 2,567 trilyun dari target sebesar Rp. 3 trilyun (berupa PMA/PMDN, non fasilitas dan Perbankan). Kondisi ini menunjukkan optimis rencana investasi Rp. 5 trilyun yang ditargetkan dalam Pelita VI daerah dapat tercapai..

B A B IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Tantangan dan Peluang

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa dalam rangka menghadapi era liberalisasi perdagangan dan investasi, daerah (baik tingkat I maupun tingkat II) selain menghadapi masalah-masalah yang berkenaan dengan aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia, juga menghadapi tantangan yang tidak ringan.

Tantangan disini merupakan suatu potensi hambatan, yang apabila dihadapi dengan sikap positif disertai kebijakan dan upaya-upaya konkrit untuk mengantisipasinya, maka tantangan tersebut akan dapat dirubah menjadi peluang bagi daerah yang bersangkutan untuk lebih mampu meningkatkan kinerja pembangunan (khususnya ekonomi) secara keseluruhan.

Pada umumnya, tantangan yang dihadapi oleh daerah berkisar pada ketersediaan sumber daya manusia yang secara kuantitatif sangat besar namun secara kualitatif – terutama dalam penguasaan teknologi tinggi – masih rendah. Disamping itu, mutu dan daya saing produk lokal relatif masih lemah dibanding dengan produk luar negeri yang masuk ke

pasaran dalam negeri. Namun hal ini tidak semata-mata disebabkan ketidakmampuan sumber daya manusia dalam negeri, melainkan terkait juga dengan faktor-faktor penentunya, seperti pembinaan pemerintah yang kurang optimal, pemasyarakatan dan penerapan teknologi produksi yang tepat guna belum merata, manajemen perusahaan (kecil) yang belum mantap, dan sebagainya.

Adapun beberapa tantangan yang dihadapi oleh daerah selengkapnyanya dipaparkan sebagai berikut.

1. Tantangan

- a. Pembangunan akan memerlukan banyak sekali tenaga ahli yang profesional, terutama di Daerah Tingkat II sebagai ujung tombak dari pembangunan nasional kita. Dengan demikian tantangan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan jumlah masyarakat terdidik, baik melalui pengiriman mahasiswa ke luar negeri, memperbanyak sarana pendidikan serta penyempurnaan kurikulum pendidikan.
- b. Tingkat pendidikan masyarakat masih relatif rendah, masih besarnya angka buta huruf, belum tersebarunya sumber daya manusia yang memiliki kapasitas profesional di seluruh Daerah Tingkat II. Dalam hal ini pemerintah dihadapkan kepada konsistensi kebijakan wajib belajar sembilan tahun.

- c. Kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi masih sedikit, hal ini ditunjukkan dengan angka dibawah 10% dari seluruh penduduk di Indonesia yang berjumlah 200 juta jiwa lebih. Ini mengisyaratkan perlunya pemerintah semakin serius dalam program pengkajian dan penerapan teknologi.
- d. Meningkatkan daya saing produk daerah sehingga mampu bersaing dengan produk impor dipasar dalam dan luar negeri. Produk daerah akan menghadapi persaingan lebih besar terhadap produk luar negeri baik dari segi harga, mutu, jenis maupun pelayanan.
- e. Mewujudkan lapisan pedagang menengah, kecil dan informal yang semakin berperan dalam perekonomian daerah. Dalam perkembangan sektor perdagangan yang pesat tampak bahwa pedagang skala besar dan kuat yang jumlahnya sedikit, dapat lebih memanfaatkan peluang usaha dalam berbagai kegiatan perdagangan seperti usaha distribusi, agen, dan perdagangan eceran, dibandingkan dengan pedagang skala kecil dan lemah yang jumlahnya besar. Keadaan demikian kurang mendukung upaya membangun struktur dunia usaha yang kukuh dan tangguh yang dapat menjadi andalam bagi pertumbuhan yang cepat.
- f. Memantapkan pasar tradisional dan meningkatkan penerobosan pasar baru yang potensial, terutama di

kawasan Asia Pasific dan memperluas basis komoditas ekspor dari Kodya Bogor. Selama PJP I perkembangan ekspor nonmigas dicirikan oleh dua hal yaitu meskipun negara tujuan ekspor meluas. Besarnya ekspor masih terpusat dibeberapa negara saja, dan meskipun macam dan jenis komoditas nonmigas makin beragam, basis ekspor masih terpusat pada beberapa komoditas saja, yaitu komoditas dari sektor industri yang berupa ban kendaraan bermotor (PT. Good Year).

- g. Dengan akan berlakunya liberalisasi perdagangan dan investasi dituntut adanya pelayanan yang semakin baik (kondusif), sehingga untuk itu diperlukan adanya kepastian hukum dalam berusaha, pelayanan perizinan yang cepat dan tepat, serta transparan tentang biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pelayanan perizinan.

2. Peluang

- a. Jumlah penduduk yang cukup besar dan terus meningkat dengan tingkat kesejahteraan yang makin tinggi, serta pertumbuhan diberbagai sektor yang meningkat pula memberikan peluang bagi peningkatan perdagangan (produk) daerah untuk dapat bersaing dengan produk dari daerah lainnya, terutama dari produk eks-luar negeri yang masuk.

- c. Kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi masih sedikit, hal ini ditunjukkan dengan angka dibawah 10% dari seluruh penduduk di Indonesia yang berjumlah 200 juta jiwa lebih. Ini mengisyaratkan perlunya pemerintah semakin serius dalam program pengkajian dan penerapan teknologi.
- d. Meningkatkan daya saing produk daerah sehingga mampu bersaing dengan produk impor dipasar dalam dan luar negeri. Produk daerah akan menghadapi persaingan lebih besar terhadap produk luar negeri baik dari segi harga, mutu, jenis maupun pelayanan.
- e. Mewujudkan lapisan pedagang menengah, kecil dan informal yang semakin berperan dalam perekonomian daerah. Dalam perkembangan sektor perdagangan yang pesat tampak bahwa pedagang skala besar dan kuat yang jumlahnya sedikit, dapat lebih memanfaatkan peluang usaha dalam berbagai kegiatan perdagangan seperti usaha distribusi, agen, dan perdagangan eceran, dibandingkan dengan pedagang skala kecil dan lemah yang jumlahnya besar. Keadaan demikian kurang mendukung upaya membangun struktur dunia usaha yang kukuh dan tangguh yang dapat menjadi andal bagi pertumbuhan yang cepat.
- f. Memantapkan pasar tradisional dan meningkatkan penerobosan pasar baru yang potensial, terutama di

kawasan Asia Pasific dan memperluas basis komoditas ekspor dari Kodya Bogor. Selama PJP I perkembangan ekspor nonmigas dicirikan oleh dua hal yaitu meskipun negara tujuan ekspor meluas. Besarnya ekspor masih terpusat dibeberapa negara saja, dan meskipun macam dan jenis komoditas nonmigas makin beragam, basis ekspor masih terpusat pada beberapa komoditas saja, yaitu komoditas dari sektor industri yang berupa ban kendaraan bermotor (PT. Good Year).

- g. Dengan akan berlakunya liberalisasi perdagangan dan investasi dituntut adanya pelayanan yang semakin baik (kondusif), sehingga untuk itu diperlukan adanya kepastian hukum dalam berusaha, pelayanan perizinan yang cepat dan tepat, serta transparan tentang biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pelayanan perizinan.

2. Peluang

- a. Jumlah penduduk yang cukup besar dan terus meningkat dengan tingkat kesejahteraan yang makin tinggi, serta pertumbuhan diberbagai sektor yang meningkat pula memberikan peluang bagi peningkatan perdagangan (produk) daerah untuk dapat bersaing dengan produk dari daerah lainnya, terutama dari produk eks-luar negeri yang masuk.

- b. Pasar Internasional cenderung makin terbuka. Pasar di kawasan Asia Pasifik terutama memberi peluang besar untuk berkembang. Kerjasama ASEAN yang makin meningkat dengan kawasan bebas ASEAN (ASEAN free trade Area, AFTA) juga merupakan peluang. Dengan ditunjang oleh makin efisiensi sistem perdagangan di daerah, berbagai hal itu merupakan peluang bagi pengembangan perdagangan luar negeri dalam PJP II.
- c. Tekad pemerintah untuk terus menggulirkan deregulasi dan debirokratisasi sektor riil dan moneter, gencarnya Departemen Dalam Negeri untuk mempercepat pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab (titik berat otonomi di Dati II), serta adanya rencana reformasi struktural oleh pemerintah sebagai akibat dari krisis moneter akhir-akhir ini (termasuk usulan MENPAN untuk melakukan pemangkasan birokrasi dan perampingan struktur organisasi Departemen / Non Departemen), merupakan peluang bagi pemantapan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berkaitan dengan investasi melalui pemberian pelimpahan wewenang yang lebih besar kepada Daerah.
- d. Disamping peluang-peluang diatas, masih terdapat faktor-faktor yang mendukung terbukanya peluang investasi di dalam negeri antara lain tersedianya sumber daya alam, sumber daya manusia yang cukup, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta adanya tekad pemerintah untuk

terus menerus melakukan deregulasi dan debirokratisasi di berbagai sektor.

Peluang-peluang tersebut perlu diarahkan kepada bidang-bidang usaha yang mempunyai peluang tinggi untuk berkembang dan memiliki potensi daya saing yang cukup kuat. Dalam hal ini, bidang usaha yang layak dikembangkan adalah bidang-bidang yang memanfaatkan bahan baku lokal dan berorientasi ekspor seperti : agroindustri, barang-barang kerajinan, industri barang jadi dari kayu, dan sebagainya. Sementara itu disektor jasa telah terbuka usaha-usaha baru untuk investasi yang tidak memerlukan dana besar tetapi mengandalkan modal SDM, seperti jasa konsultasi dan jasa-jasa penunjang di bidang industri, perhubungan, kesehatan, energi, dan sebagainya.

B. Permasalahan yang Dihadapi Daerah Tingkat II Dalam Menghadapi Era Globalisasi

Seperti telah disinggung diatas, tantangan dan sekaligus permasalahan pokok yang dihadapi oleh Daerah Tingkat II dalam era globalisasi perdagangan dan investasi adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kurang mendukung – terutama dari aspek pendidikan, daya saing dan kualitas hidupnya.

Disamping itu, aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan yang cukup penting untuk segera dipecahkan.

Keempat aspek permasalahan ini dihadapi baik oleh sektor industri, perdagangan maupun investasi di daerah. Dalam sektor industri dan perdagangan misalnya, lemahnya daya saing produk di pasaran internasional, atau lemahnya peranan pengusaha kecil dalam sektor ekonomi, atau masih lemahnya daya saing komoditas ekspor karena tingkat mutu belum sesuai dengan standar internasional, merupakan perwujudan dari rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Daerah Tingkat II.

Contoh lain seperti kurangnya promosi produk dan potensi daerah, adanya pembatasan terhadap produk negara berkembang yang kurang memperhatikan lingkungan seperti adanya ISO 14000, terbatasnya jumlah industri besar dan menengah baik jumlah maupun ragam produk yang dihasilkan, dan sebagainya merupakan pencerminan dari kurang berfungsinya secara maksimal kelembagaan industri dan perdagangan yang dimiliki oleh Daerah Tingkat II.

Sementara itu adanya penciutan diversifikasi produk ekspor merupakan kecenderungan yang kurang baik karena akan mempertinggi resiko bagi penerimaan ekspor non migas. Selain itu, munculnya persaingan dagang yang tajam antara hasil produksi unggulan daerah atau regional dengan produk

produk impor terutama barang barang kebutuhan konsumsi, dengan kecenderungan kalahnya produk lokal, merupakan isyarat tentang lemahnya ketatalaksanaan dalam sektor industri dan perdagangan di Daerah Tingkat II.

Berbagai permasalahan ini sendiri timbul disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Kurang siapnya masyarakat secara mental untuk menghadapi globalisasi, terlebih lagi jika dilihat dari sisi kebutuhan konsumsi dengan ditawarkannya produk sejenis dengan harga bersaing.
- b. Kurangnya sarana dan lembaga pemasaran untuk meningkatkan daya saing hasil produksi lokal.
- c. Kurangnya dipenuhi persyaratan perdagangan, seperti kemasan, bahan baku yang memenuhi persyaratan *eco labelling* dan lain sebagainya.
- d. Masih rendahnya kualitas teknologi yang dipergunakan, teknologi yang ada hanyalah sebatas teknologi tepat guna, yang lebih menitikberatkan pada adanya penyerapan tenaga kerja yang lebih besar.
- e. Khususnya untuk kalangan industri kecil dan perusahaan kecil, masalah yang dihadapi biasanya disebabkan oleh orientasi mereka yang pada umumnya melaksanakan produksi dengan berdasarkan pada apa yang mampu dibuat, bukan berdasarkan apa yang laku atau dibutuhkan

di pasar. Hal ini mengakibatkan komoditas yang diproduksi tidak sesuai dengan permintaan pasar, baik aspek ukuran, warna, kualitas, kemiripan dan sebagainya.

Sementara itu dibidang atau sektor investasi, permasalahan pokok yang dihadapi biasanya menyangkut prosedur dan mekanisme perijinan, atau masalah ketatalaksanaan. Sebagai contoh, persetujuan PMA tanpa kecuali harus memperoleh persetujuan dari Presiden. Hal ini mengandung arti bahwa sebesar atau sejumlah berapapun harus dengan persetujuan Presiden setelah permohonan tersebut disampaikan melalui BKPM. Sedangkan untuk PMDN, izin prinsip diperoleh dari Meninves / Ketua BKPM. Ketentuan yang demikian sedikit banyak telah menghambat atau memperlambat proses investasi di suatu daerah.

Disamping itu, kondisi dan potensi Daerah Tingkat II yang kurang homogen, juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi iklim investasi di suatu daerah. Artinya, adanya perbedaan kondisi ini baik dilihat dari letak geografis, topografi maupun dari tingkat kesuburan tanahnya merupakan salah satu kendala kurang meratanya sektor investasi. Berdasarkan pertimbangan investor, kondisi daerah ini biasana merupakan salah satu daya tarik yang cukup besar bagi para investor.

Adapun masalah-masalah yang dihadapi oleh Daerah Tingkat II dalam era liberalisasi perdagangan dan investasi

dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana, secara detail dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Aspek Kelembagaan

- a. Kelembagaan yang secara khusus menangani masalah investasi terutama PMA/PMDN yang diatur secara khusus (*lex specialis*) di Daerah Tingkat II, belum ada. Hal ini menyebabkan penanganan pelaksanaan investasi (koordinasi perizinan, pengendalian dan pengawasannya) menjadi kurang jelas.
- b. Terjadinya tumpang tindih antar kepentingan diberbagai sektor, hal ini tercermin dari banyaknya instansi yang menangani dari suatu sektor yang masing-masing mengeluarkan kebijakan-kebijakan pengaturannya dengan catatan tidak sedikit dari peraturan tersebut saling mementingkan sektornya sendiri-sendiri.
- c. Lemahnya permodalan industri kecil dan rumah tangga padahal jenis industri ini merupakan kelompok yang diunggulkan baik dalam kaitannya dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, dalam kaitan dengan penyerapan tenaga kerja maupun kaitan dengan meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu harus ada

- peningkatan nilai tambah, efisiensi dan produktivitas usaha.
- d. Usaha membina kemitraan dengan industri besar yang sedang dihadapkan pada hambatan kaitan jenis usaha industri besar dan sedang yang ada. Masalah ini terutama ditemukan di Kodya Bogor.
 - e. Belum terdapatnya suatu persepsi yang sama antar Daerah Tingkat II dalam satu wilayah Propinsi, atau antar pejabat dalam satu Daerah Tingkat II terhadap visi investasi pada masa yang akan datang.

2. Aspek Ketatalaksanaan

- a. Lemahnya manajemen usaha yang terkait dengan aspek sumber daya manusianya, yaitu masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparat pembina, disamping belum dilaksanakannya kursus-kursus manajemen terutama bagi pengusaha kecil.
- b. Pola kerjasama antara instansi-instansi pembina, badan-badan asosiasi dan pengusaha tersebut bersaing tidak sehat dalam produksi maupun pemasarannya.
- c. Prosedur ekspor yang berlaku belum sepenuhnya mampu mendukung secara efektif kelancaran ekspor. Oleh karena itu, dalam hal ini menjadi masalah juga mengenai belum

mantapnya kesinambungan penyediaan barang oleh para produsen mengurangi kepercayaan pembeli.

- d. Masalah Perijinan. Salah satu keluhan yang paling sering muncul dari para pengusaha/Investor baik dalam maupun luar negeri adalah kesulitan dalam proses perijinan. Dengan dikeluarkannya pakto 1993 yang memberikan kewenangan pada Daerah Tingkat II untuk mengeluarkan ijin-ijin daerah seperti IMB, Ijin Lokasi dan IUUG/HO, para pengusaha sering menganggap sebagai penambahan birokrasi, karena keseluruhan ijin tersebut yang diperlukan tidak dapat diselesaikan secara terpadu, serta regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat pun cukup memberatkan baik para investor daerah maupun investor asing. Selain itu kebijaksanaan pemerintah pusat masih terlalu mengikat dan prosedural, yang sebaiknya diserahkan baik kepada Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II, sehingga proses penyelesaian ijin tidak memerlukan biaya tinggi.

Kesulitan dalam pengurusan perizinan ini dapat dikategorikan dalam 3 kelompok :

- Kurang pahamnya investor dalam mekanisme pengurusan perizinan (mungkin disebabkan kurangnya penyebaran informasi prosedur pelayanan perizinan).
- Adanya persyaratan tambahan dari Daerah Tingkat II (diberlakukannya izin prinsip dari Bupati).

- Pengurusan perizinan harus melalui banyak pintu (II, oleh Kantor Pertahanan, IMB oleh Dinas PU Cipta Karya/Dinas Tata Kota, dan IUUG/HO oleh Sekwilda Tingkat II c.q. Bagian Perekonomian).
- c. Penjabaran / penyesuaian PERDA sebagai akibat deregulasi, tidak dapat berjalan sesuai dengan semangat deregulasi karena adanya berbagai keterbatasan (pengetahuan, dana, kepentingan PAD dan sebagainya). Masih banyaknya peraturan daerah yang belum disesuaikan dengan ketentuan peraturan pelaksanaan investasi sebagai akibat deregulasi. Hal ini menyebabkan kerancuan penerapan peraturan dalam realisasi persetujuan investasi PMA/PMDN (tidak sejalan dengan aturan main secara nasional) sebagai contoh tentang izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie). Dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 1987 (PAKDES 1987) disebutkan bahwa Ijin HO berlaku selama perusahaan masih berjalan dan untuk kepentingan pengawasan setiap lima tahun diwajibkan melakukan pendaftaran kembali dengan dikenakan leges. Pada kenyataannya sesuai PERDA yang masih berlaku sampai saat ini Ijin HO berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang. Bahkan ada Dati II yang menerapkan Ijin HO sementara yang masa berlakunya hanya satu tahun. Hal ini dapat dimaklumi karena Ijin HO merupakan salah satu sumber PAD.

f. Prosedur dan mekanisme pemberian persetujuan investasi yang masih sentralisasi (ada di tingkat pusat) dan tidak melibatkan daerah (Tingkat I / Tingkat II) dalam pertimbangan pemberian persetujuan investasi. Pada kenyataannya daerah sebagai tempat rencana lokasi proyek lebih tahu tentang kondisi di daerah. Tidak adanya rekomendasi dari daerah (baik Gubernur KDH Tingkat I maupun Bupati / Walikota/Kabupaten KDH Tingkat II), menyebabkan ada rencana investasi PMA / PMDN yang telah disetujui oleh pemerintah pusat tidak dapat di realisasikan di daerah, karena tidak tersedianya lokasi yang sesuai dengan keinginan investor sebagai akibat tidak sesuainya lokasi yang diminta dengan tata ruang. Juga bisa disebabkan karena tidak tersedianya lahan yang luas sesuai rencana investor. Tidak adanya rekomendasi dari daerah juga disinyalir mengakibatkan diperjual-belikannya Surat Persetujuan Penanaman Modal yang telah diberikan oleh Pemerintah oleh sementara oknum yang tidak bertanggung-jawab.

Dalam merealisasi rencana investasi yang tidak disetujui oleh pemerintah pusat, keterlibatan Daerah Tingkat II hanya dalam mengeluarkan Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan dan Izin UU Gangguan / HO. Pada kenyataannya juga pemberian Izin Lokasi oleh Instansi Kantor Pertanahan Tingkat II juga dirasakan kurang pas karena:

- Izin Lokasi merupakan produk kebijaksanaan, bukan teknis pertanahan;
 - Izin Lokasi diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya yang di sahkan dengan PERDA Tingkat II, sudah selayaknya merupakan wewenang Daerah Tingkat II.
 - Biaya yang dipungut sebabagai akibat penerbitan Izin Lokasi masuk ke Kantor Pertanahan, bukan masuk ke kas Daerah Tingkat II sebagai sumber PAD secara utuh.
 - Bila terjadi konflik sebagai akibat penerbitan Izin Lokasi yang pada umumnya diikuti oleh pembebasan/pembelian tanah, Kantor Pertanahan Tingkat II tidak mampu menyelesaikannya dan menjadi tugas dan tanggung jawab Daerah Tingkat II.
- g. Perangkat lunak (peraturan perundang-undangan) pendukung kegiatan investasi dirasakan masih kurang menunjang dalam penerapannya.

3. Aspek Sumber Daya Manusia

- a. Pembinaan sumber daya manusia dan penyebarluasan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keunggulan industri kecil dan rumah tangga, dengan menggunakan secara optimal lembaga

penelitian yang ada di daerah, masih dihadapkan kepada hambatan lemahnya proses koordinasi dan integrasi program.

- b. Mutu sumberdaya manusia yang masih rendah antara lain rendahnya kemampuan dan keterampilan manajemen usaha dan organisasi.
- c. Masih relatif rendahnya mutu sumber daya manusia yang terdapat di bidang ekspor sehingga mempersulit upaya meningkatkan adaptasi dan pemanfaatan teknologi baru yang terkait dengan proses menghasilkan barang ekspor maupun yang terkait dengan komoditas itu sendiri.
- d. Kurangnya wawasan dan pengetahuan tentang investasi khususnya investasi PMA / PMDN yang mengakibatkan kurang siapnya aparat dalam menghadapi investor. Kerancuan dalam menerapkan peraturan yang dipakai sebagai dasar untuk menerbitkan izin dalam pelaksanaan investasi, menyebabkan pelayanan perijinan menjadi terhambat, bertele-tele, munculnya persyaratan tambahan dan lain sebagainya. Secara kejiwaan aparat pemerintah Dati II lebih mengacu pada PERDA Tingkat II, karena instrumen ini merupakan "*guidance*" (pedoman) mereka dalam menerbitkan perijinan, disamping ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bupati / Walikota/Kabupaten KDH Tingkat II. Hal inipun masih dapat dimaklumi karena penyebaran informasi, diseminasi /

sosialisasi / ketentuan / prosedur / tatacara penanaman modal PMA / PMDN masih sangat kurang diberikan kepada aparatur pemerintah Daerah Tingkat II. Kursus-kursus yang berkaitan dengan penanaman modal yang dilaksanakan oleh Kantor Meninves / BKPM jarang sekali mengundang / mengikutsertakan peserta dari Daerah Tingkat II.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- a. Keterbatasan lahan dan karakteristik sebagai perkotaan yang tidak sesuai dengan pengembangan unit usaha industri besar dan menengah. Dalam hal ini, diperlukan upaya untuk menata lokasi usaha industri, sehingga diharapkan proses pembinaan lebih efisien dan efektif.
- b. Keterbatasan ruang yang strategis untuk pengembangan pusat lokasi perdagangan; konflik antara kepentingan pengaturan tata kota seperti kebersihan, keindahan dan kelancaran lalu lintas dengan kepentingan pedagang akan tempat yang strategis.
- c. Disamping itu, para investor menemui kesulitan dalam mencari lokasi yang strategis, dimana hal ini disebabkan oleh:

- Belum tersedianya rencana detail / teknis tata ruang, sebagai penjabaran kebijakan dalam RTRW (rencana tata ruang wilayah)
 - Lokasi-lokasi tertentu yang sesuai dengan persyaratan industri, harga tanah yang berlaku sudah terlalu mahal dan tidak terjangkau untuk skala industri.
 - Belum tersedianya lokasi /kawasan siap bangun (kawasan industri)
- d. Pengetahuan konsumen yang belum memadai atas barang dan jasa yang beredar dipasaran dan masih terbatasnya pelayanan informasi harga dan pelayanan lainnya seperti metrologi juga merupakan hambatan dalam pembangunan perdagangan, khususnya di Kodya Bogor.
- e. Tidak dimilikinya data base di Daerah Tingkat II, hal ini menyulitkan untuk mendapatkan gambaran potensi keadaan Dati II yang bersangkutan, yang berarti juga akan menyulitkan lagi bagi investor atau pengambilan keputusan untuk membuat rancangan program aplikasi.
- f. Terbatasnya transportasi, komunikasi, energi, air bersih dan pasar.
- g. Terbatasnya dana baik dari investor maupun dari Pemda sendiri.

C. Dampak Liberalisasi Perdagangan dan Investasi terhadap Kinerja Daerah Tingkat II

Liberalisasi perdagangan dan investasi yang akan menyentuh sampai kedaerah memang baru berlaku pada tahun 2003 (untuk lingkup ASEAN) atau tahun 2020 (untuk lingkup Asia Pasifik). Namun dampak yang ditimbulkannya sudah mulai terasa sejak sekarang. Oleh karena itu, kesiapan pemerintah Daerah Tingkat II sesungguhnya dapat dikatakan terlambat jika baru dimulai sekarang. Artinya, saat ini – menjelang berlakunya perdagangan bebas – pemerintah dan masyarakat hendaknya telah memiliki kesiapan yang cukup baik, sehingga pada saat berlakunya perdagangan bebas tersebut bangsa Indonesia telah mampu untuk bersaing sesuai dengan kaidah-kaidah dan kesepakatan global.

Beberapa dampak yang perlu diwaspadai dan atau diantisipasi antara lain adalah :

1. Pengakomodasian modal dan tenaga kerja asing.

Paparan pada bab-bab sebelumnya telah menjelaskan bahwa globalisasi berarti terjadinya hubungan langsung, keterkaitan serta persaingan antar bangsa. Ini berarti bahwa suatu bangsa tidak dapat menolak atau membatasi arus modal dan tenaga kerja dari negara lain yang akan masuk ke negara yang bersangkutan. Terjadinya pertemuan modal dan tenaga kerja antar negara dalam satu

tempat dan satu waktu ini secara tidak langsung akan memberlakukan hukum *survival of the fittest*. Kondisi ini telah terlihat juga di daerah-daerah yang diteliti, bahwa meskipun tingkat pengangguran cukup tinggi, namun penyerapan tenaga kerja asing (khususnya untuk industri dengan fasilitas PMA) masih relatif dominan. Dengan kata lain, globalisasi perekonomian dunia pada hakekatnya dapat mendorong terjadinya pengangguran apabila sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu bangsa tidak memiliki keunggulan kompetitif.

Dalam keadaan seperti ini, maka pemerintah Daerah Tingkat II dapat dikatakan menghadapi dilema, apakah akan mengakomodasikan sebanyak mungkin tenaga kerja asing sebagai konsekuensi dari globalisasi, ataukah lebih mementingkan penyaluran dan penempatan tenaga kerja domestik terlebih dahulu ?

Yang jelas adalah bahwa masuknya modal dan tenaga kerja asing tidak bisa dihalangi, dan oleh karenanya harus dimanfaatkan sebagai partner tenaga kerja domestik, dan sekaligus sebagai wahana untuk menyerap teknologi yang mereka bawa (alih teknologi).

2. Regulasi ditengah tuntutan deregulasi dan debirokratisasi.

Dalam era globalisasi terdapat konsekuensi juga berupa tuntutan untuk lebih menyederhanakan berbagai prosedur,

tata laksana, tata kerja maupun tata hubungan kerja. Disamping itu, peraturan-peraturan yang menyebabkan beban masyarakat menjadi lebih berat dan atau menyebabkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*), perlu dikurangi atau dihilangkan.

Sebagai contoh, pada tahun 1997 telah terbit UU Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan retribusi Daerah, yang menghapus beberapa jenis pajak dan retribusi daerah yang selama ini dipungut. Lahirnya UU ini tentu sangat bersesuaian dengan jiwa dan hakikat perdagangan bebas. Namun disisi lain menyebabkan daerah menjadi berkurang sumber pendapatannya, terlebih lagi Daerah Tingkat II yang bukan merupakan ibukota Propinsi serta relatif kurang berkembang.

Disini pemerintah kembali dihadapkan kepada dilema, apakah akan meneruskan kebijakan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pungutan (pajak maupun retribusi) ataukah mengurangi beban masyarakat dan para pelaku ekonomi dengan resiko berkurangnya kemampuan keuangan daerah ? Untuk itu, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh seluruh jajaran pemerintah Daerah Tingkat II adalah dengan membudayakan dan atau mentransformasikan semangat kewirausahaan (*entrepreneurship*) kedalam sektor publik. Dengan jiwa wira usaha ini, pemerintah tidak semata-mata berorientasi kepada

pengeluaran atau pembelanjaan, tetapi lebih kepada bagaimana menghasilkan.

3. Peningkatan daya saing organisasi Daerah Tingkat II.

Keunggulan daya saing atau bersaing dalam menghadapi liberalisasi perdagangan tidak hanya dibutuhkan oleh manusia dalam arti kata individual, namun dalam konteks organisasional-pun perlu memiliki daya saing yang cukup kuat.

Daya saing organisasi yang kuat selain dibentuk oleh manusia pendukungnya, juga oleh kualitas produk barang dan jasa yang dihasilkan, serta sejauhmana organisasi tersebut memiliki kewenangan atau kebebasan untuk menentukan suatu kebijaksanaan tertentu (khusus organisasi publik). Sebagai contoh, Daerah Tingkat II tidak akan dapat menentukan kebijaksanaan dalam bidang tertentu secara cepat dan tepat dalam rangka mengatasi suatu permasalahan, jika pemerintah Pusat atau Daerah Tingkat I tidak menyerahkan kewenangan tentang hal tersebut.

Dengan demikian, peningkatan daya saing organisasi Daerah Tingkat II antara lain akan sangat tergantung pula kepada *political will* pemerintah Pusat atau Daerah Tingkat I dalam memberdayakan dan menitikberatkan otonomi kepada Daerah Tingkat II secara konsekuen.

4. Rasionalisasi dan efisiensi dalam bidang kelembagaan dan kepegawaian.

Satu konsekuensi logis lagi dari berlakunya era liberalisasi perdagangan bebas dan investasi adalah perlunya suatu organisasi melakukan rasionalisasi dan atau efisiensi dalam segala bidang yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut.

Dari segi struktur organisasi, kondisi yang diyakini tepat untuk menghadapi persaingan global adalah organisasi yang datar (*flat*), jenjang hierarkhi atau rantai komando yang pendek, serta memperbanyak tenaga-tenaga fungsional. Sedangkan dari segi ketatalaksanaan dan sumber daya manusia, telah dijelaskan pada bagian atas bab ini.

Perlu diperhatikan disini bahwa rasionalisasi atau efisiensi sering identik dengan pengurangan tenaga kerja maupun pembatasan atau pengetatan anggaran. Dalam hal ini, perlu dikaji secara mendalam apakah efisiensi tersebut selalu signifikan terhadap peningkatan produktivitas organisasi. Sebab sebagaimana kasus Korea Selatan, program efisiensi nasional ternyata justru berakibat pada macetnya laju perkembangan perekonomian negara, sehingga program efisiensi tersebut akhirnya dicabut kembali.

5. Penundaan program-program pembangunan daerah karena pembatalan investasi.

Dengan terjadinya krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia dewasa ini, nilai tukar rupiah menjadi sedemikian merosot terhadap US dollar. Sementara itu arus industri, perdagangan dan investasi banyak dilakukan dalam standar dollar. Akibatnya, banyak investor dan para pelaku ekonomi lain yang menangguk rencana ekspansi usaha, bahkan sebagian diantaranya terpaksa menutup usahanya karena bangkrut.

Dalam kondisi seperti itu, pemerintah Daerah Tingkat II tidak dapat berdiam diri dengan mengharap krisis segera berlalu, namun harus mencari peluang-peluang dan terobosan agar fungsi penyelenggaraan kesejahteraan dan pelayanan umum tetap dapat dijalankan secara optimal.

Dampak-dampak yang ditimbulkan dari berlangsungnya era perdagangan dan investasi bebas seperti dijelaskan diatas, secara langsung akan mempengaruhi kinerja kebijakan pemerintah Daerah Tingkat II. Artinya, kebijakan yang akan dirumuskan hendaklah memperhatikan aspek-aspek tersebut dengan diiringi langkah-langkah nyata untuk mengatasi dampak yang kemungkinan muncul dari penetapan kebijakan tersebut.

D. Prospek Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Umum di Daerah Tingkat II pada Era Globalisasi

Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi pada aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana sebagaimana dikemukakan diatas, serta meskipun daerah-daerah di Indonesia sedang dilanda krisis moneter, bukan berarti tidak ada prospek pengembangan sama sekali di bidang ekonomi.

Dalam kaitan ini, kita dapat merujuk kepada laporan Bank Dunia dalam "*Global Economis Prospect 1997*", yang menyatakan bahwa Indonesia bersama-sama dengan 4 negara sedang membangun lainnya (China, India, Brazil, dan Rusia) diperkirakan akan menjadi pelaku ekonomi kunci di dunia dalam seperempat abad (25 tahun) yang akan datang.

Sedangkan menurut *World Economic Forum* bulan Juni 1997 yang disusun berdasarkan survay terhadap perusahaan-perusahaan di seluruh dunia menyatakan bahwa peringkat daya saing Indonesia telah melonjak cukup tajam, dari peringkat 30 pada tahun 1996 menjadi peringkat 15 (dalam tahun 1997).

Dengan akan berlakunya liberalisasi perdagangan dan investasi membuat semakin terbukanya peluang pasar bagi barang / produk kita ke negara lain, sehingga akan meningkatkan ekspor non-migas Indonesia, selain memberi

peluang bagi masuknya aliran modal asing langsung (*Foreign Direct Investment* : FDI) dari suatu negara ke negara lain.

Tugas-tugas umum pemerintahan yang semakin luas dan kompleks, diselenggarakan dengan tingkat kecepatan yang tinggi merupakan suatu akibat dari era globalisasi yang menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan, sebagai konsekuensinya mengharuskan adanya suatu kinerja pemerintah daerah yang lebih kreatif, inovatif dengan responsibilitas yang tinggi.

Dengan acuan ini, maka prospek Daerah Tingkat II dalam menghadapi era liberalisasi perdagangan dan investasi cukup optimis mengingat potensi dan kondisi yang ada relatif stabil dan terus meningkat.

Beberapa keunggulan atau kekuatan yang dimiliki Daerah dalam menghadapi situasi perekonomian global, sekaligus mengeliminasi kelemahan yang ada antara lain adalah sebagai berikut:

1. Adanya keunggulan komparatif produk dari masing-masing Daerah Tingkat II, disamping keberadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang relatif lebih murah, sehingga cukup untuk membuat berbagai macam produk dengan sumber-sumber yang relatif cukup murah, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing produk lebih kompetitif dipasaran Internasional.

2. Letak geografis sebagian besar Daerah Tingkat II yang cukup strategis, relatif mempunyai akses ekonomi dan hubungan dagang dengan negara-negara Asean, Asia Selatan, Timur Tengah dan beberapa Negara Eropa.
3. Adanya kerjasama sub regional IMT – GT (*Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle*), IMS – GT (*Indonesia – Malaysia – Singapura Growth Triangle*), BIMP – EAGA (Brunai Darusalam – Indonesia – Malaysia – Philipina) yang melibatkan lebih dari 33 propinsi negara-negara tersebut, merupakan aset pasar yang potensial untuk pemasaran produk-produk dalam negeri, khususnya dari Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
4. Khusus di wilayah Jawa Timur (Zona Industri Gerbang Kertosusilo, Pasuruan, Kediri, Banyuwangi, dan Sumenep) prospek pengembangan industri, perdagangan dan investasi dapat dikatakan cukup cerah disebabkan adanya peluang sebagai berikut:
 - a. Adanya rencana pembangunan Jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) yang merupakan rencana nasional.
 - b. Gagasan membangun “kota kembar” di kabupaten Bangkalan serta pembangunan kawasan industri, pelabuhan dan bandar udara.

- c. Rencana pembangunan kawasan pengolahan limbah B3 di Kabupaten Gresik guna menunjang pengembangan industri di kawasan tersebut.
- d. Dalam rangka perluasan zona industri baru kabupaten Gresik, Bangkalan dan Tuban merupakan prioritas.
- e. Pelabuhan Tanjung Perak – Surabaya merupakan pelabuhan yang mendominasi aliran arus barang domestik untuk wilayah Indonesia Bagian Timur.

E. Kebijakan Daerah Tingkat II dalam Menghadapi Liberalisasi Perdagangan dan Investasi

Dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, dan sekaligus menyiapkan daerahnya untuk masuk dalam sistem perdagangan bebas, pemerintah Daerah Tingkat II yang diteliti telah menyelenggarakan atau menempuh upaya kebijakan yang bervariasi. Beberapa kebijakan yang telah, sedang dan akan terus ditempuh antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 3 tahun 1995 tentang Pedoman Perencanaan Penanaman Modal di Daerah, dimaksudkan untuk memberikan arahan dan dorongan agar kegiatan penanaman modal dapat

ditingkatkan dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi daerah, dengan tujuan:

- a. Optimalisasi pemanfaatan potensi investasi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
 - b. Terarahnya lapangan atau bidang yang akan dipromosikan di Daerah Tingkat I dan kemudian diusulkan ke tingkat pusat.
 - c. Mantapnya proyek-proyek pemerintah sebagai penunjang kegiatan penanaman modal.
2. Peningkatan ekspor terus dipacu melalui ekspor non migas melalui penciptaan stabilitas ekonomi, deregulasi dan debirokratisasi seperti SIUP seumur hidup, pembebasan komoditi dan pengaturan tata niaga, pemberian fasilitas bebas bea, peningkatan pelayanan penerbitan dokumen ekspor dengan sistem ban berjalan. Disamping itu pengendalian impor melalui peningkatan produksi dalam yang mampu bersaing dan mengarahkan pada konsumsi produk dalam negeri.
3. Meningkatkan permodalan atau Investasi dengan cara mempromosikan potensi-potensi peluang bisnis (khususnya yang ada di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara) dengan cara patungan antara perusahaan dalam negeri dan asing. Untuk ini telah ada sebanyak 46 MOU (kesepakatan) yang telah ditanda tangani oleh para

pengusaha dalam kawasan IMT-GT senilai US\$ 3.206 milyar atau Rp 7.4 triliun.

4. Pengembangan Pantai Barat Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara melalui penyediaan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengundang para Investor untuk menanamkan Modanya.
5. Pengembangan sistem Perkotaan, yaitu membidang dan kota-kota lainnya melalui Program SCUDP (*Secondary City Urban Development Projects*) guna melayani kebutuhan Investor baik di kota membidang maupun di Daerah Tingkat II serta pengadaan fasilitas-fasilitas lain yang berhubungan dengan investasi.
6. Meningkatkan Efisiensi Investasi melalui Penurunan ICOR dengan cara Deregulasi dan Debirokratisasi dibidang Investasi PMA dan PMDN sehingga pada Pelita VII nanti diharapkan investasi pemerintah sekitar 20% dan swasta 80%. Dengan demikian akan terjadi perubahan komposisi dari Pelita VI sekarang yaitu 25 % : 75 %
7. Meningkatkan Tabungan Pemerintah melalui peningkatan Penerimaan Negara, meningkatkan efisiensi dan Efektivitas Pengeluaran rutin dan Pembangunan.
8. Meningkatkan peranan Balai-balai Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) yang ada kaitannya dengan

pengembangan IPTEK seperti Pengembangan Teknologi Proses, Produksi Rancang Bangun dan Perekrutannya, Standar Mutu Produk, Pelatihan dan Desimilasi hasil-hasilnya sehingga terjadi peningkatan Profesionalisme dalam mengelola usahanya

9. Orientasi kebijaksanaan penanaman modal di Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- Menumbuh kembangkan penanaman modal besar, menengah dan kecil bidang agro industri dan agro bisnis
- Menumbuhkembangkan investasi di pusat-pusat perkembangan wilayah pembangunan
- Mengubah ekspor dari ekspor barang mentah/primer menjadi ekspor barang jadi
- Mengarahkan proyek-proyek penanaman modal untuk daerah-daerah tertinggal

10. Upaya peningkatan PAD di Propinsi DIY, yang memungkinkan juga untuk diterapkan pada daerah lain meliputi :

- a. Pendataan objek dan subjek PAD yang akurat sehingga dapat diketahui potensi yang riil.
- b. Mengadakan penyuluhan secara terpadu dengan instansi terkait kepada aparat pemerintah, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat.

- c. Penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan perundang-undangan dengan memfungsikan PPNS.
- d. Penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan pungutan pendapatan daerah.
- e. Monitoring pelaksanaan pengelolaan PAD (sistem / produser dan pelaksanaan pungutan).
- f. Evaluasi prakiraan penerimaan berdasarkan ukuran kekuatan (*strength*) potensi dan manajemennya ; kelemahannya (*weaknees*) ; kesempatan yang ada (*opportunities*) ; dan tantangan / ancaman (*treat*) yang mungkin terjadi.
- g. Sarana, prasarana dan anggaran belanja yang memadai untuk mendukung operasional terpenuhi.
- h. Peningkatan SDM melalui : penempatan personil sesuai kualifikasi pendidikan, peningkatan kemampuan dengan, pendidikan perjenjangan, pendidikan teknis fungsional dan pendidikan keterampilan lainnya.
- i. Khusus dalam menanggulangi akibat krisis moneter, maka pemanfaatan bantuan pemerintah yang berupa proyek padat karya hendaknya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya investatif yang akan mendorong pertumbuhan selanjutnya.

11. Di Jawa Timur, kebijaksanaan yang telah ditempuh dalam rangka menunjang pengembangan dunia usaha, dapat dirinci sebagai berikut :

a. Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Data Investasi Pembangunan Serta Sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi Penanaman Modal melalui SK Gubernur No. 188/575/SK/014/1994 dan SK Gubernur No. 188/514/SK/014/1995, yang diharapkan dapat menghasilkan manfaat antara lain berupa :

- Peningkatan koordinasi dan komunikasi data antar instansi terkait pada Propinsi Dati I Jawa Timur, yaitu antar instansi-instansi BKPM Tingkat I, KPDE Dati I, Biro Bina Perekonomian, Setwilda Tk I, Bappeda Tk I serta instansi terkait lainnya Tingkat I dan Tingkat II.
- Peningkatan koordinasi dan komunikasi data antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dengan penyajian informasi penanaman modal yang lebih lengkap, cepat, akurat dan berkesinambungan.
- Penyajian informasi investasi masyarakat (PMDN, PMA, Non PMDN/PMA) secara lengkap.
- Dapat memacu perusahaan PMDN/PMA dalam rangka merealisasi proyeknya.
- Mendorong peran serta perusahaan PMDN/PMA dalam penanaman modal.

- Diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya.
- b. Melaksanakan Gerakan Kembali ke Desa (GKD) yang merupakan panggilan kepada masyarakat dan swasta untuk ikut aktif dalam pembangunan dengan prinsip :
 - Menempatkan inisiatif dan kreativitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang utama serta memandang kesejahteraan sebagai tujuan dari proses pembangunan.
 - Mengutamakan pertimbangan tradisi, prakarsa dan keragaman kondisi lokal yang ada dengan memobilisasi seluruh potensi swadaya dari seluruh infrastruktur masyarakat.
 - Berorientasi pada upaya pemberdayaan yang berarti mendorong kemandirian dan menghindari ketergantungan. Peran pemerintah bukan untuk menyediakan kebutuhan rakyat, melainkan untuk menciptakan iklim kondusif yang memungkinkan rakyat dapat melangsungkan hidup menjadi lebih efektif dalam mengembangkan kemampuannya.

12. Kebijakan yang ditempuh untuk menunjang pembangunan sektor industri di Sulsel selama kurun waktu 5 Tahun (1992/1993 - 1996/1997) adalah :

- a. Penciptaan struktur ekonomi yang makin berimbang antara sektor pertanian dan industri serta sektor ekonomi lainnya, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) secara optimal dan efisien.
- b. Pemanfaatan sumberdaya kini dan masa datang, yang dilaksanakan berdasarkan asas pelestarian fungsi sumber daya alam dan Lingkungan hidup.
- c. Prioritas pengembangan pada industri pengolahan dan kehutanan serta industri strategis lainnya dengan skala besar seperti : kemaritiman, tambang mineral dll. Disamping itu perhatian khusus pada industri kerajinan dan rumah tangga yang dapat menyentuh rakyat kecil dipedesaan maupun kerajinan rakyat.
- d. Penciptaan iklim usaha industri yang kondusif yang dapat mendorong investasi swasta sebagai pelaku ekonomi yang potensial melalui berbagai kemudahan dan keringanan pemanfaatan fasilitas perangkat kelembagaan keuangan di daerah.
- e. Upaya pengembangan Kawasan Industri Makassar menjadi Kawasan Berikat yang ditunjang oleh Pengembangan Bandara Hasanuddin sebagai Pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan sebagai Bandara Internasional, peningkatan status pelabuhan Makassar menjadi pelabuhan ekspor.

f. Pengembangan kawasan/sentra industri kecil di beberapa Dati II, penyebaran jenis-jenis industri yang layak untuk dikembangkan dalam rangka mempercepat pembangunan antar daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

13. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan kinerja perdagangan Sulawesi Selatan, antara lain adalah :

- a. Dalam perdagangan dalam negeri, dilaksanakan upaya pemasyarakatan Kepres No. 16 Tahun 1992 dan Kepres No. 24 Tahun 1995 tentang Ketentuan mengenai Penggunaan Produksi Dalam Negeri ; meningkatkan pembinaan dan pengendalian terhadap penggunaan barang dan jasa bagi pengusaha/rekanan ; mendorong peningkatan dan perkembangan badan-badan usaha produksi dan jasa untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan ; pembuatan daftar barang dan harga barang produksi dalam negeri ; pemantapan dan perluasan pasar ; peningkatan perlindungan terhadap konsumen ; penciptaan persaingan usaha yang sehat guna melindungi pengusaha dan pedagang menengah dan kecil ; serta peningkatan peranan koperasi di sektor perdagangan.
- b. Untuk perdagangan luar negeri, ditempuh kebijakan peningkatan daya saing komoditas ekspor ; peningkatan struktur ekspor ; perluasan tujuan negara ekspor ; pengembangan sarana dan prasarana

perdagangan ; peningkatan pasilitas perkreditan ekspor ; peningkatan kerjasama perdagangan internasional ; peningkatan kemampuan dan peranan pengusaha dan pedagang menengah dan kecil ; serta pengendalian impor.

14. Kebijakan yang ditempuh untuk mempercepat roda pembangunan di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dengan penggunaan dana yang efisien dan efektif, maka telah ditetapkan enam Kawasan Andalan untuk investasi. Diharapkan dengan diprioritaskannya pembangunan di setiap kawasan andalan ini juga akan mempercepat pertumbuhan kawasan lainnya, sehingga secara keseluruhan pertumbuhan pembangunan Sulawesi Selatan dapat meningkat. Kawasan andalam tersebut adalah :

- a. Kawasan Andalan Mamuju dan sekitarnya (titik berat pengembangan agro industri, pertanian tanaman pangan, perikanan laut dan tambak, peternakan serta jasa dan perdagangan).
- b. Kawasan Andalan Parepare dan sekitarnya (titik berat pengembangan pertanian tanaman pangan, peternakan, agro industri dan jasa perdagangan).
- c. Andalan Watampone dan sekitarnya (titik berat pengembangan agro industri, pertanian tanaman pangan, perikanan laut dan tambak, peternakan dan jasa perdagangan).

- d. Kawasan Andalan Ujung Pandang dan sekitarnya (titik berat untuk pengembangan jasa dan perdagangan, industri, pendidikan dan pariwisata).
 - e. Kawasan Andalan Palopo dan sekitarnya (titik berat pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, agro industri, pariwisata, pengolahan kayu dan hasil hutan lainnya).
 - f. Kawasan Andalan Bulukumba dan sekitarnya (titik berat pengembangan agro industri, perkebunan, pertanian tanaman pangan, industri maritim / perkapalan, serta pariwisata).
15. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan kinerja ekonomi, perdagangan, industri dan investasi di Sulawesi Utara adalah dengan menetapkan 11 kawasan prioritas yang dibagi menjadi 3 kawasan sebagai berikut:
- a. 7 Kawasan Cepat Tumbuh, yang terdiri dari: Sentra Produksi Pertanian Paguyaman, Randangan dan Marisa, Kecamatan Lolak-Sang Tombolang, Kawasan Wilayah Pantai Tasik Ria-Manado-Tanjung Pisok-Bunaken-Likupang-Bitung, Zona Industri KABIMA (Kauditan-Bitung-Kema), Sentra Produksi Pertanian Pangan Dumoga dan jalur Sepanjang Trans Sulawesi.
 - b. 2 Kawasan Kritis, yang terdiri dari: Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano di Minahasa dan daerah Aliran Sungai (DAS) Limboto Sungai Bolango-Bone-Gorontalo.

- c. 2 Kawasan Khusus, yang terdiri dari: Daerah Perbatasan Kepulauan Sangihe Talaud dan Hutan Taman Nasional Bogani-Nani Wartabone di Bolaang Mongondow.

16. Untuk memperkuat perekonomian daerah dan dalam rangka menghadapi era globalisasi, maka pemerintah Sulawesi Utara juga telah membentuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), dimana kawasan Manado-Bitung lebih diarahkan prioritas kegiatannya pada beberapa sub-sub kawasan di dalam wilayah pengembangannya, yaitu:

- a. Sub Kawasan Manado diarahkan sebagai kawasan Industri / Agroindustri, Perikanan, Pariwisata, Pemukiman, Pendidikan dan Perdagangan.
- b. Sub Kawasan Bitung dan sekitarnya termasuk Airmadidi diarahkan sebagai Kawasan Industri / Agroindustri, Pariwisata, Perikanan Laut.
- c. Sub Kawasan Tondano-Tomohon dan sekitarnya diarahkan sebagai kawasan Pertanian Hortikultura, Pariwisata, Sumber Energi / Kelistrikan dan Air Bersih.
- d. Sub Kawasan Likupang diarahkan sebagai Kawasan Pariwisata dan Budidaya Perikanan Darat.

Demikianlah beberapa kebijaksanaan yang dilakukan oleh Daerah Tingkat II, yang masing-masing memang memiliki karakteristik tersendiri disesuaikan dengan muatan lokal masing-masing daerah, namun tetap dalam konteks mengatasi permasalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh proses liberalisasi perdagangan bebas dan investasi, sekaligus

menyiapkan diri untuk dapat berperan serta aktif dan menarik manfaat sebesar-besarnya dari proses global tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan investasi merupakan suatu fenomena yang terjadi secara alamiah, dan akan mengakibatkan hubungan atau interaksi antar bangsa yang semakin intensif. Dalam keadaan normal, situasi globalisasi akan mengakibatkan munculnya keuntungan dan kemanfaatan bagi semua negara yang terlibat. Namun kenyataannya globalisasi ekonomi yang akan berlaku pada tahun 2003 (AFTA) atau 2020 (APEC) diprediksikan akan lebih banyak dimanfaatkan oleh negara maju sedang negara berkembang hanya sebagai "penonton". Hal ini disebabkan karena adanya hubungan yang tidak seimbang (*asymetric relation*) antara negara maju dengan negara berkembang.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, maka liberalisasi perdagangan dan investasi harus diterima dengan

dibarengi oleh persiapan-persiapan, baik dalam aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun dasar hukum peraturan perundang-undangnya.

3. Melihat permasalahan yang dihadapi, kesiapan Daerah Tingkat II dalam era liberalisasi perdagangan dan investasi masih relatif lemah, khususnya karena belum didukung oleh sistem kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai. Dengan demikian, meskipun angka-angka statistik menunjukkan tingkat kinerja Daerah Tingkat II yang cukup tinggi dalam sektor-sektor industri, perdagangan dan investasi, namun kondisi tersebut belum menggambarkan kinerja riil.
4. Beberapa masalah yang berkaitan dengan kelembagaan pemerintah Daerah Tingkat II antara lain adalah belum adanya lembaga khusus yang menangani masalah investasi, belum berjalannya kemitraan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil dan koperasi secara optimal, masih terjadinya tumpang tindih antar kepentingan diberbagai sektor, lemahnya permodalan industri kecil dan rumah tangga disertai pula dengan belum berfungsinya pembinaan dari pemerintah secara baik, dan sebagainya.
5. Dari aspek ketatalaksanaan, permasalahan yang dihadapi antara lain berupa lemahnya manajemen usaha khususnya

bagi usaha kecil dan koperasi, prosedur ekspor yang belum sepenuhnya mendukung kelancaran ekspor, prosedur perijinan dalam rangka investasi yang terlalu lama dan relatif birokratis (berbelit-belit) serta bersifat sentralistis, perumusan Peraturan Daerah yang belum dapat berjalan sesuai dengan semangat deregulasi karena adanya berbagai keterbatasan, dan sebagainya.

6. Sementara itu permasalahan pokok dalam aspek SDM yang dihadapi oleh Daerah Tingkat II dalam era globalisasi perdagangan dan investasi adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kurang mendukung – terutama dari aspek pendidikan, daya saing dan kualitas hidupnya.

B. Saran-Saran (Rekomendasi)

Sehubungan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Daerah Tingkat II dalam era globalisasi perekonomian dunia, serta kemungkinan-kemungkinan dampak negatif yang akan ditimbulkannya, maka berikut ini diajukan beberapa rekomendasi – baik secara kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia – yang diharapkan mampu menjadi alternatif untuk meningkatkan kemampuan daya saing Daerah Tingkat II.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan disini antara lain adalah :

1. Sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung-jawab, sudah dirasakan perlunya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu atau setidaknya-tidaknya dalam bentuk Tim di Daerah Tingkat II yang di dalamnya duduk wakil-wakil dari instansi terkait yang memiliki wewenang menerbitkan izin (Kantor Pertanahan, BAPPEDA, Bagian Pemerintahan, Bagian Perekonomian, Dinas PU Cipta Karya / Dinas Tata Kota, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendapatan Daerah) yang diberi wewenang secara penuh oleh Bupati / Walikota untuk menerbitkan semua izin pelaksanaan investasi melalui sistem "*one gate services*" (pelayanan satu pintu).

Dengan penerapan sistem ini tidak membuat investor bingung dan harus datang ke banyak instansi. Cukup mengajukan permohonan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu atau Tim Pelayanan Perijinan Terpadu ini, investor tinggal menunggu permohonan ijinnya dikabulkan atau ditolak. Dalam pelaksanaannya juga perlu dihindari adanya sistem pelayanan "*face to face*", melainkan dengan mekanisme dokumen berjalan. Kekurang-jelasan mengenai rencana usaha investor dapat ditempuh dengan meminta investor melakukan presentasi/paparan dihadapan pejabat yang terkait dalam Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Hal ini diperlukan dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta efisiensi waktu / biaya. Diharapkan melalui sistem ini salah satu penyebab ekonomi biaya tinggi yang dirasakan oleh investor dapat dipangkas / dihindari. Namun perlu diingat bahwa pembentukan tim atau Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ini hanya cocok untuk daerah-daerah yang memiliki daya tarik investasi cukup tinggi.

2. Perlu adanya pelimpahan wewenang dalam pemberian perijinan atau persetujuan investasi ke Daerah untuk skala investasi tertentu. Untuk investasi skala besar dalam arti memerlukan investasi besar, memerlukan lahan luas, atau cenderung mencemari / merusak lingkungan, maka pemberian persetujuan investasinya perlu melibatkan Daerah, dalam bentuk rekomendasi dari Gubernur KDH Tingkat I atau Bupati / Walikota KDH Tingkat II. Kesemuanya ini bukan dimaksudkan untuk menambah persyaratan persetujuan investasi, namun dalam rangka mendukung agar persetujuan investasi dari pemerintah pusat dapat dilaksanakan di daerah, karena sudah mendapat jaminan dari Gubernur KDH Tingkat I atau Bupati/ Walikota KDH Tingkat II
3. Perlunya diusahakan secara terus menerus peningkatan sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, pasar, telekomunikasi, listrik, air bersih dan transportasi, yang

semuanya dimaksudkan untuk menunjang kelancaran arus investasi di daerah.

4. Pemerintah Daerah Tingkat II perlu melakukan usaha promosi baik di luar maupun dalam negeri mengenai aspek-aspek SDA, SDM, iklim usaha kondusif, penggalan sumber dana yang memungkinkan dan stabilitas politik yang mantap. Hal ini untuk memberikan garansi psikologis kepada investor (khususnya asing) agar bersedia menanamkan modalnya di Indonesia.
5. Perlunya dikaji mengenai kebijakan privatisasi atau swastanisasi perusahaan-perusahaan milik daerah (BUMN), baik melalui pengalihan asset maupun pengelolaan manajemen, baik sebagian maupun keseluruhan. Disamping itu perlu dikaji pula mengenai upaya melakukan merger terhadap perusahaan-perusahaan daerah yang sejenis (misal BPR), agar dapat dicapai efisiensi secara operasional.
6. Akhirnya dapat disarankan bahwa dalam melakukan "reformasi" ekonomi, pemerintah dituntut untuk menunjukkan kesungguhna dan konsistensi melalui kebijakan yang tegas, tidak saling menyimpangi, tidak banyak mengatur, dan sebagainya.

Dengan demikian, kebijakan untuk pemberdayaan pengusaha kecil dan koperasi, perluasan kesempatan kerja

dan percepatan penguasaan teknologi maju, hendaknya tidak hanya merupakan tekad politis, namun lebih operasional dalam penjabarannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku / Jurnal Ilmiah :

- Arief, Sritua, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia : Pemberdayaan Rakyat Dalam Arus Globalisasi*, Bandung : Zaman, 1998
- Basri, Faisal, *Perekonomian Indonesia Menelang Abad XXI : Distorsi, Peluang dan Kendala*, Jakarta : Erlangga, 1997
- Budiman, Arief, *Teori Negara : Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta : Gramedia, 1996
- Djumara, Noorsyamsa, *Prospek Pengembangan Jabatan Fungsional Penegak Hukum Bidang Pemasarakatan*, Orasi Ilmiah Disampaikan Pada Upacara Wisuda Ke-30 dan Dies Natalis Ke-33 Akademi Ilmu Pemasarakatan, Jakarta, Oktober 1997.
- Drucker, Peter, *Managing in A Time of Great Change*, terjem. oleh Agus Teguh Handoyo, "Manajemen di Tengah Perubahan Besar", Jakarta : Elex Media Komputindo, 1997

Effendi, Sofian, *Revitalisasi Sektor Publik Menghadapi Keterbukaan Ekonomi dan Politik*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar FISIP UGM, Yogyakarta, 3 Agustus 1996

Herlianto, *Urbanisasi, Pembangunan dan Kerusuhan Kota*, Bandung : Alumni, 1997

Gilbert, Alan dan Josef Gugler, *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1996

Hulu, Edison, "Kekhawatiran di Balik Keajaiban Ekonomi Indonesia", dalam *Prisma*, No. 5 tahun 1997

Husken , Frans, (et. al), *Indonesia Dibawah Orde Baru*, Jakarta : Grasindo, 1997

Juoro, Umar, "Deklarasi Bogor dan Agenda Nasional", *Kompas*, 24 November 1994

Kartasasmita, Ginanjar, *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta : CIDES, 1996

_____, "Visi Pembangunan 2020 : Peran Profesi Administrasi Dalam Pembangunan", makalah pada Seminar Nasional PERSADI, Jakarta, 8-9 Maret 1997

- Kristiadi, JB., “*Deregulasi dan Debirokratisasi Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan*“, makalah pada Seminar Nasional PERSADI, Jakarta, 8-9 Maret 1997
- Krugman, P., “The Mynth of Asia’s Miracle”, dalam *Foreign Affairs*, Vol. 73 No. 6/1994
- Kumorotomo, Wahyudi, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1992
- Kuncoro, Mudrajad, *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 1997
- Mubyarto, “Penanggulangan Kemiskinan”, dalam *Analisis* No. 17 Th. 4 September - Oktober 1996
- Ormerod, Paul, *Matinya Ilmu Ekonomi (The Death of Economics)*, terjemahan oleh Parakitri tahi Simbolon, Jilid 1, Jakarta : Gramedia, 1998
- Osborne, David and Gaebler, Ted, *Reinventing Government (How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector)*, Addison-Wesley Publishing company, Inc, 1992.

- Poerbopranoto, Koentjoro, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung : Eresco, 1987
- Prakarsa, Wahyudi, *Dampak Perubahan Lingkungan Pasar Terhadap Organisasi dan Manajemen*, makalah tidak diterbitkan, Jakarta : Program Pascasarjana UI, 1997
- Rachbini, Didik J., t.t. , *Ekonomi Politik : Paradigma, Teori dan Perspektif Baru*, Jakarta : CIDES
- Rosell, Steven A., (et.al.), *Governing in an Information Society*, Institute for Research on Public Policy, Montreal : 1992
- Salim, Emil, (et.al.), *Manajemen Dalam Era Globalisasi*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 1997
- Schoorl, JW., *Modernisasi : Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*, Terjemahan RG. Soekadijo, Jakarta : Gramedia, 1988
- Suparlan, Parsudi, (ed.), *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta : Obor, 1995.
- Suryohadiprojo, Sayidiman, *Republika*, 7 November 1994, hal. 6

Susanto, Hari, "Pemanfaatan Dana IDT : Upaya Pemberdayaan dan Pengentasan Dari Kemiskinan", dalam *Analisis* No. 17 Th. 4 September - Oktober 1996, hlm. 47 - 48

Thoha, Miftah, ".....", makalah pada Seminar Nasional PERSADI, Jakarta, 8-9 Maret 1997

Tjokroamidjojo, Bintoro, "*Pembangunan Administrasi Publik Dalam Pelita VII*", makalah pada Seminar Nasional PERSADI, Jakarta, 8-9 Maret 1997

_____, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta : LP 3 ES, 1990, Cet. Ke-13

Usman, Marzuki, "*Transformasi Administrasi Bisnis Dalam Menghadapi Persaingan Global*", makalah pada Seminar Nasional PERSADI, Jakarta, 8-9 Maret 1997

von Glinow, Mary Ann, *The New Professionals : Managing Today's High-Tech Employess*, Ballinger Publishing Company, 1988

Wirasasmita, Yuyun, *Ekonomi, Penganggaran, Investasi dan Keuangan Negara*, Materi Kuliah Program Pascasarjana BKU Kebijakan Publik, Bandung, 1997

Zauhar, Soesilo, *Reformasi Administrasi : Konsep, Dimensi dan Strategi*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996

Surat Kabar / Majalah :

Suara Karya, 23 April 1997

Kompas, *Makin Banyak Rakyat Miskin*, 1 April 1998

Lampiran

SUSUNAN ANGGOTA PENELITIAN

Berdasarkan SK Ketua Lembaga Administrasi Negara RI Nomor: 378 P/IX/6/4/97 tentang Pelaksana Proyek Penelitian Identifikasi Masalah Yang Dihadapi Daerah Tingkat II Dalam Menghadapi Era Liberalisasi Perdagangan dan Investasi adalah sebagai berikut:

1. Pembina Program : Prof. DR. J.B. Kristiadi
Drs. Poltak Panggabean
2. Penanggung Jawab/
Operasional Peneliti : DR. Karhi Nisjar S., Ak.MM.
3. Pimpinan Proyek : Wawan Dharma Setiawan, SH.
4. Koordinator Peneliti : Drs. Desi Fernanda, M.Soc.Sc.
5. Peneliti :
 1. Drs. Nana Beni Hermana
 2. Wawan Dharma Setiawan, SH
 3. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH
 4. Saefudin Hazuri, SE.
 5. Baban Sobandi, SE..

6. Pembantu Peneliti : 1. Dra. Hayuni Rachmawati
2. Drs. Ramdani Priatna
3. Dra. Laksmi Fitriani
4. Drs. Syarifudin Hidayat
5. Gugum Gumelar, SH.
6. Drs. Dayat Hidayat
7. Drs. Rosman Ruskana
8. Drs. Awang Anwaruddin, MEd.
9. Drs. Ento Supriatna
10. Drs. Thomas Priyono
7. Pembantu Lapangan : 1. Drs. Ruchikmat
2. Susniwati, S.Sos.
3. Siti Mariam, BA.
4. Opik Idham Taufiq
5. T i n o
6. Anita Ilyas
7. Eman Suherman
8. Tata Tardiyat
9. Enu Suwita
10. Haris Rusmana

1. The Cambridge University Press
2. The Cambridge University Press
3. The Cambridge University Press
4. The Cambridge University Press
5. The Cambridge University Press
6. The Cambridge University Press
7. The Cambridge University Press
8. The Cambridge University Press
9. The Cambridge University Press
10. The Cambridge University Press

1. The Cambridge University Press
2. The Cambridge University Press
3. The Cambridge University Press
4. The Cambridge University Press
5. The Cambridge University Press
6. The Cambridge University Press
7. The Cambridge University Press
8. The Cambridge University Press
9. The Cambridge University Press
10. The Cambridge University Press

